

**DISERTASI**



**BUDAYA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF  
E-GOVERNMENT**

**CULTURE AND TECHNOLOGICAL INFORMATION ON  
GOVERNMENT PERFORMANCE IN E-GOVERNMENT  
PERSPEKTIF**

**MUCHRIANA MUCHRAN**

**P0500314005**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**

**DISERTASI**

**BUDAYA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF *E-GOVERNMENT***


Disusun dan diajukan oleh

**MUCHRIANA MUCHRAN**


**Nomor Pokok P0500314005**

telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Disertasi  
pada tanggal 31 Juli 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

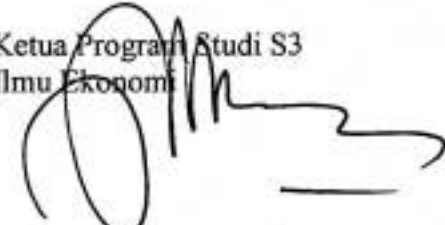
Menyetujui  
Komisi penasihat,

  
**Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., Ak., MS., CA**  
Promotor

  
**Drs. Harryanto, M.Com., Ph.D.**  
Ko-Promotor

  
**Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si, CA**  
Ko-Promotor

Ketua Program Studi S3  
Ilmu Ekonomi

  
**Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA**

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi & Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
**Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si**

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchriana Muchran  
NIM : P0500314005  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul:

### **BUDAYA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF E-GOVERNMENT**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 31 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Muchriana Muchran

## PRAKATA

Alhamdulillah, Puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang mengikutinya, serta semoga kita umatnya dapat memperoleh syafaatnya kelak. Aamiin.

Dalam proses penyelesaian pendidikan program doktor ini, banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan dorongan, arahan dan bimbingan, untuk itu, dalam prakata ini dengan tulus hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS., CA. selaku promotor. Meskipun beliau memiliki kesibukan yang tinggi tetap meluangkan waktu dengan penuh ketulusan untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan dalam penyelesaian disertasi ini.

Bapak Drs. Harryanto, M.Com., Ph.D Selaku kopromotor I, yang penuh kesabaran dan ketulusan, mendorong, memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Ibu Prof. Dr. Mediaty., S.E., Ak., M.Si., CA, selaku kopromotor II, yang penuh kesabaran dan ketulusan memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Bapak Dr. Wahyudin Abdullah, S.E. Ak., M.Si., CA, selaku penguji eksternal atas bimbingan dan waktu yang diluangkan dalam memberikan masukan untuk

penyempurnaan disertasi ini. , Ibu Prof. Dr. Haliah, S.E., Ak., M.Si., CA, Bapak Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA, Bapak Dr. Arifuddin., S.E., Ak., M.Si., CA, Ibu Dr. Nirwana., S.E., Ak., M.Si., CA, Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid., S.E., M.Si selaku penguji yang memberikan masukan, kritik dan sarannya untuk penyempurnaan disertasi ini.

Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., dan Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Haris Maupa, S.E., M.Si selaku ketua program Doktor Ilmu Ekonomi pada saat penulis pertama kuliah dan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., MA selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi. Dosen dan staf Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Ristekdikti) yang telah memberikan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) tahun 2014 kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan Doktor.

Bapak. Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Ismail Rasulong, SE., M.M selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar beserta jajarannya, Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Linda Arisanti Razaq, SE., M.Si., Ak., CA selaku sekretaris prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar, serta teman dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar.

Sahabat dan seperjuangan penulis, mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, angkatan 2014 (Ibu Dr. Hj. Marwah Yusuf, Ibu Dr.Tenriwaru, Ibu Dr. Ana Mardiana, Ibu Dr. Rahmawati, Ibu Dr. Maylen Kambuaya, Ibu Dr.



Triastuti, Ibu Dr. A.Ririn Sumange, Ibu Dr. Misrah, Ibu. Dr. Seri, Ibu. Dr. Fatmasari, Ibu. Dr. Ida, Ibu. Dr. Numaningsih, Pak Dr. Marselinus Asri, Pak Dr. Arifin, Pak Dr. Paulus Tangke, dan seluruh rekan angkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu). Ibu. Dr. Ratna, Pak Rein serta teman-teman lainnya yang sempat berinteraksi dengan penulis.

Secara khusus dan istimewa penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan mertuaku. Kepada ibunda Dra. Hj. Nurdiana, M.Si dan Ayahanda Dr. Muchran BL., SE., M.Si beserta Dra. Hj. Linda dan Drs. Iskandar Muda atas segala doa, ketulusan, dan dedikasi tiada henti yang telah penulis dapatkan selama ini serta turut membantu menemani serta menjaga ananda Zafran di saat penulis sibuk menyelesaikan proses akhir pendidikan S3.

Suami Dedy Ashari S.E., M.Si dan anakku Muhammad Al Zafran Ashari yang lahir di saat penulis dalam proses pendidikan S3, atas pengertian, senantiasa memberikan dukungan doa dan motivasi untuk tetap semangat dan terus berusaha mencapai gelar Doktor.

Saudaraku Dr. Muchriady Muchran, SE., M.Kom., Murniady Muchran, SE., M.Si, Masteriady Muchran, SH., M.Kn, Monadillah Muchran, S.Farm., Apt serta saudara ipar Hernita Arifuddin, S.Pd., M.Pd, Afrinda Mayasari SH., M.Kn. Muhammad Akhyar, SE, Muhammad Ardiansyah, S.S, yang juga telah mendoakan, memotivasi dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, seta keponakan tercinta Adita Maghfira Ataya dan Ainiyah Azkiara.

Prof.Dr.H.Muhammad Yunus Zain, SE., M.A. dan Prof. Dr. Rahmatia., SE., MA, selaku paman dan tante yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis hingga penyelesaian pendidikan ini.

Atas bantuan dan pertolongan dari semua pihak, penulis tidaklah sanggup membalasnya, hanya doa yang ikhlas yang dapat penulis mohonkan kepada-Nya, kiranya bantuan yang tulus dari bapak/ibu dan saudara-saudari mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin.

Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberi manfaat bagi semuanya. Meski penulis tetap menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan demi kesempurnaan disertasi ini.

Makassar, Juli 2019  
Penulis,

Muchriana Muchran

## ABSTRAK

**MUCHRIANA MUCHRAN.** *Budaya dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam Perspektif E-Government* (dibimbing oleh Gagaring Pagalung, Harryanto, Mediaty).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji hubungan budaya dan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam perspektif *e-government*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner. Populasi penelitian yaitu masyarakat, anggota DPRD dan birokrasi. Penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan menggunakan karakteristik responden. Untuk pengujian hipotesis menggunakan alat analisis Structural Equation Modeling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Budaya politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Budaya administratif memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Teknologi informasi mampu meningkatkan budaya sosial, budaya politik dan budaya administrasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Hadirnya teknologi informasi membentuk paradigm baru di masyarakat, anggota DPRD, birokrasi sehingga mampu berinteraksi dengan budaya sosial, politik dan administrative dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian terdahulu dan dapat mengembangkan Luder's contingency model dalam melihat proses kinerja pemerintah. Luder menekankan bahwa perlunya inovasi dalam pengembangan pemerintahan. Salah satu inovasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang merupakan perangkat pelengkap dalam menunjang kinerja pemerintah. Hadirnya teknologi mampu berinteraksi dengan budaya dalam keterlibatannya pada proses pemerintahan.

**Kata kunci:** Kinerja Pemerintah Daerah, Teknologi informasi, Budaya sosial, Budaya politik, Budaya administratif, E-Government, Anggaran





## ABSTRACT

**MUCHRIANA MUCHRAN.** *Culture and Information Technology on Local Government Performance in E-Government Perspectives* (guided by Gagaring pagalung, Harryanto, Mediaty).

This study aims to analyze and examine the relationship of culture and information technology to the performance of local governments in an e-government perspective.

This research is a quantitative study using primary data by distributing questionnaires. The study population are the community, members of parliament and the bureaucracy. Sampling using purposive sampling by using the characteristics of respondents. For testing hypotheses using Structural Equation Modeling analysis.

The results showed that social culture did not have an influence on the performance of local government. Political culture has a significant positive effect on local government performance. Administrative culture has an influence on local government performance. Information technology can improve social culture, political culture and administrative culture on the performance of local governments. The presence of information technology forms a new paradigm in society, members of the DPRD, bureaucracy so that it can interact with social, political and administrative culture in improving the performance of local governments.

The findings of this study confirm the results of previous studies and can develop the Luder's contingency model in looking at government performance processes. Luder stressed that the need for innovation in the development of government. One of the innovations carried out using information technology which is a complementary tool in supporting government performance. The presence of technology is able to interact with culture in its involvement in government processes.

**Keywords:** Local Government Performance, Information Technology, Social Culture, Political Culture, Administrative Culture, E-Government, Budget



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PRAKATA .....	iii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	24
1.3 Tujuan Penelitian .....	24
1.4 Kegunaan Penelitian.....	25
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	27
1.6 Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	29
2.1.1 Technology-Organization –Environment Theory ..	29
2.1.2 Model Kesuksesan Sistem Informasi D&M.....	31
2.1.3 Teori Kontingensi.....	36
2.1.4 Luder's Contingency Model.....	39
2.1.5 Budaya dan Akuntansi.....	44
2.1.6 Pengembangan Sistem Informasi.....	48
2.1.7 E-Government .....	50
2.1.7.1 <i>E-Planning &amp; E-Budgeting</i> .....	54
2.1.8 Penganggaran .....	56
2.1.9 Kinerja Pemerintah Daerah.....	57
2.2 Tinjauan Empiris .....	60
<b>BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b>	
3.1 Kerangka Konseptual.....	69
3.2 Hipotesis.....	75
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
4.1 Rancangan Penelitian .....	82
4.2 Situs dan waktu Penelitian.....	82
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	83
4.4 Jenis dan Sumber Data .....	84
4.5 Metode Pengumpulan Data .....	85
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	85

4.7 Teknik Analisis Data .....	88
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b>	
5.1 Gambaran Umum Responden.....	98
5.2 Analisis Deskriptif Karakteristik Variabel .....	105
5.2.1 Deskripsi Variabel Budaya Sosial .....	106
5.2.2 Deskripsi Variabel Budaya Politik.....	112
5.2.3 Deskripsi Variabel Budaya Administratif .....	117
5.2.4 Deskripsi Variabel Teknologi Informasi.....	121
5.2.5 Deskripsi Variabel Kinerja Pemerintah Daerah.....	124
5.3 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas .....	126
5.3.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Sosial.....	126
5.3.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Politikl .....	127
5.3.3 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Sosial.....	129
5.3.4 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Teknologi Informasi.....	130
5.3.5 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	132
5.4 Analisis Fit-Model.....	133
5.5 Anaisis Hasil Uji Hipotesis .....	134
<b>BAB VI PEMBAHASAN</b>	
6.1 Pengaruh Budaya Sosial terhadap Kinerja Pemeritah Daerah.....	138
6.2 Pengaruh Budaya Politik terhadap Kinerja Pemeritah Daerah.....	146
6.3 Pengaruh Budaya Administratif terhadap Kinerja Pemeritah Daerah.....	153
6.4 Pengaruh Moderasi Sistem Teknologi Informasi antara Budaya Sosial terhadap Kinerja Pemeritah Daerah .....	159
6.5 Pengaruh Moderasi Sistem Teknologi Informasi antara Budaya Politik terhadap Kinerja Pemeritah Daerah.....	164
6.6 Pengaruh Moderasi Sistem Teknologi Informasi antara Budaya Administratif terhadap Kinerja Pemeritah Daerah	167
<b>BAB VII PENUTUP</b>	
7.1 Kesimpulan .....	173
7.2 Implikasi Hasil Penelitian.....	177
7.3 Keterbatasan Penelitian .....	178
7.4 Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA .....	179
LAMPIRAN .....	

4.7 Teknik Analisis Data .....	88
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b>	
5.1 Gambaran Umum Responden.....	98
5.2 Analisis Deskriptif Karakteristik Variabel .....	105
5.2.1 Deskripsi Variabel Budaya Sosial .....	106
5.2.2 Deskripsi Variabel Budaya Politik.....	112
5.2.3 Deskripsi Variabel Budaya Administratif .....	117
5.2.4 Deskripsi Variabel Teknologi Informasi.....	121
5.2.5 Deskripsi Variabel Kinerja Pemerintah Daerah.....	124
5.3 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas .....	126
5.3.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Sosial.....	126
5.3.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Politikl .....	127
5.3.3 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Sosial.....	129
5.3.4 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Teknologi Informasi.....	130
5.3.5 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	132
5.4 Analisis Fit-Model.....	133
5.5 Anaisis Hasil Uji Hipotesis .....	134
<b>BAB VI PEMBAHASAN</b>	
6.1 Pengaruh Budaya Sosial terhadap Kinerja Pemeritah Daerah.....	138
6.2 Pengaruh Budaya Politik terhadap Kinerja Pemeritah Daerah.....	146
6.3 Pengaruh Budaya Administratif terhadap Kinerja Pemeritah Daerah.....	153
6.4 Pengaruh Moderasi Sistem Teknologi Informasi antara Budaya Sosial terhadap Kinerja Pemeritah Daerah .....	159
6.5 Pengaruh Moderasi Sistem Teknologi Informasi antara Budaya Politik terhadap Kinerja Pemeritah Daerah.....	164
6.6 Pengaruh Moderasi Sistem Teknologi Informasi antara Budaya Administratif terhadap Kinerja Pemeritah Daerah	167
<b>BAB VII PENUTUP</b>	
7.1 Kesimpulan .....	173
7.2 Implikasi Hasil Penelitian.....	177
7.3 Keterbatasan Penelitian .....	178
7.4 Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA .....	179
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Lokasi Penelitian .....	77
Tabel 4.2 Kriteria Goodnes of Fit.....	85
Tabel 5.1 Distribusi Kuesioner.....	99
Tabel 5.2 Rangkuman Distriburi Responden .....	99
Tabel 5.3 Distribusi Presentase Responden.....	101
Tabel 5.4 Deskripsi Responden .....	102
Tabel 5.5 Kategori Penilaian .....	105
Tabel 5.6 Tanggapan Responden pada Vairabel Budaya Sosial...	112
Tabel 5.7 Tanggapan Responden pada Vairabel Budaya Politik ...	117
Tabel 5.8 Tanggapan Responden pada Vairabel Budaya Administratif .....	121
Tabel 5.9 Tanggapan Responden pada Vairabel Sistem Teknologi Informasi .....	122
Tabel 5.10 Tanggapan Responden pada Vairabel Kinerja Pemerintah Daerah .....	124
Tabel 5.11 Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Sosial .....	126
Tabel 5.12 Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Sosial .....	127
Tabel 5.13 Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Politik .....	128
Tabel 5.14 Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Politik .....	128
Tabel 5.15 Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Administratif .....	129
Tabel 5.16 Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Administratif .....	130
Tabel 5.17 Uji Validitas dan Reliabilitas Item Sistem Teknologi Informasi .....	132
Tabel 5.18 Uji Validitas dan Reliabilitas Item Sistem Teknologi Informasi .....	132
Tabel 5.19 Uji Validitas dan Reliabilitas Item Kinerja Pemerintah Daerah .....	132
Tabel 5.20 Evaluasi Kriteria Goodnes of Fit.....	133
Tabel 5.21 Hasil Pengujian Pengaruh Langsung.....	135
Tabel 5.22 Hasil Pengujian Pengaruh Moderasi.....	135

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Framework technology organization environment (1990)	31
Gambar 2.2 Model Kesuksesan Delone & Mcleane (2002).....	35
Gambar 2.3 Luder Contingency Model .....	40
Gambar 3.1 Kerangka Pikir .....	63
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual .....	68
Gambar 4.1 Kerangka Full Penelitian .....	92
Gambar 5.1 Hasil Model Penelitian .....	133

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menerapkan otonomi daerah yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tata pemerintahan daerah mengalami perubahan yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Berdasarkan undang-undang tersebut, semua kewenangan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah, kecuali enam komponen berikut yang tetap berada di bawah kewenangan pemerintah nasional yaitu kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, administrasi peradilan, kebijakan moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Penerapan otonomi daerah diharapkan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga dapat menjadikan pemerintah daerah semakin mandiri dan tidak bergantung pada sumber dana bantuan pemerintah pusat baik dalam pembiayaan untuk kebutuhan rumah tangga maupun pembangunan daerah. Otonomi daerah juga diharapkan dapat menjadikan pemerintah daerah terbuka dalam membangun dan mengelola dengan baik wilayahnya agar tidak tertinggal daerah lain.

Otonomi daerah sangat terkait erat dengan globalisasi yang telah muncul pada dekade 70-an dan 80-an di Amerika Serikat. Artinya, globalisasi sudah tidak lagi berbicara pada level antar negara namun sudah bergerak ke level yang lebih kecil yakni suatu wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota di sebuah negara. Hal ini memunculkan tantangan yang kompleks, karena era globalisasi yang serba

cepat, terbuka dan luas. Globalisasi saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan memiliki dampak dapat merubah suatu budaya, pikiran maupun sikap seseorang.

Dalam situasi semacam ini, otonomi daerah akan sangat menentukan pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan. Pemerintah daerah diharuskan menyiapkan sistem birokrasi yang efisien dengan mengembangkan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja kelembagaannya, yang tentunya dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas (Kaloh, 2007).

Tantangan di era globalisasi mengharuskan daerah untuk berinovasi sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Inovasi dalam sektor publik menjadi wacana penting di berbagai negara, terutama di negara maju karena dengan adanya inovasi dalam sektor publik dianggap dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah publik (De Vries M, 2013). Pentingnya inovasi dalam sektor publik menjadi kajian menarik di negara-negara maju, mengingat bahwa persaingan dan perkembangan perubahan sosial yang semakin kompleks. Inovasi dalam sektor publik dilakukan melalui penciptaan ide atau gagasan baru terhadap pelayanan publik dan melalui proses adopsi terhadap inovasi yang ada (Borrins, 2014). Inovasi dalam sektor publik berkembang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga diperlukan proses tahapan yang panjang dan diperlukan sikap selektif yang tepat untuk mengadopsi inovasi.

Pavlou dan El Sawy (2006) menemukan bahwa organisasi yang melakukan inovasi dengan berinvestasi pada sistem IT, akan mengarah pada keunggulan kompetitif strategis, sehingga mempengaruhi kinerja organisasi.



Dengan adanya kemajuan teknologi yang dibawa dan dikenalkan dari negara maju, menyebabkan adanya perubahan yang terlihat dari sistem pelayanan yang mulai bergeser menjadi lebih modern (Ramseook et al., 2010). Di beberapa negara berkembang, inovasi dianggap sebagai penggunaan teknologi yang canggih ke dalam administrasi publik (Al-Khouri, 2011). Penerapan teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Garcia-Murillo, 2010; Kock & Gaskin, 2014; Perez et al., 2005).

Inovasi teknologi oleh negara-negara di dunia dalam sektor publik dikenal dengan sebutan *e-government*. Sebagian besar negara saat ini telah mengimplementasikan *e-government* yang memungkinkan mereka meningkatkan efisiensi di sektor publik dan merampingkan sistem pemerintahan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2012). *E-Government* menjadi sarana yang sangat baik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, kontrol, kualitas layanan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Corporate Governance*. *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan akses yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, mitra bisnis dan instansi pemerintah lainnya (Palvia, 2016). Tidak hanya negara maju, negara berkembang tidak dikecualikan dari penerapan *e-government*, dan hal ini didukung oleh beberapa organisasi seperti *the world bank* dan organisasi lain yang memandang *e-government* sebagai alat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan (Schuppan, 2009).

Indonesia yang merupakan negara berkembang juga turut serta dalam mendukung penggunaan teknologi yang ditandai dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-*

*Government*. Berdasarkan UN Government 2016, Indonesia menduduki posisi 116 dalam pengembangan *e-government*. Posisi ini masih berada dibawah beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina yang berada di peringkat 71 dan Thailand yang berada pada peringkat ke-76.

Penerapan *e-government* tidak hanya sebatas situs web lembaga pemerintah tetapi lebih luas sebagai sebuah kesatuan sistem yang terintegrasi antarinstansi di dalam suatu negara. Pengelolaan *e-government* diperlukan untuk menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online.

Pemanfaatan *e-government* menjangkau semua bidang, termasuk dalam dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan terintegrasi sehingga mampu meningkatkan level kepuasan masyarakat dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pada dasarnya *e-Government* mencakup *e-Planning*, *e-Budgeting*, *e-Procurement*, *e-Audit*, *e-Catalog*, *e-Payment*, *e-Controlling* dan beberapa lainnya.

*E-government* ini tidak hanya berjalan di satu-dua instansi, tetapi di seluruh instansi yang ada. Ketika sudah terlaksana, akan hadir sistem yang akurat dan terintegrasi. Di Indonesia sudah ada banyak provinsi maupun kabupaten/kota yang menerapkan *e-Government* walaupun belum seluruhnya.

Beberapa provinsi, kota/daerah di Indonesia yang telah menerapkan diantaranya: Provinsi DKI Jakarta menjadi percontohan daerah lain dalam menerapkan *e-budgeting*. Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang terapkan *e-Government*. Solusi yang dihadirkan di Surabaya mencakup Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD), *e-SDM*, *e-Monitoring*, *e-Education*, *e-*

Permit, e-Office, e-Health, e-Dishub, Media Center, serta Sistem Siaga Bencana. Salah satu contoh implementasi yang berjalan baik adalah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD). Sistem ini menjadi objek vital sebab menyangkut perencanaan dan pengembangan kota dan staf pemerintahan di kota Surabaya. Karena posisinya yang sangat penting, maka di dalamnya pun dilengkapi dengan e-Musrenbang yang disusun untuk mendukung sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bojonegoro merupakan sebuah kabupaten yang juga telah menerapkan *e-government*. Bojonegoro memiliki sistem baku seperti e-Musrenbang, e-Budgeting, e-Planning, e-Procurement, serta e-Monev (monitoring and evaluation).

Penerapan *e-government* di Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabilitas ternyata masih ditemui beberapa fenomena seperti seringkali belum transparannya proses anggaran, masih banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masih rendahnya akuntabilitas publik dan beberapa temuan lainnya sehingga masih menjadi sorotan masyarakat.

Data annual report *Indonesia Corruption Watch* menyebutkan bahwa 77% tersangka korupsi berasal dari pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2017 aparat penegak hukum menindak 102 kepala desa, 37 anggota DPRD dan 30 kepala daerah dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar. Modus korupsi yang paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah penyalahgunaan anggaran. ICW juga memaparkan perihal sektor yang banyak dikorupsi adalah anggaran desa dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar. Sektor kedua yaitu pendidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara sebesar Rp 81,8 miliar. Sementara itu, terkait lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya

korupsi, ICW mencatat jika pemerintah kabupatenlah yang banyak melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Lembaga lainnya adalah pemerintah desa dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar. Ketiga, pemerintah kota dengan kerugian negara Rp 159 miliar. Di lain pihak, terkait provinsi yang paling banyak terdapat kasus korupsi, ICW menyebutkan, jika provinsi yang paling banyak kasus korupsi pada tahun 2017 adalah Jawa timur dengan kerugian negara mencapai Rp 90,2 miliar. Berikutnya, Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan jumlah kasus berturut-turut adalah 42 kasus dan 40 kasus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif serta efisien. Informasi yang diperoleh bahwa pengelolaan keuangan daerah selama ini masih buruk dengan ditemukannya beberapa kasus korupsi. Data KPK pada tahun 2017 menyebutkan bahwa potensi penyimpangan dan kebocoran APBN & APBD masih relatif tinggi, antara 20 hingga 40% atau rata-rata 30% dari total APBN/APBD.

Beberapa penelitian di beberapa daerah Indonesia menunjukkan hasil bahwa masih rendahnya kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Bisma (2010) dalam penelitiannya di Provinsi NTB menemukan bahwa efisiensi pengelolaan APBD pada provinsi menunjukkan hasil yang tidak efisien. Wiranto (2013) dalam penelitiannya di Lampung mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak mengalami kebocoran justru akibat kejahatan korupsi kolektif yang dilakukan eksekutif dan legislatif melalui konspirasi saling menguntungkan.

Permasalahan lainnya terletak pada proses penyusunan anggaran yang memakan waktu lama. Penyusunan anggaran yang memakan waktu sehingga seringkali terjadi keterlambatan proses penyusunan anggaran. Penetapan APBD

harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan terealisasi pada tahun anggaran sehingga pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar (Keuda Kemendagri, Agustus 2013).

Pangalila (2017) melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa mengungkapkan bahwa, proses penyusunan di Kecamatan Sonder belum berjalan tepat waktu, dikarenakan terlambatnya pemasukan rencana kegiatan pemerintah yang dari desa dan terlambatnya penyampaian dari Kabupaten ke Kecamatan sedangkan batas waktu pelaporan yang diberikan hanya singkat, sehingga Penyusunan mengalami keterlambatan penyampaian padahal untuk selanjutnya akan dibuat penjabaran APBD.

Aini (2018) melakukan penelitian di Kabupaten Siak menemukan bahwa apabila proses penyusunan anggaran sudah tidak sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan maka sudah pasti akan membawa efek, berupa terlambatnya pengesahan dan pelaksanaannya. Rendahnya daya serap anggaran merupakan salah satu akibat dari terlambatnya pengesahan anggaran karena kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, hal ini akan berdampak pada rendahnya kinerja SKPD dalam menyelesaikan kegiatan yang telah ditetapkan. Semakin tepat waktu penyusunan anggaran maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas publik juga masih menjadi rendah. Tahun 2016, rata-rata nilai kinerja pemerintah daerah masih C atau masih kurang. Rata-rata nilai pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada 2016 hanya 49,87. Sebanyak 425 pemerintah daerah, atau 83 persen kabupaten dan kota kinerjanya masih masuk kategori nilai C. Tahun 2017, Pemda yang meraih predikat B tercatat 19 provinsi

dan 139 kabupaten/kota, 5 provinsi dan 312 kabupaten/kota yang berpredikat CC kebawah.

Selain akuntabilitas publik, transparansi juga masih menjadi sorotan publik. *Transparency International* menyimpulkan belum ada banyak perkembangan dari negara-negara di dunia untuk mengakhiri korupsi. Indeks persepsi korupsi dari *Transparency International* menggunakan skala 0-100 dengan memuat memuat 180 negara. Nilai 0 artinya paling korup, sedangkan nilai 100 berarti paling bersih. Indeks menunjukkan dua pertiga negara memiliki skor di bawah 50. Rata-rata nilainya hanya 43. Negara yang paling bersih ditempati oleh Selandia Baru (89), Denmark (88), Finlandia (85), Norwegia (85), Swiss (85). Negara Paling Korup ditempati Somalia (9), Sudan Selatan (12), Suriah (14), Afghanistan (15), Yaman (16). Indonesia memiliki skor 37.

Fenomena - fenomena yang terjadi menggambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah masih rendah walaupun inovasi teknologi telah dilakukan. Fleischer et al (1990) mengungkapkan sebuah teori yang disebut dengan teori *Technology Organization Environment (TOE)* yang menyatakan bahwa dalam berinovasi teknologi dipengaruhi oleh konteks teknologi, konteks organisasi, dan konteks lingkungan. Teori TOE merupakan teori yang sering digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan penggunaan berbagai teknologi. Konteks teknologi mencakup teknologi internal dan eksternal yang relevan dengan perusahaan. Teknologi dapat mencakup peralatan maupun proses. Konteks organisasi mengacu pada karakteristik dan sumber daya perusahaan, termasuk ukuran perusahaan, tingkat sentralisasi, tingkat formalisasi, struktur manajerial, sumber daya manusia, jumlah sumber daya yang kendur, dan hubungan di antara karyawan. Konteks lingkungan mencakup ukuran dan struktur

industri, pesaing perusahaan, konteks ekonomi makro, dan lingkungan peraturan. Tiga elemen ini menghadirkan kendala maupun peluang untuk inovasi teknologi. Dengan demikian, ketiga elemen ini mempengaruhi cara organisasi melihat kebutuhan, mencari, dan mengadopsi teknologi baru.

Adopsi teknologi baru tidak selamanya berhasil digunakan. Tantangan penting yang dihadapi e-government adalah penggunaan sistem tidak selalu bertahan dan investasi sering terbuang (Zhang et al., 2010). Temuan ini didukung oleh penelitian internasional yang telah menyoroti bahwa sekitar 70 sampai 80 persen implementasi e-government telah gagal memberikan hasil yang diharapkan (Heeks dan Stanforth 2007).

Keberhasilan implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh faktor kompleks. Kegagalan implementasi suatu sistem umumnya terjadi karena sistem tidak sesuai dengan proses bisnis dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi (Janson, 2006). Kegagalan-kegagalan dalam implementasi sebuah sistem informasi juga dikemukakan oleh Jogiyanto (2007) yang dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu 1) aspek teknis yang menyangkut sistem itu sendiri yang merupakan kualitas teknis sistem informasi. Kualitas teknis yang buruk menyangkut masih banyaknya kesalahan-kesalahan sintak, kesalahan-kesalahan logik, dan bahan kesalahan-kesalahan informasi. 2) Aspek non teknis yang berkaitan dengan persepsi pengguna sistem informasi yang telah dikembangkan. Persepsi pengguna terkait dengan perilaku pengguna.

Choi, et al (2014) menyatakan implementasi *e-government* banyak dihadapkan pada tantangan karena sifatnya yang kompleks dan adanya berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa *e-government* dapat dilaksanakan dengan tepat melalui pertimbangan cermat.

Efektivitas sistem bergantung pada banyak faktor seperti lingkungan organisasi dan sistem informasi (Henver, at al, 2004).

Dalam pengadopsian teknologi baru, diperlukan pengukuran keberhasilan sistem jika harus digunakan sebagai wahana untuk menyampaikan hasil pemerintah. Indra Bastian (2010) menemukan banyak sistem informasi akuntansi yang gagal dibangun sehingga tidak menghasilkan informasi yang berkualitas. Ada beberapa model penilaian keberhasilan atau kesuksesan sistem informasi dengan menggunakan kepuasan atau penerimaan sebagai tolok ukur, diantaranya adalah model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean. Model DeLone dan McLean yang diperbarui (2003) digunakan untuk melihat keberhasilan sistem dari sisi kepuasan pengguna (*user satisfaction*). Faktor-faktor kesuksesan sistem informasi menurut model Delone dan Mclean terdiri dari beberapa dimensi dan aspek-aspek yang menghasilkan keuntungan-keuntungan bersih dari sistem informasi yang meliputi kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas pelayanan (*service quality*), pengguna sistem (*system use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), dan keuntungan-keuntungan bersih (*net benefits*). Sejak dikenalkan tahun 1992 dan diperbaharui tahun 2003, model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh Delone & Mclean telah banyak diterapkan di beberapa penelitian untuk menjelaskan kesuksesan dari suatu sistem informasi.

Penggunaan teknologi informasi dianggap sukses ketika memberikan dampak yang positif untuk individu maupun organisasi dan gagal ketika tidak memberikan dampak positif pada individu maupun organisasi. Dalam kaitannya dengan proses anggaran publik, individu dapat diartikan sebagai aspek manusia yang berada dibalik proses anggaran dimana teknologi diharapkan mampu



berinteraksi dengan pelaku tersebut sehingga berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam bidang teknologi informasi. (Sirsat,2016; Sterrenberg et al,2016; Sari et al, 2016; Pratiwi, 2016; Seyal, 2015), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan prediktor yang signifikan terhadap pengguna teknologi. (Al Mamary, et al 2014; Ghanem & Sulaiman,2016) dalam penelitiannya menghubungkan antara teknologi dengan kinerja dan hasilnya berdampak signifikan. Perez (2005) juga mengungkapkan bahwa teknologi bisa meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi keuangan di pemerintahan. Hasil yang berbeda diteliti oleh (Ou, 2016; Livari 2005; Marble,2003) penggunaan teknologi tidak signifikan terhadap kinerja.

Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat terjadi karena cara pengolahan organisasi yang berbeda di setiap organisasi. Setiap Negara atau organisasi memiliki pengelolaan organisasi pemerintah dengan ciri khas sendiri. Pendekatan dalam memandang desain struktur organisasi pemerintah telah diformalisasikan dengan pendekatan teori kontingensi. Teori kontingensi mengungkapkan bahwa tidak ada cara yang sama dalam mengolah sebuah organisasi.

Teori kontingensi dikembangkan dari segi sosiologis teori fungsionalis struktur organisasi sebagai pendekatan struktural untuk studi organisasi. Teori ini mengklaim bahwa tidak ada cara yang sama untuk mengatur dan memimpin, atau membuat keputusan organisasi. Efektivitas pengelolaan organisasi tergantung pada kecocokan antara jenis teknologi, lingkungan, dan organisasi (Otley, 1980).

Gareth Morgan (2007) menggambarkan gagasan utama yang menjadi dasar kontingensi: 1) Organisasi adalah sistem terbuka yang membutuhkan manajemen hati-hati untuk menyeimbangkan kebutuhan internal dan untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan, 2) Tidak ada cara pengorganisasian terbaik. Bentuk yang tepat tergantung pada jenis tugas atau lingkungan yang sedang dihadapi, 3) Manajemen harus diperhatikan, terutama, dengan mencapai keselarasan dan kecocokan yang baik, 4) Jenis organisasi yang berbeda dibutuhkan di berbagai jenis lingkungan.

Penelitian-penelitian terkait teori kontingensi berkembang dalam berbagai bidang. Fred Fiedler (1964) mengembangkan model kontingensi yang berfokus pada model kepemimpinan kontingensi dalam organisasi. Model ini berisi hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi yang menguntungkan. Kefasihan situasional digambarkan oleh Fiedler dalam tiga dimensi yang diturunkan secara empiris: 1) Hubungan pemimpin-anggota - tinggi jika pemimpin umumnya diterima dan dihormati oleh para pengikutnya, 2) Tingkat struktur tugas - tinggi jika tugasnya sangat terstruktur, 3) Kekuatan posisi pemimpin - tinggi jika banyak wewenang dan kekuasaan secara formal dikaitkan dengan posisi pemimpin. Situasi menguntungkan bagi pemimpin jika ketiga dimensi ini tinggi.

Dalam bidang akuntansi, model kontingensi digunakan sebagai kerangka untuk memahami variabel-variabel kontingensi yang menjelaskan mengapa dan bagaimana akuntansi telah berubah dan bagaimana faktor-faktor yang berbeda mempengaruhi perubahan akuntansi dengan berbagai cara yang berbeda (Waweru et al 2004, Otley;1980). Dalam akuntansi manajemen, Otley (1980) mengungkapkan bahwa pendekatan akuntansi manajemen yang didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen secara universal selalu tepat

digunakan seluruh organisasi, namun sistem akuntansi manajemen hanya sesuai (fit) untuk suatu konteks atau kondisi tertentu saja. Penggunaan teori kontingensi dalam pengembangan sistem akuntansi manajemen akan tergantung pada lingkungan, organisasi dan gaya pembuat keputusan (Gordon dan Miller, 1976).

Dalam akuntansi pemerintahan, munculnya teori kontingensi berawal dari adanya keinginan untuk melakukan suatu reformasi terhadap sistem akuntansi pemerintahan dari sistem akuntansi tradisional menjadi sistem akuntansi yang lebih informatif. Sistem yang lebih informatif akan tertuju pada pasokan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan serta menyediakan dasar untuk kontrol keuangan pada kegiatan pemerintah.

Dalam memahami perubahan di sektor publik, Luder (1992) mengembangkan sebuah model yang dikenal dengan *Luder's Contingensi Model*. Luder mengungkapkan bahwa perbedaan dalam sistem akuntansi pemerintah dapat dijelaskan dengan melihat lingkungan di mana sistem beroperasi. Luder mencoba menjelaskan transisi dari akuntansi pemerintah tradisional ke sistem yang lebih informatif melalui interaksi berbagai faktor sosial, politik dan administratif termasuk penerapannya. Luder menegaskan bahwa inovasi akuntansi pemerintah dapat terjadi, mengingat rangsangan yang tepat dan faktor lingkungan yang kondusif (Luder, 1994).

*Luder's Contingensi Model* dikembangkan lebih lanjut oleh Chan, Jones dan Luder (1996) dimana kerangka tersebut menekankan tiga faktor penting yang mempengaruhi hasil proses inovasi, yaitu: harapan dan perilaku masyarakat umum sebagai pengguna informasi, harapan dan perilaku aktor politik sebagai pengguna sekaligus produsen informasi, perilaku pelaku administrasi sebagai

produsen informasi. Harapan masyarakat mempengaruhi variabel struktur sosial, seperti budaya sosial. Harapan dan perilaku politik akan mempengaruhi variabel struktur politik seperti budaya politik dan persaingan politik. Variabel perilaku administratif mempengaruhi struktur administrasi, seperti budaya administrasi, sistem pembentukan staf, dan organisasi penetapan standar.

Aspek manusia yang diungkapkan oleh Luder et al sebagai faktor kontingen dalam sektor publik seperti masyarakat, anggota legislatif dan staff pemerintah memiliki budayanya masing-masing dalam memandang proses anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Budaya tersebut terbentuk dari lingkungan dimana mereka berada.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang merupakan sebuah sistem yang tegak atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya yaitu; kebebasan dan kesederajatan. Kebebasan disini otomatis berarti kebebasan yang bertanggungjawab serta dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan maksudnya adalah kesamaan dalam hukum, ekonomi, sosial dan politik.

Masyarakat menjadi penilai utama dalam proses anggaran. Perilaku masyarakat di Indonesia terkait dengan budaya demokrasi yang telah diterapkan, seperti pemilihan langsung kepala daerah melalui tahapan pemilu, dimana masyarakat bebas untuk menyalurkan suaranya kepada calon yang menurut mereka telah dapat merepresentasikan harapan dan keinginan mereka atau sama

sekali tidak memberikan suaranya adalah merupakan bukti konkrit suatu karakter demokrasi yang secara kontinyu terbangun di negara ini.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk forum antar pemangku kepentingan atau forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran juga dapat melalui *public hearing*. *Public hearing* merupakan salah satu sikap responsif legislatif (DPR/DPRD) dan eksekutif terhadap semangat perubahan dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam agenda reformasi dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang di dalamnya menempatkan partisipasi masyarakat (publik) menjadi ujung tombak dari perubahan itu. Melalui partisipasi diharapkan terjadinya perubahan hubungan antara rakyat dan negara yang lebih seimbang, yang dalam konteks ini lebih dibuka dan difasilitasi ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan nasib dan kepentingan mereka, terutama dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Keterlibatan lainnya yaitu pengawasan anggaran, hal ini dapat dimaknakan bahwa pengawasan anggaran menjadi perhatian yang penting dalam masyarakat. Saat ini telah banyak masyarakat yang tergabung dalam sebuah lembaga

swadaya masyarakat (LSM) yang *concern* dalam mengawasi kinerja pemerintah. Pada hakikatnya APBD dapat dikatakan sebagai anggaran untuk sektor publik yang merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, maka secara otomatis publik mempunyai hak dan wajib mengawasi pelaksanaan APBD. Dengan ikut dalam pengawasan publik terhadap pelaksanaan APBD, maka masyarakat dapat mengetahui konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dengan realisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Melalui pengawasan masyarakat juga dapat memastikan bahwa alokasi anggaran untuk kepentingan publik sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif, dalam hal ini pelaksanaan APBD tersebut tidak terjadi pemborosan, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang positif serta manfaat yang berarti bagi kepentingan publik.

Perumusan pelaksanaan pembangunan secara bersama-sama yang melibatkan partisipasi publik akan membentuk suatu nilai untuk menentukan mana yang baik dan buruk, benar atau salah yang akan menjadi perilaku di masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Selanjutnya perilaku ini akan menjadi budaya sosial.

Budaya sosial terbentuk dari suatu perilaku yang dibentuk oleh lingkungan (Berman, 2013). Perilaku sosial seperti kebebasan berpendapat, hak politik, persepsi korupsi, pembangunan manusia, hak asasi manusia, dll yang akan membentuk sebuah budaya sosial yang ada di masyarakat (Bersth, 2013). Budiarjo (2008) mengungkapkan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Namun, fakta yang terjadi bahwa ada beberapa hal yang menjadi keluhan masyarakat tentang pola Musrenbang, seperti desa atau kelurahan tidak memiliki asa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan nantinya, dan

banyaknya usulan sekedar memenuhi daftar program yang diajukan, tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi (Gedeona, 2014). Keterlibatan masyarakat masih sangat kurang dan terkadang didominasi wajah yang sama dari tahun ke tahun. Akibatnya, perencanaan program tidak mendapat masukan gagasan variatif. Keberadaan unsur masyarakat dalam Musrenbang seringkali tidak terwakili dengan baik, seringkali keputusan yang dihasilkan dalam Musrenbang tidak benar-benar menggambarkan kepentingan masyarakat. (Napitupulu 2015).

Pengawasan masyarakat dalam proses anggaran juga masih rendah. Paradenti (2017) mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan anggaran menunjukkan masih sangat kurang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pengawasan. Tujuan pengawasan anggaran merupakan alat kontrol dalam mencegah timbulnya kebocoran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan.

Solihah (2017) mengungkapkan bahwa mekanisme dan teknik memberikan masukan dan mengakomodasi masukan masyarakat masih belum diketahui secara luas, baik meliputi implementasi metode-metode partisipatif dalam merancang maupun dalam memutuskan sebuah kebijakan bersama eksekutif. Selain itu, hasil *public hearing* masih dirasakan belum memuaskan masyarakat/publik. Berdasarkan kajian melalui studi literatur dan dokumentasi, dapat ditunjukkan bahwa ruang-ruang partisipasi formal yang

tersedia di DPR/DPRD berada pada tingkat konsultasi, di mana dalam ruang-ruang itu terjadi komunikasi dua arah antara publik dengan anggota DPR/DPRD. Tetapi seringkali ruang-ruang tersebut dijadikan sekedar alat melegitimasi pokok-pokok pikiran dan RUU/Raperda yang sudah disusun DPR/DPRD. Bila dipahami dengan cara pandang seperti ini, maka secara substansial ruang-ruang partisipasi formal yang disediakan DPR/DPRD tersebut turun pangkat pada tingkat therapy dimana yang terjadi sebetulnya adalah semacam sosialisasi atau pengarahan dari DPR/DPRD kepada publik. Sebaliknya pada ruang partisipasi publik informal, dapat dilihat bahwa tinggi rendahnya partisipasi publik ditentukan sendiri oleh masyarakat/publik. Ruang partisipasi publik informal yang dibentuk kelompok masyarakat berada pada tingkat plakasi, dimana komunikasi sudah meningkat pada tahap negosiasi; tetapi otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan badan legislatif (DPR/DPRD).

Nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam memandang pentingnya keikutsertaan dalam proses anggaran membentuk budaya sosial. Budaya sosial pada masyarakat diharapkan akan mempengaruhi kinerja pemerintah (Salim 2017; Berman, 2013; Rafie, 2012; Upping 2011; Gomes et al. 2010; Ralston et al. 2008). Namun, tidak semua budaya sosial relevan atau bermanfaat bagi kinerja pemerintah (Alba dan Navarro 2011; Kim 2008; Noordegraaf dan Vermeulen 2010).

Penilai kedua dalam proses anggaran yaitu anggota legislatif dimana anggota legislatif merupakan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Anggota legislatif tidak terlepas dari politik. Politik dapat menjadi penengah antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah sistem untuk mengola organisasi.



Politik juga dapat mempengaruhi akuntansi pemerintahan. Peran politik sangat berpengaruh kuat terhadap proses penganggaran (Luders; 1992).

Dimensi politik adalah arena dimana DPRD, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memainkan peran mereka dalam proses anggaran. Peran legislatif adalah memastikan bahwa hak anggaran berjalan dengan baik dan aspirasi masyarakat telah dipenuhi ke dalam anggaran saat ini. Peran legislatif yang tepat cenderung menghindari penyalahgunaan anggaran. DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi, yaitu : (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja eksekutif).

Mekanisme proses anggaran legislatif daerah yaitu menetapkan arahan kebijakan dan anggaran umum bersamaan dengan kebijakan untuk prioritas anggaran dan plafon sebelum anggaran dimulai. Setelah selesai menyusun draf anggaran, pemerintah akan menyerahkan draf anggaran yang nantinya menjadi usulan anggaran. Sebelum mendapatkan persetujuan anggaran, legislatif harus melakukan waktu istirahat. Pada masa reses, legislatif akan mengumpulkan informasi mengenai aspirasi penyusunan perencanaan anggaran. Setelah waktu istirahat, legislatif akan berdebat tentang isi anggaran. Hal ini menjadi sulit, karena informasi yang dikumpulkan sebagian besar adalah daftar keinginan dan juga menggabungkan kepentingan pribadi legislatif untuk tujuan politik. Dalam proses anggaran, politisi terpilih yang memiliki kursi di legislatif berusaha memaksimalkan alokasi anggaran untuk kepentingan konstituen. Selain itu, lembaga politik memainkan peran penting untuk mempromosikan kepentingan partai politik dengan berjuang membuat perautran alokasi anggaran yang mendukung aspirasi penyusun sehingga menarik mereka untuk periode berikutnya (Harryanto, 2017).

DPRD juga memiliki fungsi pengawasan, Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Perilaku-perilaku pada anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya membentuk suatu budaya politik. Peningkatan kinerja anggota legislatif dapat meningkat, jika di dalam dirinya terbentuk suatu kesadaran untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dengan kesadaran tersebut anggota legislatif akan membentuk budaya politik yang lebih bekerja lebih optimal yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja pemerintah (Katzman, 2015; Upping, 2011; Zakaria, 2011). Namun, pendapat berbeda oleh beberapa peneliti yang mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh antara budaya politik dan kinerja pemerintah (Healy, 2010).

Penilai ketiga dalam proses anggaran yaitu birokrasi atau staff SKPD. Perilaku dalam menaati pedoman dalam aturan pemerintah membentuk budaya administratif yang menjadi nilai yang melekat pada penyelenggara negara dalam melakukan fungsinya. Budaya administrasi akan mempengaruhi kinerja pemerintah (Upping, 2011; Alba, 2011; Zakaria (2011); Andersen, 2009; Ahn et al, 2011).

Kepala daerah merupakan salah satu staf negara yang dapat membentuk budaya administratif. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD

menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini, kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dengan pendekatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Pejabat pengelola keuangan daerah mengelola keuangan daerah, yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD, dan menyusun perubahan APBD, mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban APBD.

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD yang dilakukan oleh kepala daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Raperda APBD yang disetujui atau tidak disetujui oleh DPRD.

APBD di susun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan supaya mendapat sasaran yang ditetapkan antara

lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penyusunan dan realisasi APBD menjadi sorotan utama oleh masyarakat dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah masing-masing.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan salah satu model yaitu model kesuksesan sistem teknologi informasi delone & mcleane ataupun *Luder's contingency model* sedangkan penelitian ini mengintegrasikan kedua model tersebut menjadi sebuah model penelitian. Penelitian ini memasukkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam melihat apakah variabel ini mampu berinteraksi bersama aspek manusia yang ada di balik proses anggaran seperti masyarakat, anggota DPRD, staff SKPD, dimana ketiga pelaku tersebut memiliki budayanya masing-masing dalam proses anggaran. Budaya tersebut tergambarkan pada budaya sosial yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, budaya yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada di anggota DPRD dan budaya administratif yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada di staff SKPD. Hasil interaksi tersebut akan menghasilkan dampak dalam memperkuat atau memperlemah kinerja pemerintah daerah pada penganggaran publik. Hal ini didasari atas beberapa temuan yang mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi tidak selamanya berhasil. Efektivitas sistem bergantung pada banyak faktor seperti sistem informasi, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi menghasilkan suatu budaya dalam suatu tempat dan memiliki cara yang berbeda dalam mengolah organisasinya, hal ini sejalan dengan teori kontingensi yang mengungkapkan bahwa tidak ada cara yang sama dalam mengolah sebuah organisasi. Dari penjelasan sebelumnya, menjadikan dasar peneliti menggunakan faktor kontingen yang diadopsi dari

*Luder's contingency model* yang mengungkapkan bahwa dalam melihat organisasi pemerintah ditentukan oleh budaya sosial, budaya politik dan budaya administratif.

Motivasi penelitian ini yaitu melihat fenomena kinerja pemerintah daerah dimana terdapat beberapa temuan masih rendahnya kinerja pemerintah daerah dengan banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran yang berdampak pada masih rendahnya kesejahteraan rakyat. Pengelolaan anggaran menjadi hal yang penting yang dapat dipergunakan untuk menjalankan program atau kegiatan yang telah dibuat secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam perencanaan anggaran hingga penetapan anggaran tidak lepas dari tiga faktor yang diungkapkan oleh Luder's yaitu masyarakat sebagai konsumen informasi, legislatif sebagai konsumen sekaligus produsen informasi, dan administratif sebagai produsen informasi. Ketiga pelaku ini menghasilkan suatu budaya tersendiri dalam proses pemerintahan suatu negara. Tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik dan transparansi di dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi isu yang belum terselesaikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dengan menerapkan *e-government* terkhusus dalam pengelolaan anggaran yaitu *e-planning* dan *e-budgeting*. Namun, penggunaan *e-government* di beberapa Negara tidak selamanya berhasil. Oleh karena itu, peneliti mencoba memasukkan teknologi informasi dalam hal ini penggunaan *e-government* khususnya *e-planning* dan *e-budgeting* yang telah diterapkan dalam penganggaran publik di beberapa daerah sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah penerapan teknologi informasi ini mampu memperkuat atau memperlemah kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang masalah, maka terdapat beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah budaya sosial pada proses penganggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.
2. Apakah budaya politik pada proses penganggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.
3. Apakah budaya administratif pada proses penganggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.
4. Apakah teknologi informasi mampu memperkuat hubungan antara budaya sosial pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.
5. Apakah teknologi informasi mampu memperkuat hubungan antara budaya politik pada proses penganggaran publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.
6. Apakah teknologi informasi mampu memperkuat hubungan antara budaya administratif pada proses penganggaran publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh budaya sosial pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

2. Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh budaya politik pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.
3. Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh budaya administratif pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.
4. Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh moderasi teknologi informasi antara budaya sosial pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.
5. Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh moderasi teknologi informasi antara budaya politik pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.
6. Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh moderasi teknologi informasi antara budaya administratif pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait penggunaan teknologi informasi dalam penganggaran publik. Serta pengembangan teori kontingensi dan teori kesuksesan sistem informasi dalam kaitannya dengan kinerja pemerintah.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan *e-government* khususnya terkait penganggaran publik dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan *e-government* yang saat ini masih perlu dukungan dengan pelatihan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur yang baik serta strategi pemasaran *e-government* yang tidak cukup hanya melalui tampilan website yang menarik. Tapi dibutuhkan juga suatu forum diskusi online, penyuluhan dan pelatihan ke masyarakat perdesaan yang notabene belum mengetahui adanya internet dan belum mengenal *e-government*. Selain masyarakat, sosialisasi dan pelatihan untuk anggota DPRD dan staff SKPD juga perlu diberikan. Dengan demikian masyarakat, anggota DPRD dan staff SKPD akan terbiasa menggunakan teknologi informasi sehingga menjadi suatu nilai yang baik dan menghasilkan budaya yang bisa meningkatkan kinerja pemerintah.

#### 1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyesuaian kebijakan dan penganggaran yang dinamis dan cepat, serta kemauan untuk saling terhubung antara satu layanan dengan layanan yang lain, sehingga informasi semakin hari akan semakin bertambah. Hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan stakeholders akan bertambah harmonis sehingga akan tercipta *good governance*.



### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menguji dan memverifikasi dampak budaya dan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam proses anggaran publik tidak lepas dari budaya yang terbentuk dalam masyarakat, politik dan administratif. Dalam perjalanan perencanaan anggaran hingga penetapan anggaran, hal yang biasa terjadi adalah timbulnya penyimpangan penyalahgunaan anggaran yang mengindikasikan bahwa masih rendahnya akuntabilitas publik dan transparansi. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah terkait akuntabilitas publik dan transparansi digunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat berinteraksi dengan aspek manusia dibalik proses anggaran.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I. Merupakan bab pendahuluan yang menjabarkan latar belakang yang menjelaskan fenomena dan ide penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut ditentukan masalah, tujuan, kegunaan dan ruang lingkup penelitian.
- BAB II. Merupakan bab tinjauan pustaka yang menjelaskan dengan detail landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab tinjauan pustaka ini memuat tinjauan teori dan konsep serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu.
- BAB III. Merupakan gambaran kerangka konseptual dan hipotesis penelitian yang akan diuji pada bab-bab selanjutnya.

BAB IV. Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu: 1) Rancangan Penelitian, 2) Situs dan waktu penelitian, 3) Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, 4) jenis dan sumber data, 5) Metode pengumpulan data, 6) Variabel penelitian dan definisi operasional, 7) Teknik analisis data.

BAB V. Merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian

BAB VI. Merupakan bab yang membahas hasil penelitian yaitu hipotesis yang telah diuji dan disertai argument pendukung

BAB VII. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran kepada pihak terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 TINJAUAN TEORI DAN KONSEP

##### 2.1.1 Technology-Organization-Environment Theory

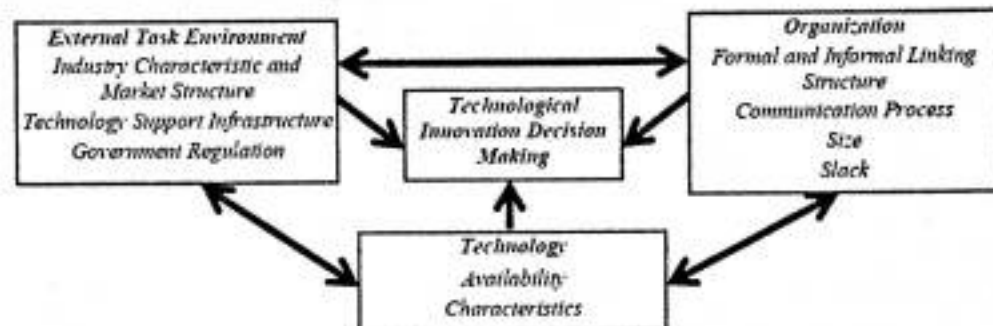
*Technology organization environment (TOE) theory* yang diperkenalkan oleh Tomatzky dan Fleicher (1990). Teori ini menyatakan bahwa inovasi bergantung pada kondisi organisasi, lingkungan industri, dan perkembangan teknologi. Pada dasarnya, model *technology organization environment (TOE)* menggabungkan skema dari karakteristik teknologi, faktor organisasi, dan unsur-unsur lingkungan makro .

TOE mengidentifikasi ada tiga konteks yang mempengaruhi pengadopsian dan pengimplementasian inovasi perusahaan, yaitu: konteks teknologi, menggambarkan bahwa adopsi tergantung dari teknologi baik dari luar maupun dari dalam perusahaan seperti *compability* (baik teknis dan organisasi), *complexity, triability* (uji coba/eksperimen), dan *observation* (visibilitas/imajinasi); konteks organisasi, menggambarkan ruang lingkup bisnis perusahaan, dukungan manajemen puncak, budaya organisasi, kompleksitas struktur manajerial diukur dari sentralisasi, formalisasi, deferensiasi, kualitas sumber daya manusia, dan ukuran masalah; konteks lingkungan berhubungan dengan fasilitas dan faktor-faktor penghambat operasi perusahaan seperti tekanan kompetitor, *customer*, isu-isu sosial budaya, dorongan pemerintah, dan infrastruktur teknologi seperti layanan konsultasi melalui ICT.

Dalam konteks *human capital*, penggunaan sistem kepegawaian yang rumit, seperti sistem penerimaan pegawai yang komprehensif untuk memperoleh

calon yang terbaik tidak berdampak signifikan terhadap kinerja (Hofstede, 1978). Selain itu, karena tenaga kerja dianggap sebagai komoditas, pelatihan untuk pegawai baru jarang dilaksanakan karena dianggap tidak terlalu bermanfaat. Oleh karena itu, kapitalisasi kemampuan manusia ditujukan untuk memperbaiki kekurangan keterampilan pegawai, bukan sebagai metode untuk mendorong keunggulan kinerja. Kinerja dapat meningkat apabila keterampilan tenaga kerja juga meningkat, seperti merekrut tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki pengalaman teknis dan manajerial yang baik. Sehingga kapitalisasi tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ini menunjukkan bahwa *human capital* memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Shankar et al. (2010) menyatakan bahwa tekanan kompetitif merupakan faktor lebih lanjut dalam pengadopsian inovasi. Tekanan eksternal dilihat dari konsumen, misalnya, dapat menyebabkan perusahaan terdorong untuk mengadopsi suatu inovasi bahkan ketika belum terlihat banyak keuntungan untuk adopsi inovasi teknologi tersebut. Tekanan kompetitif dapat menyebabkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka dengan situasi baru (Grant, 2003), terutama ketika terlibat dalam sektor di mana ada persaingan sengit dan ketidakpastian yang berkaitan dengan apa yang dilakukan kompetitor (Pavlou & El Sawy, 2010).

Konteks teknologi mengacu pada teknologi internal dan eksternal, termasuk peralatan dan proses. Adopsi teknologi yang tepat oleh organisasi akan meningkatkan efektivitas layanan organisasi dan berdampak pada kinerja perusahaan. Dalam rangka untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan, perlu adanya adopsi teknologi yang relevan dan menciptakan infrastruktur serta memobilisasi sumber daya manusia yang kompeten (Barnes & Hinton, 2012).



Gambar 2.1 Framework technology organization environment (1990)

### 2.1.2 Model Kesuksesan Sistem Informasi *Delone & Mclean*

Pada zaman modern saat ini, perusahaan di seluruh dunia melakukan transaksi bisnis dengan sangat cepat. Pertumbuhan bisnis yang sangat cepat tersebut menimbulkan kompleksitas bisnis yang tentunya akan menghambat proses transaksi bisnis yang akan dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan sistem teknologi informasi (TI). Sistem teknologi yang canggih tersebut digunakan untuk mempercepat transaksi bisnis agar mampu diolah secara cepat, tepat, dan efisien. Dengan hadirnya terobosan sistem teknologi informasi di lingkungan perusahaan, telah memberikan begitu banyak pengaruh terhadap sebuah organisasi, bukan hanya organisasi namun pengaruh tersebut meluas hingga proses bisnis dan transaksi organisasi. Pertanyaannya saat ini apakah semua sistem teknologi informasi yang diterapkan pada organisasi dapat dikategorikan sukses?. Lalu bagaimana organisasi dapat mengetahui kesuksesan sistem teknologi informasi yang diterapkan dan bagaimana membuat sistem teknologi informasi menjadi sukses. Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dilakukan penelitian selama puluhan tahun yang lalu yang dinamakan model *Information System Success (IS Success)*.

Dasar pemikiran DeLone dan McLean dalam membuat Model *IS Success* adalah 3 level informasi yang diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver (1949) yaitu teknis, semantik dan efektivitas atau pengaruh. Serta pengembangan level atas efektivitas atau pengaruh yang diperkenalkan oleh Mason (1978) yaitu Produksi, Produk, Penerimaan, Pengaruh atas Penerimaan, dan Pengaruh atas Sistem. Dan hasilnya kemudian dijabarkan dalam model yang terdiri dari 6 dimensi variabel. Keenam dimensi tersebut antara lain: *System Quality*, *Information Quality*, *Use*, *User Satisfaction*, *Individual Impact* dan *Organizational Impact*.

Dalam model D & M *IS Success* (1992), *System Quality* mengukur kualitas dari sistem informasi tersebut, *Information System* mengukur kualitas dari output yang dihasilkan suatu sistem informasi, *Use* mengukur konsumsi dari penggunaan suatu sistem informasi, *User Satisfaction* mengukur respon dari user dalam menggunakan output dari sistem informasi, *Individual Impact* mengukur efek dari sistem informasi pada perilaku *user* dan *Organizational Impact* mengukur efek dari suatu sistem informasi pada kinerja organisasi.

Pembuatan dari model kesuksesan sistem informasi D & M (*D & M Information Success Model*) dipicu oleh suatu proses pembuatan informasi dan dampak dari penggunaan sistem informasinya. DeLone dan McLean mendasarkan modelnya pada model proses yang terdiri dari tiga komponen proses, yaitu: pembuatan dan penggunaan sistem informasi serta konsekuensi atau dampak dari suatu penggunaan sistem. Masing-masing dari proses-proses ini diperlukan (*necessary*), tetapi masih belum cukup (*not sufficient*) untuk suatu kondisi supaya dapat memberikan hasil (*outcome*).

Model DeLone dan McLean ini didasarkan pada proses dan hubungan kausal dari dimensi-dimensi di model. Artinya, model ini tidak mengukur keenam

dimensi pengukuran kesuksesan sistem informasi secara independen tetapi mengukurnya secara keseluruhan satu mempengaruhi yang lainnya. Model proses dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa proses, yaitu satu proses mengikuti proses yang lainnya. Sedangkan model kausal (*model causal*) atau disebut juga dengan model varian (*variance model*) berusaha untuk menjelaskan kovarian (*covariance*) dari elemen-elemen model untuk menentukan apakah variansi dari satu elemen dapat dijelaskan oleh variansi dari elemen-elemen lainnya. Dengan kata lain, model varian ini digunakan untuk menentukan apakah terjadi hubungan kausal diantara variabel tersebut dan bagaimana arah hubungan satu elemen dengan elemen lain, apakah menyebabkan lebih besar (mempunyai pengaruh positif) atau lebih kecil (mempunyai pengaruh negatif).

Dalam Model DeLone dan McLean masing-masing dimensi mempunyai 9 hubungan dari keenam variabel tersebut antara lain: *Information Quality* dan *System Quality* secara simultan dan parsial mempengaruhi *Use* dan *User Satisfaction*. *Use* mempengaruhi *User Satisfaction* secara positif atau negatif, begitu juga sebaliknya, *Use* dan *User Satisfaction* mempengaruhi *Individual Impact* dan pada akhirnya *Individual Impact* mempengaruhi *Organizational Impact*.

Model yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean tersebut mendapat respon dari peneliti lain. Mereka tertarik akan konsep yang dibuat oleh DeLone dan McLean tersebut dan berusaha untuk mengembangkan hasil penelitian tersebut lebih jauh, apakah dengan menambah variabel atau meresifikasi model tersebut. Banyak pro dan kontra mengenai hasil penelitian ini baik model maupun hasil penelitiannya karena penelitian yang dilakukan tidak diuji secara empiris sehingga dilakukan spesifikasi ulang.

Model yang dispesifikasi ulang ini tetap mempertahankan fitur-fitur di model DeLone dan McLean. Hal-hal yang diperbarui ini adalah sebagai berikut ini: pertama, menambah dimensi kualitas pelayanan (*service quality*) sebagai tambahan dari dimensi-dimensi kualitas yang sudah ada, yaitu kualitas sistem (*system quality*) dan kualitas informasi (*information quality*). Kedua, Menggabungkan dampak individual (*individual impact*) dan dampak organisasional (*organizational impact*) menjadi satu variabel yaitu manfaat-manfaat bersih (*net benefits*). Alasan terjadinya penggabungan adalah dampak dari sistem informasi yang dipandang sudah meningkat tidak hanya dampaknya pada pemakai individual dan organisasi saja, tetapi dampaknya sudah ke grup pemakai, ke antar organisasi, konsumen, pemasok, sosial bahkan ke negara. Tujuan penggabungan ini adalah untuk menjaga model tetap sederhana (*parsimony*).

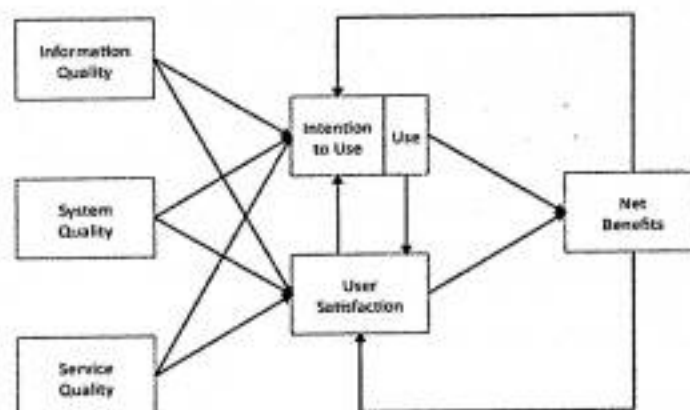
Ketiga, Menambahkan dimensi minat memakai (*intention to use*) sebagai alternatif dari dimensi pemakaian (*use*). DeLone dan McLean mengusulkan pengukuran alternatif, yaitu minat memakai (*intention to use*). Minat memakai adalah suatu sikap (*attitude*), sedangkan pemakaian (*use*) adalah suatu perilaku (*behavior*). DeLone dan McLean juga berargumentasi dengan mengganti pemakaian (*use*) memecahkan masalah yang dikritik oleh Seddon tahun 1997 tentang model proses lawan model kausal.

Keempat, dalam penelitian terbarunya, DeLone dan McLean menambah variabel baru yaitu *Service Quality* dan *Net Benefits*. Alasan utama penambahan variabel tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pitt, dkk (1995). Pitt dkk, mengusulkan penambahan variabel tersebut dalam mengukur *IS Success* karena peran dalam *IS Departement* dalam suatu organisasi menjadi lebih luas



dengan berkembangnya teknologi di bidang komputer. Pitt, dkk beranggapan *IS Departement* tidak hanya berperan sebagai *information provider* (penyedia informasi) tetapi juga sebagai *service provider* (penyedia layanan). Dengan demikian, dalam mengukur *IS Success* tidak hanya dari sisi produk informasi saja akan tetapi *Service Quality* juga harus diukur kepada *user IS Departement*. Dalam mengukur *Service Quality*, Pitt, dkk menggunakan metode *SERVQUAL* yang dikembangkan oleh Parasuraman, dkk (1988). Dimana indikator yang dipakai adalah *tangibles* (tampilan fisik), *reability* (kehandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (keyakinan), dan *emphaty* (empati) dengan menggunakan 22 pertanyaan.

Kelima, *Net Benefits* sebagai tambahan variabel baru didasarkan oleh saran dari berbagai peneliti dengan menambahkan indikator *IS Impact* baik sebagai *workgroup impacts*, *interorganizational* dan *industry impacts*, serta *consumer impacts*. Mereka mengatakan bahwa pilihan dimana dampak tersebut seharusnya bergantung pada sistem tersebut atau sistem yang akan dievaluasi dan tujuan mereka (para peneliti yang memberi saran). Dengan kompleksitas masalah yang ada, DeLone dan McLean membuatnya menjadi *Net Benefits*.



Gambar 2.3 Model Kesuksesan Delone & Mcleane Diperbaharui (2002)

### 2.1.3 Teori Kontingensi

Amitai (1985) menyatakan bahwa teori kontingensi disebut juga teori kepentingan, teori lingkungan atau teori situasi. Teori Kontingensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Menurut Stoner et al., (1996:47) pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional merupakan suatu \*pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda.

Hakikat teori kontingensi adalah tidak ada satu cara terbaik yang bisa digunakan dalam semua keadaan (situasi) lingkungan. Masuknya pengaruh variabel lingkungan dalam analisis organisasi diawali dengan kemunculan pendekatan sistem (*system approach*) dalam analisis organisasi dimana kemunculan pendekatan ini sebenarnya karena inspirasi dari ilmu biologi.

Pendekatan sistem dibangun berdasarkan anggapan bahwa organisasi pada hakekatnya mirip dengan organisme (makhluk hidup) yang terbuka terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Menurut pendekatan ini organisasi adalah sebuah *open system* besar yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub-sistem yang saling terkait. Organisme di dalam sistem semacam itu akan mengambil dan sekaligus memberikan sesuatu dari dan kepada lingkungannya. Dengan pola *simbiose take and give* itulah organisasi mempertahankan hidupnya.

Sama halnya dengan makhluk hidup, menurut Teori Kontingensi tujuan akhir sebuah organisasi dalam beroperasi adalah agar bisa bertahan (*survive*) dan bisa tumbuh (*growth*) atau disebut juga keberlangsungan (*viability*). Ada dua hal

yang dilakukan organisasi untuk menjalankan penyesuaian hidup terhadap lingkungannya. Pertama, manajemen menata konfigurasi berbagai sub-sistem di dalam organisasi agar kegiatan organisasi menjadi efisien. Kedua, bentuk-bentuk *spesies* organisasi memiliki efektivitas yang berbeda-beda dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan luar. Dengan kata lain mekanisme sistem pengendalian bisa sangat bervariasi sesuai dengan variasi lingkungan yang dihadapi. Dalam rangka mencari cara yang efektif, organisasi seharusnya menghubungkan permintaan lingkungan eksternal dengan fungsi-fungsi internalnya. Seorang manajer harus bisa mengatur harmonisasi fungsi-fungsi organisasinya dengan kebutuhan manusia.

Gareth Morgan (2007) menggambarkan gagasan utama yang menjadi dasar kontingensi: 1) Organisasi adalah sistem terbuka yang membutuhkan manajemen hati-hati untuk menyeimbangkan kebutuhan internal dan untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan, 2) Tidak ada cara pengorganisasian terbaik. Bentuk yang tepat tergantung pada jenis tugas atau lingkungan yang sedang dihadapi, 3) Manajemen harus diperhatikan, terutama, dengan mencapai keselarasan dan kecocokan yang baik, 4) Jenis organisasi yang berbeda dibutuhkan di berbagai jenis lingkungan.

Penelitian-penelitian terkait teori kontingensi berkembang dalam berbagai bidang. Fred Fiedler (1964) mengembangkan model kontingensi yang berfokus pada model kepemimpinan kontingensi dalam organisasi. Model ini berisi hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi yang menguntungkan. Kefasihan situasional digambarkan oleh Fiedler dalam tiga dimensi yang diturunkan secara empiris: 1) Hubungan pemimpin-anggota - tinggi jika pemimpin umumnya diterima dan dihormati oleh para pengikutnya, 2) Tingkat struktur tugas

- tinggi jika tugasnya sangat terstruktur, 3) Kekuatan posisi pemimpin - tinggi jika banyak wewenang dan kekuasaan secara formal dikaitkan dengan posisi pemimpin. Situasi menguntungkan bagi pemimpin jika ketiga dimensi ini tinggi.

Dalam bidang akuntansi, model kontingensi digunakan sebagai kerangka untuk memahami variable-variabel kontingensi yang menjelaskan mengapa dan bagaimana akuntansi telah berubah dan bagaimana faktor-faktor yang berbeda mempengaruhi perubahan akuntansi dengan berbagai cara yang berbeda (Waweru et al 2004, Otley;1980). Dalam akuntansi manajemen, Otley (1980) mengungkapkan bahwa pendekatan akuntansi manajemen yang didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen secara universal selalu tepat digunakan seluruh organisasi, namun sistem akuntansi manajemen hanya sesuai (fit) untuk suatu konteks atau kondisi tertentu saja. Penggunaan teori kontingensi dalam pengembangan sistem akuntansi manajemen akan tergantung pada lingkungan, organisasi dan gaya pembuat keputusan (Gordon dan Miller, 1976).

Teori kontingensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi persaingan. Pendekatan kontingensi untuk akuntansi manajemen didasari oleh anggapan bahwa tidak ada sistem akuntansi yang tepat secara universal yang dapat digunakan oleh semua organisasi dalam berbagai keadaan. Sistem akuntansi yang tepat tergantung pada keadaan khusus dimana organisasi tersebut berada. Oleh karenanya teori kontingensi harus mengidentifikasi aspek khusus dari sistem akuntansi perusahaan dimana keadaan dapat didefinisikan dengan pasti dan sistem dapat dicobakan dengan tepat. Teori kontingensi akuntansi ini

menunjukkan suatu upaya dalam penentuan sistem pengendalian yang paling memungkinkan atas seperangkat keadaan yang ada pada suatu organisasi.

Dalam akuntansi pemerintahan, munculnya teori kontingensi berawal dari adanya keinginan untuk melakukan suatu reformasi terhadap sistem akuntansi pemerintahan dari sistem akuntansi tradisional menjadi sistem akuntansi yang lebih informatif. Sistem yang lebih informatif akan tertuju pada pasokan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan serta menyediakan dasar untuk kontrol keuangan pada kegiatan pemerintah.

#### **2.1.4 Luder's Contingency Model**

Paradigma teoretis yang digunakan oleh beberapa peneliti penelitian akuntansi pemerintah internasional komparatif adalah Model Kontingensi Luder (1992, 1994). Model ini sendiri telah menjadi subjek penelitian dan telah berkembang selama beberapa tahun (Chan, Jones dan Luder, 1996). Model ini telah dimodifikasi dan diterapkan pada studi proses inovasi akuntansi pemerintahan di negara-negara yang kurang berkembang (Godfrey, Devlin dan Merrouche, 1996, 1999).

Dalam memahami perubahan di sektor publik, Luder (1992) mengembangkan sebuah model yang dikenal dengan *Luder's Contingency Model*. Studi Luder dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kriteria klasifikasi untuk akuntansi pemerintahan. Studi ini mengidentifikasi dua kriteria klasifikasi: kriteria internal, yang mencirikan sistem akuntansi dan pelaporan pemerintah; dan kriteria eksternal yang mencirikan konteks nasional dan orientasi pengguna akuntansi pemerintah. Studi ini didasarkan pada hipotesis bahwa "variabel kontekstual spesifik menentukan orientasi pengguna utama akuntansi dan pelaporan

menunjukkan suatu upaya dalam penentuan sistem pengendalian yang paling memungkinkan atas seperangkat keadaan yang ada pada suatu organisasi.

Dalam akuntansi pemerintahan, munculnya teori kontingensi berawal dari adanya keinginan untuk melakukan suatu reformasi terhadap sistem akuntansi pemerintahan dari sistem akuntansi tradisional menjadi sistem akuntansi yang lebih informatif. Sistem yang lebih informatif akan tertuju pada pasokan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan serta menyediakan dasar untuk kontrol keuangan pada kegiatan pemerintah.

#### **2.1.4 Luder's Contingency Model**

Paradigma teoretis yang digunakan oleh beberapa peneliti penelitian akuntansi pemerintah internasional komparatif adalah Model Kontingensi Luder (1992, 1994). Model ini sendiri telah menjadi subjek penelitian dan telah berkembang selama beberapa tahun (Chan, Jones dan Luder, 1996). Model ini telah dimodifikasi dan diterapkan pada studi proses inovasi akuntansi pemerintahan di negara-negara yang kurang berkembang (Godfrey, Devlin dan Merrouche, 1996, 1999).

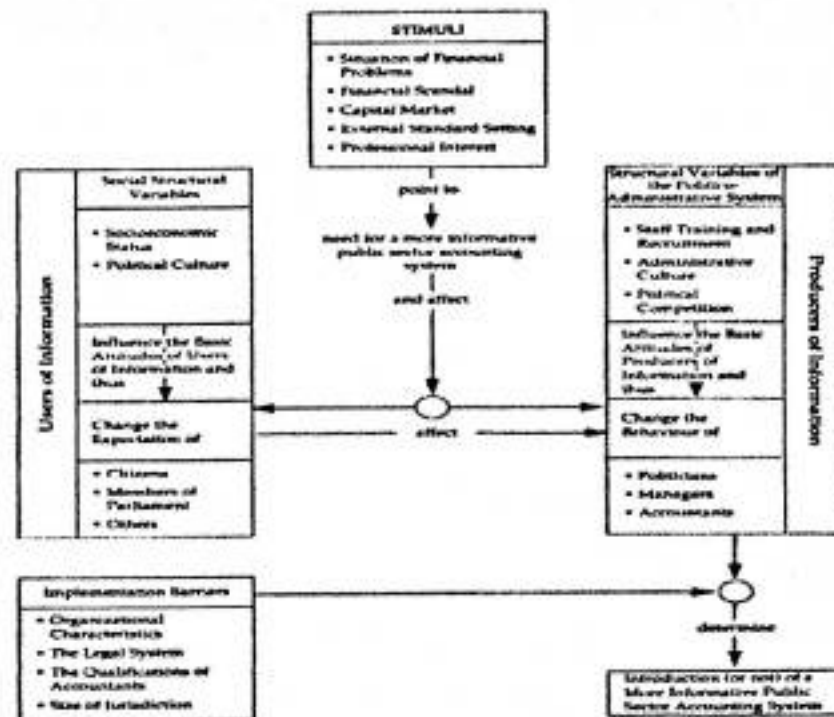
Dalam memahami perubahan di sektor publik, Luder (1992) mengembangkan sebuah model yang dikenal dengan *Luder's Contingency Model*. Studi Luder dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kriteria klasifikasi untuk akuntansi pemerintahan. Studi ini mengidentifikasi dua kriteria klasifikasi: kriteria internal, yang mencirikan sistem akuntansi dan pelaporan pemerintah; dan kriteria eksternal yang mencirikan konteks nasional dan orientasi pengguna akuntansi pemerintah. Studi ini didasarkan pada hipotesis bahwa "variabel kontekstual spesifik menentukan orientasi pengguna utama akuntansi dan pelaporan

pemerintah; orientasi pengguna menentukan desain sistem akuntansi dan pelaporan pemerintah".

Luder melakukan penelitian terhadap enam negara industri Barat (Kanada, Denmark, Prancis, Swedia, Inggris dan Amerika Serikat), dalam upaya untuk mengklasifikasikan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan; mengidentifikasi pola yang berbeda; dan jelaskan alasan perbedaan antar pola. Luder mengklasifikasikan sistem akuntansi pemerintah dari negara-negara di bawah studinya berdasarkan hubungan antara "orientasi pengguna utama akuntansi pemerintah dan pelaporan keuangan" dan "variabel kontekstual mendasar yang dirasakan".

Studi Luder menegaskan, "ada hubungan antara dua variabel (konteks nasional dan orientasi pengguna) dalam arti bahwa konteks nasional tertentu menguntungkan (atau tidak menguntungkan) dengan orientasi pengguna tertentu dari akuntansi pemerintah". Namun, Luder menekankan bahwa keberadaan konteks nasional tertentu tidak akan menyebabkan suatu negara memiliki orientasi pengguna tertentu yang paling disukai. Oleh karena itu, hubungan yang mungkin ada antara konteks nasional dan orientasi pengguna lebih kompleks dan tidak memungkinkan mereka untuk meringkaskan hubungan kausal sederhana.

*Luder* mencoba menjelaskan transisi dari akuntansi pemerintah tradisional ke sistem yang lebih informatif melalui interaksi berbagai faktor sosial, politik dan administratif termasuk penerapannya. Berdasarkan studi perbandingan antara Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa, model dikembangkan dalam empat modul: (1) stimulus (2) variabel struktural, (3) karakteristik dari sistem administrasi politik dan (4) hambatan implementasi.



Gambar 2.4 Luders Contingency Model (Luder 1992)

- 1) Luder menegaskan bahwa inovasi akuntansi pemerintah dapat terjadi mengingat stimuli yang tepat dan faktor lingkungan yang kondusif (Luder, 1992; 1994). Stimulus berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada tahap pertama dari proses inovasi yang menghasilkan kebutuhan untuk informasi yang ditingkatkan pada bagian dari pengguna dan meningkatkan kesiapan produsen untuk memberikan informasi tersebut. Misalnya stimulus yang berhubungan dengan stres fiskal, skandal keuangan dan krisis keuangan.
- 2) Variabel struktural adalah fitur dari lingkungan sosial di sektor publik yang mempengaruhi sikap dasar pengguna dan produsen informasi terhadap gagasan bentuk yang lebih informatif akuntansi sektor publik. Misalnya



variabel struktural yang terkait dengan budaya masyarakat, pasar modal, dan kelompok *stakeholder*.

- 3) Karakteristik sistem administrasi politik mengacu fitur dari sistem administrasi politik di sektor publik yang mempengaruhi sikap dasar pengguna dan produsen informasi terhadap gagasan bentuk yang lebih informatif akuntansi sektor publik. Misalnya budaya politik, sistem politik dan persaingan politik, budaya administrasi, sistem informasi staf dan karakteristik organisasi terhadap akuntansi misalnya sikap pimpinan pemerintah daerah terhadap penerapan akuntansi akrual.
- 4) Hambatan Implementasi adalah kondisi lingkungan yang menghambat proses pelaksanaan, sehingga menghambat penciptaan sistem akuntansi yang lebih informatif yang pada prinsipnya diinginkan.

Model Luders dikembangkan lebih lanjut oleh Chan, Jones dan Luder (1996) dimana kerangka tersebut menekankan tiga faktor penting yang mempengaruhi hasil proses inovasi, yaitu: harapan masyarakat umum sebagai pengguna informasi, harapan dan perilaku aktor politik sebagai pengguna sekaligus produsen informasi, perilaku pelaku administrasi sebagai produsen informasi. Harapan masyarakat mempengaruhi variabel struktur sosial, seperti budaya sosial dan daerah. Harapan dan perilaku politik akan mempengaruhi variabel struktur politik seperti budaya politik dan persaingan politik. Variabel variabel perilaku administratif mempengaruhi struktur administrasi, seperti budaya administrasi, sistem pembentukan staf, dan organisasi penetapan standar.

Model Luder (1994) mengidentifikasi budaya masyarakat dan konsep doktrin dominan bersama dengan perubahan mayoritas parlemen. Model Luder

menekankan adanya pengaruh politik dalam pengeolaan sebuah Negara. Politik dapat menjadi pencengah antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah sistem untuk mengola organisasi. Luder mengungkapkan bahwa budaya politik dipahami sebagai "pola perilaku politik" di mana konsep nilai sosial diungkapkan. Budaya politik mempengaruhi sikap dasar pengguna informasi mengenai pengungkapan informasi mengenai pengelolaan keuangan sektor publik, dan karena itu juga mengenai kebutuhan akan sistem akuntansi yang lebih informatif.

Budaya politik terungkap dengan tingkat keterbukaan dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan publik. Semakin banyak budaya politik terbuka dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat, semakin besar harapan pengguna informasi keuangan dari sektor publik. Peserta aktif dalam sistem politik lebih memilih informasi komprehensif mengenai pengelolaan keuangan pemerintah. Indikasi tingkat keterbukaan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik adalah pentingnya rujukan dan prosedur konsultatif lainnya berdasarkan demokrasi langsung (khususnya pemilihan langsung pemegang jabatan administratif tertinggi).

Kompetisi Politik. Istilah "kompetisi politik" memiliki dua makna yang berbeda. Yang pertama adalah dalam arti persaingan di "pasar suara"; dan yang kedua mengacu pada persaingan antara badan pembuat keputusan (cabang eksekutif dan legislatif pemerintah) dan pemilih. Persaingan politik yang lebih kuat antara pengguna informasi (yaitu, pemilih dan legislatif) dan produsen informasi (yaitu, eksekutif) memungkinkan pihak pertama untuk menyatakan kepentingan informasi mereka dengan lebih mudah dan dengan demikian menghasilkan

pengurangan distribusi informasi yang tidak simultan antara pengguna dan produsen.

Budaya administrasi sama dengan budaya politik. Untuk sejauh mana budaya politik terbuka dan mendorong partisipasi, itu juga akan berlaku untuk budaya administratif. Budaya administrasi berpengaruh terhadap sikap dasar staf administrasi terhadap keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Dalam budaya administrasi terbuka, produsen informasi sendiri memiliki sikap dasar yang positif terhadap gagasan sistem pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan yang lebih informatif.

### **2.1.5 Budaya dan akuntansi**

Hofstede's (1984) dianggap oleh banyak orang sebagai diskursus dalam studi analisis faktor yang digunakan dalam penelitian budaya dan mengelompokkan negara ke dalam kelompok budaya berdasarkan empat dimensi nilai: jarak kekuasaan; penghindaran ketidakpastian; individualism vs collectivism; masculinity vs femininity. Studi budaya juga dikemukakan oleh Gray (1988) yang mengidentifikasi empat nilai yang dapat membedakan dimensi subkultur akuntansi yang terkait dengan nilai-nilai sosial: profesionalisme versus kontrol berdasarkan aturan; keseragaman versus fleksibilitas; konservatisme versus optimisme; kerahasiaan versus transparansi. Hofstede (1984) mendefinisikan budaya sebagai pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota dari satu kelompok manusia dari yang lain. Budaya yang didefinisikan termasuk kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi yang dimiliki bersama dalam masyarakat tertentu.

Istilah budaya memiliki sejumlah makna. Budaya sering diterapkan ketika merujuk pada masyarakat dan / atau kelompok etnis dan / atau regional kelompok,

tetapi digunakan juga saat merujuk pada organisasi dan / atau profesi dan / atau keluarga. Jadi, bagi sebagian orang, agama, pendidikan, norma, adat istiadat dan sejarah adalah komponen penting dari budaya masyarakat (Ralston, Holt, Terpstra dan Kai-Cheng, 1997).

Perera (1989) menggabungkan studi Hofstede dan Gray dan mengusulkan hipotesis tentang hubungan antara nilai-nilai budaya dan nilai akuntansi. Mengacu pada upaya untuk mengeksport keterampilan akuntansi ke negara-negara berkembang, Perera (1989) mengungkapkan bahwa keterampilan yang dialihkan dari negara-negara Amerika mungkin tidak bekerja karena mereka secara budaya tidak relevan atau tidak berfungsi dalam konteks negara penerima. Beberapa peneliti berpendapat bahwa akuntansi ditentukan secara budaya, kritik terhadap transfer semacam itu berpendapat bahwa tindakan mengimpor sistem akuntansi asing tidak relevan dan tidak pantas (Harrison dan McKinnon; 1999).

Harrison dan McKinnon (1999) menyoroti literatur tentang model Hofstede. Mereka mengidentifikasi tiga kelemahan dalam studi tersebut. Pertama, ada kegagalan untuk mempertimbangkan totalitas domain budaya dalam kerangka kerja teoritis digunakan oleh peneliti. Kedua, ada kecenderungan untuk secara eksplisit mengabaikan intensitas diferensial norma-norma dan nilai-nilai budaya lintas budaya. Ketiga, ada kecenderungan untuk memperlakukan budaya secara sederhana.

Baydoun dan Willett (1995) mempertanyakan sejauh mana konsep Hofstede dapat diterapkan pada analisis kelompok sosial yang lebih spesifik yang mungkin memiliki karakteristik subkultur yang berbeda secara signifikan, beberapa di antaranya mungkin bertentangan dengan nilai-nilai nasional yang tampak. Demikian pula, studi Gray (1988) dianggap kurang karena tidak adanya definisi

independen dari relevansi budaya. Selanjutnya, Boczko (2000) berpendapat bahwa, meskipun studi klasifikasi Gray berjanji untuk berangkat dari sifat dominan studi institusional sebelumnya, dalam hal itu hanya memperluas hubungan antara lingkungan budaya dan akuntansi kontemporer seperti dihipotesiskan dalam studi sebelumnya.

Ada berbagai perspektif tentang budaya. Literatur akuntansi memberi kesan bahwa, dalam mengeksplorasi hubungan antara budaya dan akuntansi, satu pendekatan yang tepat: pendekatan nilai-dimensi untuk mengkonseptualisasikan budaya yang berasal dari literatur psikologi lintas-budaya. Williams (1983) mengemukakan bahwa budaya berkembang sebagai respon terhadap industrialisme. William mengidentifikasi potensi budaya yang demokratis. Williams (1965) berpendapat bahwa budaya dapat didefinisikan dalam istilah 'sosial'. Budaya adalah "deskripsi cara hidup tertentu" dianggap sebagai terobosan karena memberikan perspektif dan pendekatan untuk disiplin yang muncul dari studi budaya. Williams berusaha untuk menekankan kompleksitas budaya. Meskipun sulit dalam praktiknya, penting untuk "mencoba melihat proses secara keseluruhan", untuk menghubungkan studi budaya dengan "organisasi aktual dan kompleks". Dengan demikian, Williams menekankan konsep totalitas sosial. Memahami keseluruhan proses sosial dan interaksi berbagai elemen dalam totalitas. Di bawah pendekatan ini, bentuk-bentuk ekonomi, sosial dan budaya saling terkait. Suatu pendekatan di mana praktik budaya perlu diperiksa dalam hal interaksinya dengan aspek lain berdasarkan pada penetapan nilai ke berbagai dimensi budaya.

Model Kontingensi Luder (Luder, 1989, 1992, 1996) juga membahas terkait budaya dan telah berfungsi sebagai kerangka acuan konseptual untuk penelitian

akuntansi pemerintah perbandingan internasional. Model ini berusaha menjelaskan mengapa beberapa negara telah melakukan inovasi akuntansi pemerintah sementara yang lain tidak. Luder ber teori bahwa inovasi itu adalah hasil interaksi kompleks variabel kontekstual dan variabel perilaku yang menggambarkan pengguna dan pemasok informasi keuangan pemerintah. Misalnya, masyarakat umum dapat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan seperti profesi akuntansi dan pasar modal, yang berfungsi sebagai perantara informasi yang mengurangi biaya. Budaya politik seperti norma akuntabilitas dan persaingan politik seperti antara partai atau fraksi politik, bersama dengan krisis atau skandal fiskal yang kadang-kadang atau sering dapat memengaruhi cara para pemimpin politik memandang akuntabilitas keuangan. Demikian pula, tuntutan akuntabilitas administratif dan penerimaan terhadap praktik-praktik sektor swasta dapat memengaruhi cara birokrasi memandang informasi yang diberikannya kepada legislatif dan masyarakat luas. Dengan kata lain, variabel budaya sosial, politik dan administrasi dihipotesiskan memiliki pengaruh signifikan terhadap harapan dan perilaku yang menuntut dan menyediakan informasi keuangan pemerintah.

Secara khusus, Chan berhipotesis bahwa karakteristik pelaporan sistem akuntansi pemerintah dipengaruhi oleh pengguna. Orientasi pengguna dapat berupa manajerial, legislatif, atau eksternal. Orientasi pengguna mempengaruhi tujuan akuntansi dan pelaporan untuk pemerintah. Hubungan antara orientasi pengguna dan tujuan akuntansi dan pelaporan adalah sebagai berikut: 1) Orientasi legislatif. Sistem akuntansi pemerintah merespons secara eksklusif atau paling tidak terutama untuk kebutuhan kontrol dan informasi legislatif. Fokus akuntansi dan pelaporan adalah untuk menunjukkan kepatuhan terhadap otoritas. 2)

Orientasi publik. Selain orientasi legislatif, orientasi publik dipandang sebagai tujuan kedua dan penting. Akuntansi juga merupakan sarana untuk memberi publik gambaran yang dapat dipercaya tentang situasi keuangan pemerintah secara keseluruhan. 3) Orientasi manajemen. Akuntansi juga dianggap sebagai sarana untuk mengelola operasi pemerintah. Fokus akuntansi dan pelaporan adalah mendorong dan menunjukkan manajemen sumber daya yang efektif dan efisien.

Sistem yang berorientasi manajerial akan menekankan kontrol administratif dalam bentuk pelaporan sementara pelaksanaan anggaran. Sistem yang berorientasi legislatif akan menekankan pelaporan tahunan ke parlemen untuk pelaksanaan akuntabilitas pemerintah. Sistem yang berorientasi eksternal akan lebih memperhatikan kemampuan pemerintah untuk membayar hutang dan mempertahankan pengiriman layanan, yang merupakan kepentingan kreditor dan masyarakat umum. Peran penting anggaran dalam pemerintah, menjadi salah satu alasan untuk mengkarakterisasi akuntansi pemerintah dengan merumuskan "model akuntansi pemerintah" dalam hal perbedaan disetiap negara.

### **2.1.6 Pengembangan Teknologi Informasi**

Secara teknis sistem teknologi informasi telah berkembang dengan pesat. Secara kualitas sistem teknologi informasi juga sudah meningkat dengan drastis. Beberapa dekade yang lalu, banyak sistem teknologi informasi yang gagal karena aspek teknisnya, yaitu kualitas sistem yang buruk yang banyak mengandung kesalahan-kesalahan sintak, kesalahan-kesalahan logik dan bahkan kesalahan-kesalahan informasi. Sekarang, walaupun kualitas teknis sistem sudah membaik, tetapi masih juga terdengar banyak sekali sistem informasi yang gagal diterapkan. Faktor manusia sebagai pemakai sistem informasi sangat menentukan

keberhasilan penerapan sistem informasi. Dalam merancang sistem baru yang akan diterapkan, sebaiknya sistem tersebut adalah sistem yang dapat diterima oleh semua pemakai yang akan memergunakannya. Dengan demikian dalam pengembangan sistem informasi, perancang harus memasukan dimensi-dimensi kesesuaian penerimaan teknologi informasi oleh pemakainya, untuk mengurangi sekecil mungkin hambatan yang ada antara manusia dengan sistem informasi yang dikembangkan.

Pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau mengubah bagian atau keseluruhan sistem informasi. Setiap proyek pengembangan sistem informasi akan melalui siklus hidup pengembangan sistem atau lebih dikenal sebagai *System Development life Cycle* (SDLC). SDLC menggambarkan bagaimana pengembangan sistem informasi yang dimulai sejak konsep sampai diimplementasikannya sistem ke dalam proses operasi rutin.

Secara umum ada enam tahap dalam pengembangan sistem informasi (Wilkinson, 2000) yaitu meliputi: perencanaan sistem (*system planning*), analisis sistem (*system analysis*), perancangan sistem (*system design*), seleksi sistem (*system selection*), penerapan sistem (*system implementation*) dan operasional sistem (*system operational*). Namun seringkali yang dilupakan adalah tahap terakhir yaitu tahap operasional. Dalam tahap ini sistem diintegrasikan ke dalam organisasi dan dilakukan monitoring serta perbaikan secara terus menerus. Dalam tahap ini biasanya dilakukan evaluasi untuk melihat kendala dan masalah yang ada dalam operasional sistem secara rutin, kemudian dilakukan perbaikan untuk mengatasi masalah yang ada dalam sistem tersebut.

Dalam tahap evaluasi ini dapat dilakukan pada saat sistem sedang berjalan atau setelah periode operasional program selesai dilakukan dan telah



menghasilkan *output* yang diperlukan. Hasil dari evaluasi ini adalah rekomendasi tentang kekurangan-kekurangan sistem yang telah berjalan. Salah satu bentuk evaluasi dalam tahap operasional ini adalah menilai kepuasan pemakai sistem dan dirasakan apakah perlu adanya perbaikan atau penggantian sistem yang ada .

### 2.1.7 E-Government

Pemerintahan elektronik atau *e-government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *Electronic government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari *electronic government* adalah peningkatan efisiensi.

Secara umum pengertian *electronic government* adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis Internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan memanfaatkan Internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan pembayaran secara

langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi Internet akan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Dengan adanya fasilitas seperti ini, masyarakat diharapkan akan menjadi lebih produktif karena masyarakat tidak perlu antri dalam waktu yang lama hanya untuk menyelesaikan satu buah perizinan. Dengan adanya *on-line system* ini, masyarakat dapat memanfaatkan banyak waktunya untuk melakukan pembangunan yang lain sehingga diharapkan produktivitas nasional pun dapat meningkat.

Ada 2 hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian *electronic government* diatas: *Pertama*, penggunaan teknologi informasi (*internet*) sebagai alat bantu. *Kedua*, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif. Dengan penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas. Kendati demikian, *electronic government* bukan berarti menggantikan peran aparat pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep *electronic government* masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah atau mengirim surat.

Melalui pengembangan *electronic government*, dilakukan penataan sistem manajemen serta proses kerja dilingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktifitas yang saling berkaitan, yaitu: Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerjasecara elektronik dan Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar

pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah.

Inisiatif *electronic government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, *electronic government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.

*Electronic government* dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh. Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas men-download formulir yang dibutuhkan. Pemrosesan / pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran). Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa *electronic government* bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah. Pemberian pelayanan sampai dengan tahap *full-electronic delivery service* perlu diupayakan.

Tujuan *electronic government* adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani

keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*, dimana dalam hal ini *electronic government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan antara lain:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat secara luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan mempercepat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis *electronic government* perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu: 1) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. 2) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistic. 3) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 4) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan

mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. 5) Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat. 6) Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistic dan terukur.

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *electronic government* bagi suatu daerah: 1) Tentunya akan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (baik itu masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara. 2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk keperluan sehari-hari. 4) Memberikan peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. 6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

#### **2.1.7.1 E-Planning dan E-Budgeting**

Konsep *e-planning* dan *e-budgeting*, merupakan pengembangan konsep budgeting, salah satu financial tools di dalam mengelola suatu perusahaan maupun pemerintah. *E-planning* dan *E-budgeting* merupakan sebuah sistem

keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah daerah. Setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun oleh sebuah pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi setempat.

Sistem *e-planning* dan *e-budgeting* kini pun mulai membuktikan sejumlah keunggulannya dibandingkan dengan penerapan dokumentasi keuangan secara konvensional (Suhariyanto, 2016). Beberapa keunggulannya seperti: 1) *Mencegah tindakan korupsi*. Praktik korupsi di sejumlah daerah terkadang bisa disamakan dengan proses manipulasi data keuangan. Dalam kurun waktu tertentu, pencatatan dana bisa diakali dengan lebih mudah karena masih menggunakan sistem konvensional seperti aplikasi Excel. Jadi, lumrah semisal ada penggelapan atau penggelembungan dana yang tiba-tiba terjadi dalam sebuah data keuangan pemerintah daerah. Dengan menerapkan system *e-planning* dan *e-budgeting*, upaya-upaya tersebut bisa dicegah karena data yang telah diinput sudah tak bisa diutak-atik lagi dan telah tersebar ke publik. 2) *Prinsip Transparansi Publik*. Pemantauan data keuangan sekaligus pengendaliannya oleh publik merupakan praktik dari demokratisasi keuangan di sebuah pemerintah daerah. Warga bisa langsung melayangkan keluhan jika mencurigai data yang tidak semestinya. Mereka juga bisa memastikan apakah dana pajak yang telah dibayarkan sudah digunakan sebagaimana mestinya. Transparansi publik merupakan kewajiban dari setiap pemerintah daerah untuk mencegah dan mengantisipasi segala tindakan kecurangan dalam pengelolaan APBD. 3) *Prinsip keterbukaan data informasi keuangan kepada masyarakat* juga sudah diatur dalam aturan perundangan yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006. Peraturan inilah yang menjadi

pedoman penerapan sistem e-budgeting untuk setiap instansi pemerintahan daerah di Indonesia. 4) *Efisiensi Pendataan Keuangan*. Sistem pendataan keuangan pun bisa berlangsung secara efisien dan efektif.

### **2.1.9 Penganggaran**

Istilah anggaran atau penganggaran merupakan hal yang selalu diperbincangkan dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Saat ini, organisasi pemerintahan memberikan perhatian yang semakin meningkat pula pada proses pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah daerah semenjak berlangsungnya era otonomi daerah.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, UU No.33/2004, dan UU No.17 Tahun 2003, siklus perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan meliputi beberapa tahap, yaitu: 1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang selai diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikut sertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, LSM, pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha. 2) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan SKPD. 4) Kepala

SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. 5) RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam peembicaraan pendahuluan RAPBD. 6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD berikutnya. 7) Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. 8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan satu tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

#### **2.1.10 Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja menjadi hal yang menarik dalam pembicaraan organisasi publik. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (mahmudi 2010).

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi,



yaitu kegiatan kerjasama dalam sebuah organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen.

Kinerja dikatakan sebagai sebuah hasil dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan. Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Dalam rangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi. Organisasi pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau kelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009), sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Lebih lanjut, menurut Mardiasmo bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu: 1) Memperbaiki kinerja pemerintah, 2) Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, 3) mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Setiap organisasi biasanya tertarik pada pengukuran kinerja dalam beberapa aspek, diantaranya: 1) Aspek Finansial. Meliputi anggaran suatu organisasi, karena dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, dan aspek ini penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja. 2) Kepuasan Pelanggan. Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi organisasi. Semakin banyak

tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka organisasi dituntut untuk terus menerus memberi pelayanan berkualitas prima. 3) Operasi Bisnis Internal. Informasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam rencana strategis. 4) Kepuasan Pegawai. Pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik. apalagi dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sangat nyata. Apabila pegawai dikelola dengan baik, maka kehancuran organisasi sulit dicegah. 5) Kepuasan Komunitas *Stakeholder*. Kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya. Untuk itu informasi dari pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari *Stakeholder*. 6) Waktu. Ukuran waktu merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja. Terkadang kita membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan, namun informasi tersebut lambat diterima, kadang sudah tidak relevan/kadaluarsa.

Adapun aspek- aspek standar kinerja menurut Mangkunegara (2005:18) terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.

1. Aspek kuantitatif meliputi:

- a. Proses kerja dan kondisi pekerjaan.
- b. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan.
- c. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan.
- d. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja.

2. Aspek kualitatif meliputi:

- a. Ketetapan kerja dan kualitas pekerjaan.
- b. Tingkat kemampuan dalam bekerja.

- c. Kemampuan menganalisis data atau informasi, kemampuan atau kegagalan menggunakan mesin peralatan, dan
- d. Kemampuan mengevaluasi (keluhan-keberatan konsumen).

## 2.2 Tinjauan Empiris

Salim Mona, Xiaobao Peng, Shoqi Almaktary, Saleem Karmoshi (2017). *The Impact of Citizen Satisfaction with Government Performance on Public Trust in the Government: Empirical Evidence from Urban Yemen*. Melihat bagaimana kasus pemerintah di Yaman dan hasilnya 1. Ada pengaruh yang kuat antara kepercayaan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan publik. 2. Ada pengaruh yang kuat antara kepercayaan masyarakat dengan kinerja pemerintah.

Berman evan at al (2013), *The Impact of Societal Culture on the Use of Performance Strategies in East Asia: Evidence from a comparative survey*. Artikel ini menunjukkan budaya mempengaruhi praktik kinerja. Studi ini memiliki implikasi luas, yaitu menunjukkan bagaimana budaya masyarakat mempengaruhi praktek publik. Para peneliti seharusnya tidak mengabaikan budaya masyarakat dalam keputusan seputar pemilihan dan implementasi strategi manajemen, atau dalam memahami atau membentuk kondisi organisasi.

Kim (2008) *A Daunting Task in Asia*. Artikel ini menunjukkan bahwa di beberapa negara terdapat tingkat kemiskinan yang tinggi dan status sosial ekonomi yang rendah serta kurangnya semangat masyarakat terlibat langsung dalam proses pemerintahan. Masyarakat lebih sering beranggapan pesimis pada keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan sehingga sangat sulit untuk mempengaruhi kinerja pemerintah. Secara teori pemerintah harusnya merangkul masyarakat, pada kenyataannya pemerintah merasa yang paling benar dalam

mengambil keputusan. Masalah tingkat kepercayaan atau keyakinan yang rendah; partisipasi yang rendah; kurangnya pro-aktivitas; nilai / norma publik yang rendah atau buruk menjadi fenomena yang ditemukan pada sektor publik. Mengelola keragaman bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi keanekaragaman harus dipromosikan secara aktif bersamaan dengan rasa memiliki komitmen, rasa memiliki yang setara. Hal ini kurang ditemui di Asia dan sedang diperlukan untuk membangun nilai sosial di sektor publik. Peran masyarakat sipil perlu direvitalisasi; kemitraan sektor publik dengan masyarakat sipil adalah strategi penting bagi banyak negara yang ingin memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Perlu lebih banyak pengawasan oleh masyarakat sipil. Perlu lebih banyak keterlibatan warga negara, partisipasi lebih aktif untuk membawa masalah sosial ke dalam agenda publik, melalui kesadaran publik.

Noordegraaf dan Vermeulen (2010). *Culture in Action: The 'Rotterdam Approach' as Modernization Through Tradition*, menyatakan bahwa organisasi publik diharapkan mampu menyelesaikan atau mengurangi masalah – masalah yang terjadi di masyarakat baik dari segi kemiskinan, infrastruktur maupun budaya yang terbentuk di masyarakat yang menyimpang dari aturan yang ada. Selama beberapa dekade terakhir, sebagian besar organisasi pemerintah telah ditata ulang untuk meningkatkan budaya sosial yang mengarah pada keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Pemerintah seharusnya tidak mengabaikan budaya yang tercipta di masyarakat sehingga budaya tersebut dapat mempengaruhi kinerja pemerintah. Budaya dapat (harus) diubah, namun pertanyaan yang muncul yaitu apakah budaya dapat diubah dengan mudah dan cepat atau sulit dan lambat, terutama fokus perubahan jangka pendek atau perubahan jangka panjang.

Alba (2017). *Administrative tradition and reforms in Spain: adaptation versus innovation*. Dalam penelitiannya pada administrasi publik di Spanyol menemukan bahwa telah terjadi ketidakstabilan politik yang tinggi. Kelemahan sistem politik, dan kurangnya saluran yang tepat untuk ekspresi politik, telah membuat mesin administratif lebih kuat dan lebih aktif secara politik. Dalam banyak kasus reformasi administrasi diekspresikan melalui konflik kepentingannya. Budaya politik yang terjadi sebagai garis pemisah antara politisi dan pegawai negeri, atau antara birokrasi dan sistem politik, tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan. Bahkan penciptaan pemerintahan daerah baru yang bertanggung jawab atas kebijakan kesejahteraan utama telah meningkatkan tingkat politisasi administrasi dan personelnnya karena ruang-ruang baru terbuka untuk praktik-praktik tradisional serta korupsi politik.

Bertsch andy, Warner Gillian (2013) *Exploring societal cultural values and human rights and development*. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara nilai-nilai budaya masyarakat dan berbagai praktik sosial yang dapat diamati. Hasilnya mengungkapkan Nilai-nilai budaya mempengaruhi perilaku, studi ini menggunakan nilai-nilai kemasyarakatan dan indeks perilaku masyarakat . Hasil menemukan dua model yang bisa diterapkan untuk menggambarkan hubungan antara nilai-nilai yang dianut masyarakat dan dapat diobservasi. Performance Orientation (PO) dan Power Distance (PDI) secara signifikan berkorelasi terhadap perilaku sosial Penelitian lebih lanjut menemukan akses ke proses pemilu proses merupakan bagian signifikan dari Hak Politik Penghindaran Ketidakpastian (UAI) - secara signifikan berkorelasi dengan Hak Politik. Transparency terbukti menghasilkan model terkuat dengan 69% dari total varian dijelaskan.

Al Badri Naser Mohamad (2012), *The Influence of Societal and Organizational Culture on Employment Equity: The Case of the Public Sector in the Sultanate of Oman*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya sosial dan organisasi di sektor publik Oman. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa budaya masyarakat dan organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ekuitas kerja (EE).

Holmes Brenton (2011) *Citizens' engagement in policymaking and the design of public services*. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa di banyak negara demokrasi, partisipasi warga dalam perumusan kebijakan dan desain layanan telah diperdebatkan atau dicoba, namun terlalu jarang direalisasikan. Ada beberapa pencapaian penting, baik di negara maju maupun negara berkembang, dan ada banyak literatur kebijakan publik yang menganjurkan kolaborasi menyeluruh. Namun, keterlibatan dalam membuat kebijakan dan layanan memerlukan perubahan besar dalam budaya dan operasi badan-badan pemerintah. Ini menuntut keterampilan baru dari pegawai negeri sebagai negosiator dan kolaborator. Ini menuntut warga masyarakat untuk berpegang pada kepentingan publik, kemauan untuk terlibat secara aktif, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dan disengaja dengan baik. Keterlibatan yang efektif oleh layanan publik yang berpusat pada warga negara memerlukan dukungan politis untuk devolusi kekuasaan dan pengambilan keputusan secara tulus kepada pejabat dan profesional publik garis depan - dan kepada warga negara dan pemangku kepentingan yang terlibat dengannya. Para menteri dan kepala lembaga memiliki tanggung jawab kepemimpinan utama di sini.

Upping (2011). *Accounting change model for the public sector: adapting luder's model for developing countries*. Penelitiannya membahas pengembangan model

teoritis untuk menyelidiki perubahan akuntansi di sektor publik di negara berkembang. Model yang diadaptasi dari Luder menyediakan kerangka kerja integratif yang mengonseptualisasikan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perubahan akuntansi dan faktor-faktor yang dapat menjadi penghalang dan fasilitator perubahan di negara-negara berkembang. Studi ini telah memasukkan semua faktor kontingensi ini dan mendukung sudut pandang teoritis dari teori kontingensi.

Katzman Kenneth (2015) *Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance*. Dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pemerintahan di Afganistan lumpuh diakibatkan tidak terbentuknya kabinet baru. Pemerintah yang sementara berjalan memiliki karetaaker pejabat dan birokrat yang tidak memiliki arah kebijakan tingkat tinggi. Pilihan kabinet dilaporkan merupakan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan pejabat yang kompeten dengan tuntutan untuk memuaskan keduanya konstituen utama para pemimpin. Otoritas pemerintah tetap dibatasi tidak hanya oleh pembagian kekuasaan pengaturan tetapi juga oleh pengerahan pengaruh oleh kekuatan informal yang telah lama berdiri. Pemimpin fraksi sering mempertahankan kelompok pejuang bersenjata yang sering menjalankan administrasi peradilan yang sewenang-wenang dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kendala-kendala ini dapat memperlambat dalam membatasi korupsi pemerintah dan mempromosikan hak-hak perempuan.

Stier Sebastian (2015) *Political determinants of e-government performance revisited: Comparing democracies and autocracies*. Temuan mencerminkan suatu kemauan politik yang sebenarnya di negara-negara berkembang dengan menggunakan program e-government untuk meningkatkan kinerja dan pembangunan nasional. studi juga mengungkapkan bahwa kapasitas pemerintah

menjadi lebih penting untuk kinerja e-government. Ini menunjukkan bahwa program yang semakin canggih membutuhkan tenaga terampil dan sumber daya administratif. Namun, tren yang diamati perlu dikaji ulang ketika data baru tersedia.

Bertsch andy, Warner Gillian (2013) *Exploring societal cultural values and human rights and development*. Temuan mencerminkan suatu kemauan politik yang sebenarnya di negara-negara berkembang dengan menggunakan program e-government untuk meningkatkan kinerja dan pembangunan nasional. studi juga mengungkapkan bahwa kapasitas pemerintah menjadi lebih penting untuk kinerja e-government. Ini menunjukkan bahwa program yang semakin canggih membutuhkan tenaga terampil dan sumber daya administratif. Namun, tren yang diamati perlu dikaji ulang ketika data baru tersedia.

Zakaria Zaherawati (2011) *Measuring Local Government Performance in Malaysia: Political Indicators Versus Organisational Theory*. Dalam mengukur kinerja pemerintah sebaiknya fokus pada indikator input (unit output / layanan yang disediakan), indikator hasil (hasil pelayanan disediakan), indikator efektivitas biaya atau indikator produktivitas (fokus pada efektivitas dan efisiensi). Hasilnya Pandangan dalam mengukur kinerja pemerintah lokal baik dengan indikator politik atau teori organisasi, proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kedua pandangan tersebut. Kedua metode tersebut menunjukkan bahwa perilaku manusia adalah platform terbaik untuk mengambil tindakan. Politik memberikan dampak pada kinerja pemerintah.

La Porta Rafael, Silanes, Shleifer, Vishny (2009). *The Quality of Government*. Hasilnya menunjukkan kinerja pemerintah dipengaruhi oleh berapa hal salah satunya politik. Pada Negara maju politik akan sangat berpengaruh pada



kinerja pemerintah, namun pada Negara miskin/berkembang, politik tidak mempengaruhi kinerja pemerintah.

Busell Jenifer (2011) *Explaining Cross-National Variation in Government Adoption of New Technologies*. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif antara demokrasi dan e-government. Temuan ini juga menyoroti relevansi korupsi dengan hasil kebijakan di kedua rezim demokratis dan otoriter. Secara umum, rezim demokratis tidak selalu menunjukkan kinerja yang transparan. Ini menyiratkan kebebasan demokratis yang cukup tinggi bisa menjadi memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. India — sangat demokratis tetapi memiliki Negara yang sangat korup — dan Singapura — rezim yang otoriter namun sangat transparan.

Lee Chung-pin, Kaiju Chang, Frances Stokes Berry (2011) Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif antara demokrasi dan e-government. Kompetisi dan pembelajaran penjelasan menunjukkan hubungan negative. Persaingan mungkin penting untuk e-government karena negara bersaing untuk bisnis yang mencari secara global di mana untuk menempatkan infrastruktur atau membangun perusahaan. Demokrasi tampaknya belum menjadi bagian dari kalkulus untuk bisnis tentang tempat untuk mencari sumber daya. Pemerintah bereaksi lebih banyak untuk tuntutan dari pengguna internal.

Al tholaya abdulla mohamed hamoud. 2013. *Governmental accounting innovation in yemen* Institusional mempengaruhi kinerja pada pemerintah. E-Government dapat menjadi variable moderasi antara institusi dengan kinerja pemerintah.

Parrado, S (2008) 'Failed Policies but Institutional Innovation Through "Layering" and "Diffusion" in Spanish Central Administration'. Melalui difusi

institusi sebagai mekanisme sosial yang termasuk dalam akun institusionalisme historis baru untuk inovasi, organisasi tertentu seperti lembaga pajak, jaminan sosial dan pendaftaran properti telah menjadi lebih manajerial di negara yang didominasi oleh hukum publik.

Sirsat Sanjay, Sirsat Manisha (2016) A Validation of The DeLone And Mclean Model On The Educational Information System Of The Maharashtra State (India). Penelitian ini memfokuskan pada penelaahan DeLone dan McLean model evaluasi, analisis komparatif dari model asli dan diperbarui dari DeLone dan McLean dan untuk memvalidasi keberhasilan informasi dari sistem UDISE pemerintah India dengan menerapkan model yang sama. Semua variable signifikan mendukung Model D & M.

Kardan (2011). Is e-government a way to e-democracy?: A longitudinal study of the Iranian situation. Penelitiannya menekankan bahwa e-government dan demokrasi, menyatu bersama. E-government dapat memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih terlibat dalam pemerintahan dan lebih banyak informasi tentang hukum, peraturan, kebijakan, dan jasa. Inisiatif E-government dapat meningkatkan derajat dan kualitas partisipasi publik dalam pemerintahan. Dari evolusi tambahan perspektif, e-government mempengaruhi demokrasi partisipatif dalam area berikut: 1) Di mana ada dasar sejarah, politik atau budaya agar masyarakat sipil lebih aktif dan partisipatif yang difasilitasi pemerintah dan kegiatan konsultatif; 2) Di mana teknologi memungkinkan minat yang muncul dalam partisipatif demokrasi untuk membuahkan hasil dengan biaya lebih rendah. Kebangkitan pengetahuan masyarakat di Eropa memiliki konsekuensi positif terbesar bagi politik dengan memperkuat aktivisme berorientasi-sebab-sebab dan

berorientasi pada warga negara. Tujuan utama dari e-government adalah efisiensi dan warga negara adalah pemangku kepentingan utama e-government.

Zhang Nan & Xunhua Guo & Guoqing Chen (2011) *Why adoption and use behavior of IT/IS cannot last?—two studies in China*. Dari model persamaan terstruktur (SEM) analisis menunjukkan kemampuan model untuk menafsirkan perilaku penerimaan pengguna TI di Cina baik sebelum dan setelah tahap awal. Hal ini kemudian disimpulkan bahwa kenaikan awal penerimaan pengguna biasanya didorong oleh instruksi wajib karena dengan karakteristik manajerial jarak kekuasaan panjang di organisasi Tionghoa, sedangkan penurunan pada periode kedua disebabkan oleh perubahan yang terjadi di beberapa pengakuan faktor dalam model, yang mungkin mencerminkan kurangnya fit antara teknologi dan gaya kerja. Dalam dua spesifik kasus yang diteliti, kurangnya kompatibilitas dan kondisi memfasilitasi membuat penerimaan pengguna menurun setelah periode awal ketika efek dari pelatihan dan instruksi wajib memudar.

## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1 Kerangka Konseptual

Sebelum kerangka konseptual dibuat, perlu disusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran merupakan bagan yang menunjukkan gambaran mengenai penyusunan penelitian berdasarkan pemaparan studi teoritik dan studi empirik.

Studi teoritik yaitu teori-teori yang relevan dalam permasalahan dalam penelitian, sedangkan studi empiris yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Gabungan antara studi teoritik dan empirik dalam penelitian ini menghasilkan variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut berupa variabel independen dalam penelitian ini mencakup kinerja pemerintah daerah, variabel dependen mencakup budaya sosial, budaya politik, budaya administrasi, dan variabel moderasi mencakup teknologi informasi. Setelah menetapkan variabel maka terbentuklah hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara atau proporsisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Hasil uji hipotesis secara statistik akan diinterpretasikan dalam pembahasan yang akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan kerangka proses berpikir, disusun kerangka konseptual yang menggambarkan variabel-variabel penelitian dan pengaruh antar variabel. Kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka pikir

Kerangka konseptual pada penelitian ini didasarkan pada *Technology organization environment (TOE) theory*, Model kesuksesan sistem teknologi informasi Delone & Mclean, dan Teori Kontingensi yang dikembangkan oleh Luder. Pengaruh antara variable-variabel penelitian ini mencakup budaya sosial, budaya politik, budaya administratif, teknologi informasi dan kinerja pemerintah daerah.

Budaya sosial diharapkan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Budaya sosial merupakan suatu nilai-nilai yang terbentuk pada masyarakat dalam memandang pentingnya keterlibatan pada proses anggaran sehingga mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pemilihan variabel budaya sosial sebagai variabel independen merujuk pada *Luder's contingency model* yang menyatakan bahwa dalam organisasi publik salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses pemerintahan adalah harapan masyarakat umum sebagai pengguna informasi. Harapan masyarakat mempengaruhi variabel struktur sosial, seperti budaya sosial dan daerah. Perilaku sosial seperti kebebasan berpendapat, hak politik, persepsi korupsi, pembangunan manusia, hak asasi manusia, dll yang akan membentuk sebuah budaya sosial yang ada di masyarakat (Bersth, 2013). Perilaku masyarakat di Indonesia terkait dengan budaya demokrasi yang telah diterapkan. Pemilihan langsung kepala daerah melalui tahapan pemilu, dimana masyarakat bebas untuk menyalurkan suaranya kepada calon yang menurut mereka telah dapat merepresentasikan harapan dan keinginan mereka atau sama sekali tidak memberikan suaranya adalah merupakan bukti konkrit suatu karakter demokrasi yang secara kontinyu terbangun di negara ini. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara

demokrasi, penyelenggara negara diharuskan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Perilaku-perilaku tersebutlah yang akan menjadi nilai sosial dalam masyarakat yang diharapkan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Budaya politik juga diharapkan mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Budaya Politik merupakan nilai-nilai yang terbentuk pada anggota legislatif (DPRD) sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan untuk menjalankan fungsinya dalam membuat kebijakan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Penggunaan variabel ini sebagai variabel independen merujuk pada *Luder's contingency model* yang menyatakan bahwa salah faktor yang mempengaruhi proses pemerintahan yaitu harapan dan perilaku aktor politik sebagai pengguna sekaligus produsen informasi. Politik dapat menjadi penengah antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah sistem untuk mengola organisasi. Politik juga dapat mempengaruhi akuntansi pemerintahan. Peran politik sangat berpengaruh kuat terhadap proses penganggaran (Luders; 1992). Peran legislatif adalah memastikan bahwa hak anggaran berjalan dengan baik dan aspirasi masyarakat telah dipenuhi ke dalam anggaran saat ini. Peran legislatif yang tepat cenderung menghindari penyalahgunaan anggaran. Perilaku-perilaku pada anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya membentuk suatu budaya politik. Peningkatan kinerja anggota legislatif dapat meningkat, jika di dalam dirinya terbentuk suatu kesadaran untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dengan kesadaran tersebut anggota legislatif akan membentuk budaya politik yang lebih bekerja lebih optimal yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja

pemerintah (Katzman, 2015; Upping, 2011; Zakaria, 2011). Namun, pendapat berbeda oleh beberapa peneliti yang mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh antara budaya politik dan kinerja pemerintah (Healy, 2010).

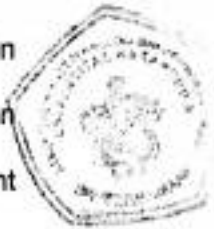
Budaya administratif juga diharapkan mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Budaya administratif adalah nilai-nilai yang melekat pada aparatur negara dalam menjalankan proses anggaran untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penggunaan budaya administrative sebagai variabel independen merujuk pada *Luders contingency model* yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi proses pemerintahan yaitu perilaku pelaku administrasi sebagai produsen informasi. Variabel variabel perilaku administratif mempengaruhi struktur administrasi, seperti budaya administrasi. Perilaku dalam menaati pedoman dalam aturan pemerintah membentuk budaya administratif yang menjadi nilai yang melekat pada penyelenggara negara dalam melakukan fungsinya. Budaya administrasi akan mempengaruhi kinerja pemerintah (Upping, 2011; Alba, 2011; Zakaria (2011); Andersen, 2009; Ahn et al, 2011).

Teknologi informasi diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah. Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang merupakan aplikasi program komputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran. Penggunaan teknologi informasi sebagai moderasi karena saat ini pemerintah telah mengembangkan sebuah teknologi informasi di pemerintahan yang dikenal dengan *e-government*. Tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik dan transparansi di dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi isu yang belum



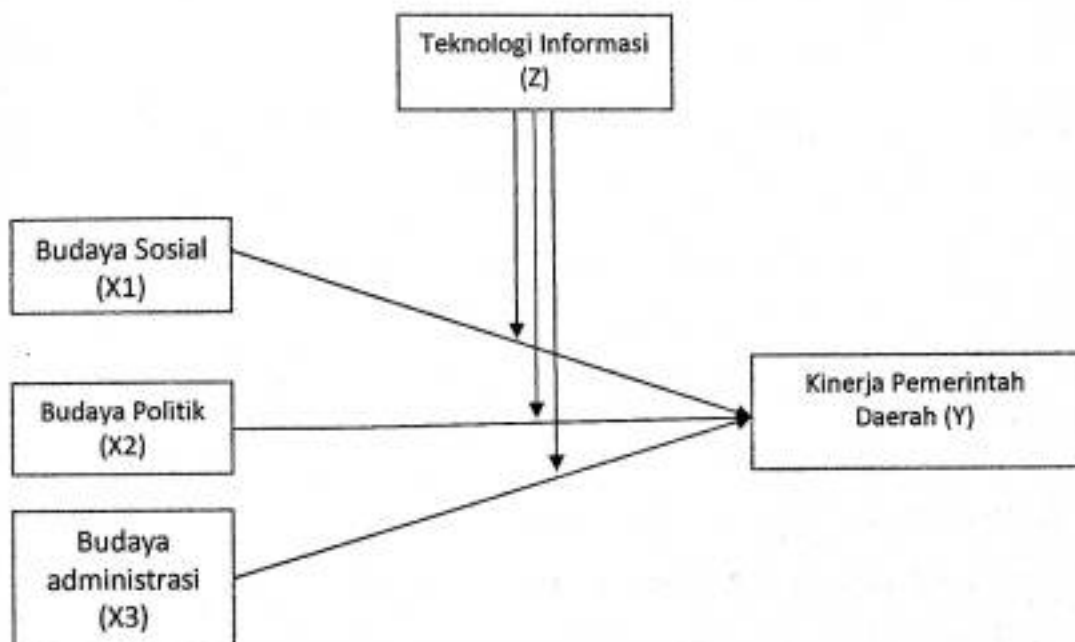
terselesaikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dengan menerapkan *e-government* terkhusus dalam pengelolaan anggaran yaitu *e-planning* dan *e-budgeting*. Namun, penggunaan *e-government* di beberapa Negara tidak selamanya berhasil. *Technology Organization environment* (TOE) teori mengungkapkan bahwa dalam mengadopsi teknologi perlu mempertimbangkan konteks teknologi, konteks organisasi, konteks lingkungan. Dalam pengimplementasian teknologi, delone & mcleane (2002) membuat sebuah model untuk mengukur kesuksesan suatu sistem. Model kesuksesan ini dilatarbelakangi karena pengadopsian sebuah teknologi tidak selamanya berhasil dan bertahan lama, oleh karena itu, peneliti mencoba memasukkan teknologi informasi dalam hal ini penggunaan *e-government* khususnya *e-planning* dan *e-budgeting* yang telah diterapkan dalam penganggaran publik di beberapa daerah di Indonesia sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah penerapan teknologi informasi ini mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Kinerja pemerintah daerah dalam konteks era teknologi saat ini diartikan sebagai pencapaian hasil dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan bantuan penggunaan teknologi informasi berbasis online. Song (2015) menilai kinerja pemerintah dalam era teknologi saat ini sebagai proses komprehensif yang didasarkan pada investigasi dan analisis sistematis dari konstruksi, operasi, manajemen, dan dampak situs web. Kinerja pemerintah diukur dengan 2 indikator: 1) *E-government completeness degree* yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dari segi internal pemerintah setelah penggunaan *e-government*. 2) yaitu *E-government participation degree*



yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dari segi external pemerintah terkait dengan interaksi publik setelah penggunaan e-government.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.2



**Gambar 3.2 Kerangka Konseptual**

### 3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

#### a. Hipotesis 1

Dalam memahami perubahan di sektor publik, Luder (1992) mengembangkan sebuah model yang dikenal dengan *Luder's Contingensi Model*. Model Luders dikembangkan lebih lanjut oleh Chan, Jones dan Luder

(1996) dimana kerangka tersebut menekankan tiga faktor penting yang mempengaruhi hasil proses inovasi, diantaranya yaitu: harapan masyarakat umum sebagai pengguna informasi. Harapan masyarakat mempengaruhi variabel struktur sosial, seperti budaya sosial.

Harapan masyarakat akan membentuk suatu perilaku yang terjadi pada masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Selanjutnya perilaku ini akan menjadi budaya sosial yang membentuk suatu nilai yang melekat pada masyarakat. Solihah (2017) mengungkapkan bahwa mekanisme dan teknik memberikan masukan dan mengakomodasi masukan masyarakat masih belum diketahui secara luas, baik meliputi implementasi metode-metode partisipatif dalam merancang maupun dalam memutuskan sebuah kebijakan bersama eksekutif.

Masyarakat mengharapkan adanya manfaat yang didapatkan dalam sebuah pengolahan pemerintahan. Nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam memandang pentingnya keikutsertaan dalam proses anggaran membentuk budaya sosial. Budaya sosial pada masyarakat nantinya akan mempengaruhi kinerja pemerintah (De Valle, 2001; Salim, 2017; Berman, 2013; Rafie, 2012; Upping 2011; Gomes et al. 2010; Ralston et al. 2008).

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Budaya sosial pada proses penganggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

### **b. Hipotesis 2**

Model kontingensi Luder menekankan adanya pengaruh politik dalam pengeolaan sebuah negara. Politik dapat menjadi penengah antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah sistem untuk mengola organisasi. Politik juga dapat mempengaruhi akuntansi pemerintahan. Peran politik sangat berpengaruh kuat terhadap proses penganggaran (Luders; 1992).

Perilaku-perilaku pada anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya membentuk suatu budaya politik. Peningkatan kinerja anggota legislatif dapat meningkat, jika di dalam dirinya terbentuk suatu kesadaran untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dengan kesadaran tersebut anggota legislatif akan membentuk budaya politik yang lebih bekerja lebih optimal yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja pemerintah (Katzman, 2015; Upping, 2011; Zakaria, 2011).

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Budaya politik pada proses penganggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

### **c. Hipotesis 3**

Dimensi manajerial (administratif) juga menjadi faktor penentu kinerja pemerintah (Luder, 1992). Pemikiran *good governance* menghendaki suatu cara pengelolaan keuangan yang berpola pada sistem manajemen keuangan terpusat pada sebuah model pengelolaan keuangan yang sejalan dengan ritme modernitas. Sudah menjadi hal yang wajib, rancangan pengelolaan keuangan tersebut harus dapat dituangkan kedalam perangkat peraturan yang sesuai

dengan "*good financial governance*" yang berupa keterbukaan dan keterlibatan masyarakat umum. Kontrol administratif dilakukan dengan memegang administrasi pemerintahan yang bertanggung jawab kepada legislatif untuk arus masuk dan arus keluar dana. Akuntabilitas serupa dilakukan di setiap tingkat pemerintahan dalam hierarki delegasi.

Perilaku dalam menaati pedoman dalam aturan pemerintah membentuk budaya administratif yang menjadi nilai yang melekat pada penyelenggara negara dalam melakukan fungsinya. Budaya administrasi akan mempengaruhi kinerja pemerintah (Upping, 2011; Alba, 2011; Zakaria (2011); Andersen, 2009; Ahn et al, 2011).

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Budaya administratif pada proses penganggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

#### **d. Hipotesis 4**

*E-Government* merupakan salah satu inovasi pemerintah dalam teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Fleischer (1990) dalam *Technology Organization Environment Theory* mengungkapkan bahwa dalam mengadopsi teknologi perlu memperhatikan konteks teknologi, konteks lingkungan konteks organisasi. Konteks teknologi mencakup teknologi internal dan eksternal yang relevan dengan perusahaan. Teknologi dapat mencakup peralatan maupun proses. Konteks organisasi mengacu pada karakteristik dan sumber daya perusahaan, termasuk ukuran perusahaan, tingkat sentralisasi, tingkat formalisasi, struktur manajerial, sumber daya manusia, hubungan di antara karyawan. Konteks lingkungan mencakup

ukuran dan struktur industri, pesaing perusahaan, konteks ekonomi makro, customer, isu-isu sosial budaya dan aturan pemerintah (Awa et al, 2015).

Isu-isu sosial budaya menjadi salah satu konteks lingkungan dalam teori TOE. Budaya sosial yang terbentuk pada masyarakat sebaiknya menjadi salah satu pertimbangan dalam pengadopsian sebuah teknologi dalam organisasi publik. Dalam mengadopsi sebuah teknologi membutuhkan anggaran yang besar dan diperoleh dari pajak masyarakat, sehingga pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah yang meningkat ketika memanfaatkan sebuah teknologi dianggap sebagai kesuksesan sebuah penerapan teknologi. Untuk mengukur kesuksesan tersebut, dapat menggunakan mode Delone & Mcleane.

Model Delone & Mcleane menekankan bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, ketika informasi yang disajikan mempunyai kualitas, baik dari informasi, pelayanan dan sistemnya. Organisasi pemerintah menuntut agar organisasi ini dapat memberi pelayanan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian juga telah dilakukan dalam bidang teknologi informasi. Gardan (2011) mengungkapkan bahwa *e-government* dapat membuat masyarakat untuk menjadi lebih terlibat dalam pemerintah dan memperoleh lebih banyak informasi tentang hukum, peraturan, kebijakan, dan jasa. Lee(2011) juga mengungkapkan bahwa budaya sosial akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menerapkan *e-government*. Perez (2005) mengungkapkan bahwa teknologi bisa meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi keuangan di pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4: Teknologi informasi memperkuat hubungan budaya sosial pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

#### **e. Hipotesis 5**

Keberhasilan implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh faktor kompleks. Kegagalan implementasi suatu sistem umumnya terjadi karena sistem tidak sesuai dengan proses bisnis dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi (Janson, 1996). Implementasi teknologi di pemerintahan banyak dihadapkan pada tantangan karena sifatnya yang kompleks dan adanya berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa penerapan teknologi dapat dilaksanakan dengan tepat melalui pertimbangan cermat. Efektivitas sistem bergantung pada banyak faktor seperti lingkungan organisasi, sistem informasi (Henver, et al, 2004).

Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan akan membentuk harapan politisi tentang efek dari pemberian layanan yang lebih transparan dalam membentuk variasi dalam karakter reformasi (Burrell 2011). Berkenaan dengan faktor-faktor penentu politik e-government, lingkungan politik yang menyeluruh dan kapasitas pemerintah sebagai konteks birokrasi telah diidentifikasi sebagai faktor-faktor penting yang menentukan kinerja e-government (Stier, 2015; Ahn 2011)

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5: Teknologi Informasi memperkuat hubungan budaya politik pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia

**f. Hipotesis 6**

Salah satu konteks pengadopsian dalam *Techology Orgnization Environment Theory* yaitu konteks organisasi. Konteks organisasi mengacu pada karakteristik dan sumber daya perusahaan, termasuk ukuran perusahaan, tingkat sentralisasi, tingkat formalisasi, struktur manajerial, sumber daya manusia, hubungan di antara karyawan.

Dalam konteks organisasi, Choi, et al (2014) menyatakan implementasi e-government banyak dihadapkan pada tantangan karena sifatnya yang kompleks dan adanya berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa *e-government* dapat dilaksanakan dengan tepat melalui pertimbangan cermat. Haidar, et al (2012) mengungkapkan faktor dalam memastikan keberhasilan dan penggunaan *e-government* misalnya; Keamanan dan kerahasiaan pengguna, keramahan pengguna, transparansi dan efisiensi dan kontinyu promosi website pemerintah ini adalah beberapa faktor yang perlu dilakukan oleh badan-badan ini. Efektivitas sistem bergantung pada banyak faktor seperti lingkungan organisasi, sistem informasi (Henver, at al, 2004).

Mamary, et al (2014); Ghanem & Sulaiman (2016), Lyengar et al (2015), Cuo et al 2014; Daoud (2013) dalam penelitiannya menghubungkan antara teknologi dengan kinerja manajerial dan hasilnya bedampak signifikan.

H6: Teknologi Informasi memperkuat hubungan budaya administrasi pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan desain survei dengan memberikan kuesioner kepada responden, setelah responden mengisi kuesioner, maka peneliti akan mengolah hasil dari pengisian kuesioner dan menjelaskan pengaruh antara variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

#### **4.2 Situs dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), DPRD dan masyarakat yang menjadi partisipan dalam proses penyusunan anggaran tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten di Indonesia dengan membagi wilayah yang mewakili Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian tengah dan Indonesia Bagian Timur.

Dalam penelitian ini, penentuan wilayah yang akan diteliti, ditentukan dengan langkah-langkah sebaga berikut:

1. Memisahkan antara Provinsi, Kota dan Kabupaten di Indonesia.
2. Memisahkan antara Provinsi, Kota dan Kabupaten di Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur.

3. Memisahkan antara Provinsi, Kota dan Kabupaten yang menggunakan E-Planning dan E-Budgeting
4. Mengurut fungsi anggaran antara Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Setelah melakukan langkah-langkah diatas, maka ditentukanlah daerah yang akan diteliti. Adapun daerah yang akan diteliti:

Tabel 4.1 Lokasi Penelitian

	Indonesia Barat	Indonesia Tengah	Indonesia Timur
Tingkat Provinsi	DKI Jakarta	Sulawesi Selatan	Papua
Tingkat Kota	Yogyakarta	Palopo	Jayapura
Tingkat Kabupaten	Bogor	Luwu Timur	Biak

#### 4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah masyarakat, anggota DPRD dan staff Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di beberapa wilayah tingkat provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri khusus yang ditetapkan oleh peneliti dalam menarik sampel yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat: Pemilihan sampel yang mewakili masyarakat, yaitu masyarakat yang tergabung dalam LSM pemerhati anggaran publik dan juga terlibat dalam proses perencanaan anggaran.
2. Anggota DPRD: Pemilihan sampel yang mewakili anggota legislatif/DPRD yaitu anggota DPRD pada badan anggaran (Banggar).
3. Birokrasi: Pemilihan sampel yang mewakili birokrasi yaitu staff SKPD yang terkait proses anggaran.

Ferdinand Agusty (2014) mengungkapkan bahwa ukuran sampel memegang peranan penting dalam estimasi dan interpretasi hasil. Ukuran sampel minimum adalah jumlah indikator dikali 5 - 10. Parameter dalam penelitian ini berjumlah 16, maka jumlah sampel minimum adalah 160 orang.

#### **4.4 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.
2. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah hasil kuesioner.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diperoleh dari anggota DPRD dan staff Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama atau dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

#### **4.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengajukan daftar pernyataan yang telah disusun dalam bentuk angket. Langkah yang dilakukan adalah menyebarkan daftar pernyataan kepada responden kemudian responden diminta untuk memberikan penilaian atas pernyataan yang diajukan, dengan pilihan jawaban yang disediakan, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Jika data telah terkumpul berupa data interval, kemudian dilakukan pengelompokan data menjadi berbagai bagian pengamatan kemudian dilakukan analisis data.

#### **4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **a. Variabel terikat (*dependent*)**

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja Pemerintah Daerah merupakan Pencapaian hasil dalam

merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan bantuan penggunaan teknologi informasi berbasis online.

Variabel ini diukur oleh 2 indikator: 1) *E-government completeness degree* yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dari segi internal pemerintah setelah penggunaan e-government. 2) yaitu *E-government participation degree* yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dari segi eksternal pemerintah terkait dengan interaksi publik setelah penggunaan e-government. Instrumen untuk mengukur data dan mengukur variabel kinerja pemerintah diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Song (2015)

#### **b. Variabel moderasi**

Variabel moderasi adalah tipe variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi pada penelitian ini yaitu Teknologi Informasi.

1. Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu teknologi yang merupakan aplikasi program komputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran. Variabel ini diukur oleh 3 indikator: 1) Kualitas Teknologi 2) Kualitas Informasi. 3) Kualitas Layanan. Instrumen untuk mengukur data dan mengukur variabel teknologi informasi diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Delone & Mclean (2002)

merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan bantuan penggunaan teknologi informasi berbasis online.

Variabel ini diukur oleh 2 indikator: 1) *E-government completeness degree* yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dari segi internal pemerintah setelah penggunaan e-government. 2) yaitu *E-government participation degree* yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dari segi eksternal pemerintah terkait dengan interaksi publik setelah penggunaan e-government. Instrumen untuk mengukur data dan mengukur variabel kinerja pemerintah diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Song (2015)

#### **b. Variabel moderasi**

Variabel moderasi adalah tipe variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi pada penelitian ini yaitu Teknologi Informasi.

1. Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu teknologi yang merupakan aplikasi program komputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran. Variabel ini diukur oleh 3 indikator: 1) Kualitas Teknologi 2) Kualitas Informasi. 3) Kualitas Layanan. Instrumen untuk mengukur data dan mengukur variabel teknologi informasi diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Delone & Mclean (2002)

### c. Variabel bebas (*Independent*)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

2. Budaya Sosial merupakan suatu nilai-nilai yang terbentuk pada masyarakat tentang perencanaan dan penganggaran publik. Indikator yang terbangun berdasarkan proses perencanaan dan penganggaran publik yang menjadi sebuah nilai pada masyarakat. Indikator tersebut, yaitu 1) Keterlibatan dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan, 2) Dengar Pendapat (*Public Hearing*), 3) Pengawasan anggaran. Instrumen untuk mengukur data dan mengukur variabel budaya sosial diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Del valle (2001)
3. Budaya Politik merupakan nilai-nilai yang terbentuk pada anggota legislatif (DPRD) tentang perencanaan dan penganggaran publik. Indikator yang terbangun berdasarkan proses perencanaan dan penganggaran publik yang menjadi sebuah nilai pada anggota DPRD. Indikator tersebut Variabel ini diukur oleh 3 indikator: 1) Penjaringan Aspirasi, 2) Pembahasan APBD, 3) Persetujuan APBD, 4) Pengawasan. Instrumen untuk mengukur data dan mengukur variabel budaya politik diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Del valle (2001); Djauhari (2015).
4. Budaya administratif adalah nilai-nilai yang melekat pada aparatur negara tentang perencanaan dan penganggaran publik. Indikator yang terbangun berdasarkan proses perencanaan dan penganggaran publik yang menjadi sebuah nilai pada masyarakat. Indikator tersebut Variabel

ini diukur oleh 4 indikator: 1) Perencanaan APBD, 2) Penyusunan APBD, 3) Penetapan APBD, 4) Pertanggungjawaban. Instrumen untuk mengukur data dan mengukur variabel budaya administrasi diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Del valle (2001)

#### 4.7 Teknik Analisis Data

##### 4.7.1 Pengujian Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner berisi tentang latar belakang demografis dari responden beserta pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut setiap variabel. Setiap variabel yang dibentuk tidak dapat diukur secara langsung atau disebut variabel laten atau konstruk (*unobserved variable*) (Ghozali, 2008). Dalam pengukuran konstruk yang dapat diukur adalah indikatornya melalui item-item pertanyaan dalam kuesioner.

Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator pernyataan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Untuk jawaban sangat setuju (SS) diberi skor : 5
- Untuk jawaban setuju (S) diberi skor : 4
- Untuk jawaban netral (KS) diberi skor : 3
- Untuk jawaban tidak setuju (TS) diberi skor : 2
- Untuk jawaban sangat tidak setuju (SS) diberi skor : 1

Selanjutnya dilakukan uji validitas, reliabilitas dan *goodness of fit*.



1. Uji Validitas adalah seberapa besar ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur (variabel) dalam melakukan fungsi ukurnya. Pada penelitian ini validitas menyangkut tingkat akurasi yang dicapai oleh sebuah indikator dalam mengukur sesuatu atau akuratnya pengukuran atas apa yang seharusnya diukur. Ferdinand (2016) menyatakan penelitian dengan menggunakan korelasi pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Pernyataan dikatan valid apabila *factor loading* di atas 0.5.
2. Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2013), Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60.
3. Uji *Goodness of fit* merupakan pengujian terhadap hubungan kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai kriteria *goodness of fit*. Ada beberapa indeks kesesuaian untuk menguji apakah sebuah model diterima atau diyakini:
  - a. *Chi-square statistic*, dimana model dipandang baik atau memuaskan bila nilai *chi-square*nya rendah. Semakin kecil nilai  $X^2$  semakin baik model itu dan diterima berdasarkan propabilitas dengan *cut of value* sebesar  $p > 0.05$  atau  $p > 0.10$
  - b. RMSEA (*The root Mean Square error of Approximation*), yang menunjukk n *goodness of fit* yang dapat diharakan bila model

diestimasi dalam populasi (Heir et al. 1998). Nilai RMSEA yang lebih kecil menunjukkan sebuah *close fit model* itu berdasarkan *degrees of freedom*.

- c. GFI ( *Goodness of Fit Index*), merupakan tingkatan kesesuaian model secara keseluruhan yang dihitung dari residual kuadrat model yang diprediksi dibandingkan dengan data observasi yang sebenarnya. GFI adalah ukuran non statistical yang mempunyai rentang nilai antara 0 (*poor fit*) -1.0 (*perfect fit*). Nilai yang tinggi dalam index menunjukkan sebuah *better fit*
- d. AGFI ( *Adjusted Goodness of Fit Index*) dimana tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar 0.90
- e. CMIN/DF, adalah *The Minimum Sample Disrepeny Function* yang dibagi dengan *Degree of Freedom*. MIN/DF tidak lain adalah statistic chi-square,  $X^2$  relatif kurang dari 2.0 atau 3.0 adalah indikasi dari *acceptable fit* antara model dan data.
- f. TLI ( *Tucker Lewis Index*), merupakan *incremental index* yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah *base line model*, dimana nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah  $\geq 0.95$ , dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan a *very good fit*.
- g. CFI ( *Competitive Fit Index*) merupakan kriteria *fit indices*, yang mengukur perbandingan antara model yang dihipotesiskan dengan

null model. Nilai CFI yang direkomendasikan untuk index fit adalah >0.90.

Tabel 4.2  
Kriteria Goodness of Fit Index

Goodnes of Fit Index	Cut of Value
X <sup>2</sup> - Chi Square	Diharapkan kecil
Probability	>0,05
RMSEA	< 0,08
GFI	> 0,90
AGFI	> 0,90
CMIN/DF	<2,00
TLI	> 0,90
CFI	> 0,90

Sumber. Heir et al (2010)

#### 4.7.2 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan metode *structural equation modeling* (SEM). Alasan yang mendasari digunakan SEM adalah:

1. Studi ini menggunakan variabel laten yang diukur melalui indikator,
2. SEM merupakan salah satu tehnik analisis multivariat yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks. SEM merupakan pendekatan terintegrasi antara analisis faktor, model structural dan analisis path (jalur).

kerangka penelitian secara full dapat digambarkan diagram jalur penelitian pada gambar 4.3 berikut:

nul model. Nilai CFI yang direkomendasikan untuk index fit adalah >0.90.

Tabel 4.2  
Kriteria Goodness of Fit Index

Goodnes of Fit Index	Cut of Value
X <sup>2</sup> - Chi Square	Diharapkan kecil
Probability	>0,05
RMSEA	< 0,08
GFI	> 0,90
AGFI	> 0,90
CMIN/DF	<2,00
TLI	> 0,90
CFI	> 0,90

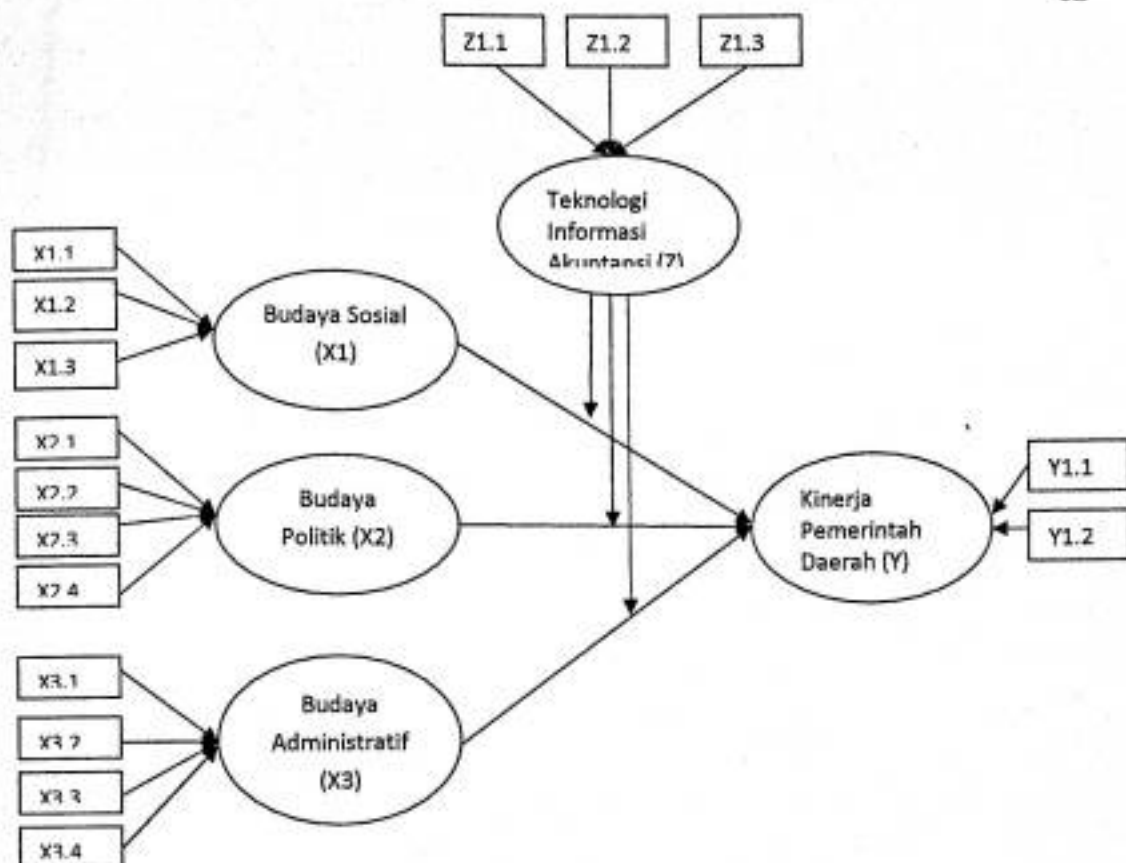
Sumber. Heir et al (2010)

#### 4.7.2 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan metode *structural equation modeling* (SEM). Alasan yang mendasari digunakan SEM adalah:

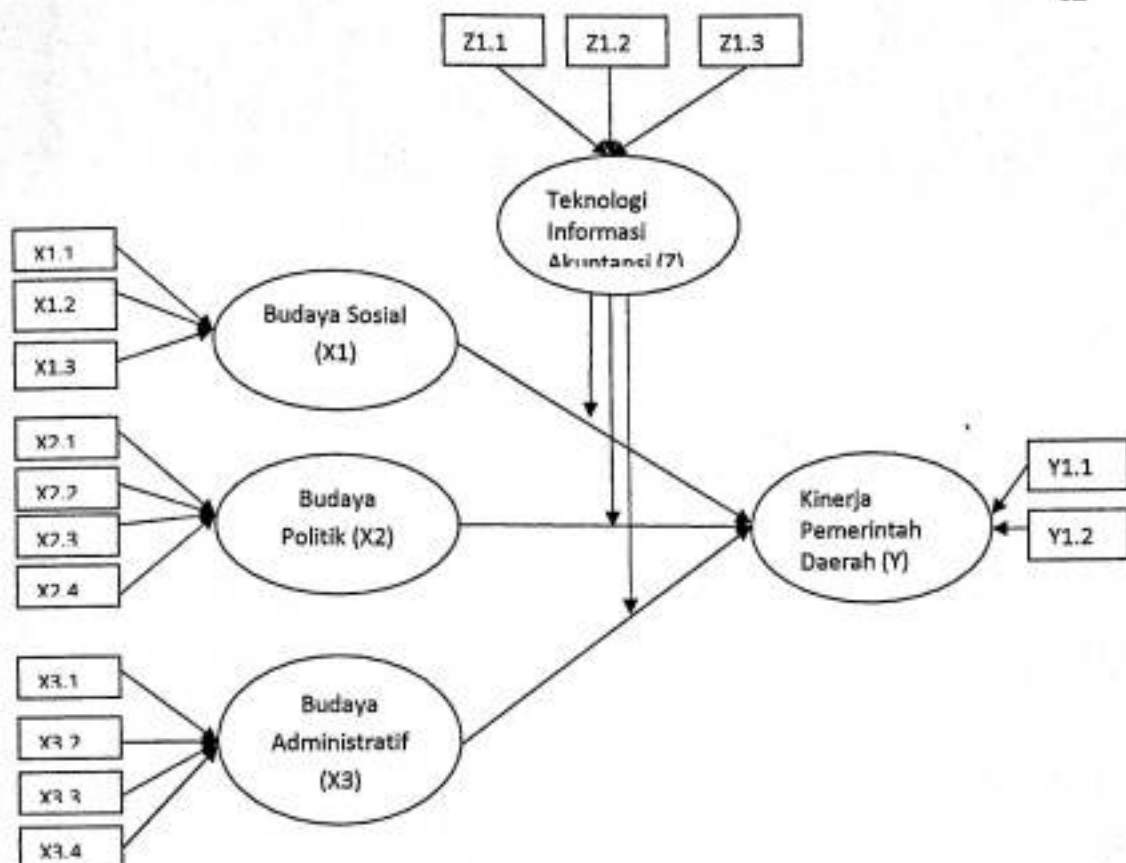
1. Studi ini menggunakan variabel laten yang diukur melalui indikator,
2. SEM merupakan salah satu tehnik analisis multivariat yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks. SEM merupakan pendekatan terintegrasi antara analisis faktor, model structural dan analisis path (jalur).

kerangka penelitian secara full dapat digambarkan diagram jalur penelitian pada gambar 4.3 berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Full Penelitian

**Keterangan****X<sub>1</sub> : Budaya Sosial**X<sub>1.1</sub> : Keterlibatan dalam MusrenbangX<sub>1.2</sub> : Dengar Pendapat (*public hearing*)X<sub>1.3</sub> : Pengawasan Anggaran**X<sub>2</sub> : Budaya Politik**X<sub>2.1</sub> : Penjaringan AspirasiX<sub>2.2</sub> : Pembahasan APBDX<sub>2.3</sub> : Persetujuan APBD



Gambar 4.1 Kerangka Full Penelitian

**Keterangan****X<sub>1</sub> : Budaya Sosial**X<sub>1.1</sub> : Keterlibatan dalam MusrenbangX<sub>1.2</sub> : Dengar Pendapat (*public hearing*)X<sub>1.3</sub> : Pengawasan Anggaran**X<sub>2</sub> : Budaya Politik**X<sub>2.1</sub> : Penjaringan AspirasiX<sub>2.2</sub> : Pembahasan APBDX<sub>2.3</sub> : Persetujuan APBD

$X_{2.4}$  : Pengawasan

**$X_3$  : Budaya Administratif**

$X_{3.1}$  : Perencanaan APBD

$X_{3.2}$  : Penyusunan APBD

$X_{3.2}$  : Penetapan APBD

$X_{3.2}$  : Pertanggungjawaban

**Z : Teknologi Informasi**

$M_1$  : Kualitas Teknologi

$M_2$  : Kualitas Informasi

$M_3$  : Kualitas Layanan

**Y : Kinerja Pemerintah Daerah**

$Y_{1.1}$ : E-Government Completeness Degree

$Y_{1.2}$ : E-Government Participation Degree

Dari diagram jalur penelitian diatas maka hubungan fungsional antar variabel dapat dituliskan dalam bentuk persamaan fungsi matematis sebagai berikut:

Hubungan Langsung:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots \dots \dots (1)$$

Hubungan Tidak Langsung

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, Z, Y_1) \dots \dots \dots (2)$$

$X_{2.4}$  : Pengawasan

**$X_3$  : Budaya Administratif**

$X_{3.1}$  : Perencanaan APBD

$X_{3.2}$  : Penyusunan APBD

$X_{3.2}$  : Penetapan APBD

$X_{3.2}$  : Pertanggungjawaban

**Z : Teknologi Informasi**

$M_1$  : Kualitas Teknologi

$M_2$  : Kualitas Informasi

$M_3$  : Kualitas Layanan

**Y : Kinerja Pemerintah Daerah**

$Y_{1.1}$  : E-Government Completeness Degree

$Y_{1.2}$  : E-Government Participation Degree

Dari diagram jalur penelitian diatas maka hubungan fungsional antar variabel dapat dituliskan dalam bentuk persamaan fungsi matematis sebagai berikut:

Hubungan Langsung:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots \dots \dots (1)$$

Hubungan Tidak Langsung

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, Z, Y_1) \dots \dots \dots (2)$$



Pola hubungan antar variabel seperti yang dikemukakan pada kerangka penelitian dan persamaan 1 dan 2 merupakan sistem persamaan simultan yang dapat ditulis dalam bentuk persamaan linier simultan sebagai berikut:

1. Pengaruh budaya sosial, budaya politik, budaya administrasi terhadap kinerja pemerintah daerah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_1 \dots \dots \dots (1a)$$

Dimana  $\alpha$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  adalah parameter yang akan ditaksir dan  $\epsilon_1$  adalah eror term

2. Teknologi Informasi memoderasi budaya sosial, budaya politik dan budaya administrasi terhadap kinerja pemerintah daerah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 (X_1 * Z) + \beta_5 (X_2 * Z) + \beta_6 (X_3 * Z) + \epsilon_1 \dots \dots \dots (2a)$$

Dimana  $\alpha$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_4$ ,  $\beta_5$ ,  $\beta_6$ , dan  $\beta_7$  adalah parameter yang akan ditaksir dan  $\epsilon_2$  adalah eror term

Model penelitian selain mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap endogen, namun juga mengetahui apakah variabel moderating berpengaruh terhadap hubungan variabel eksogen terhadap endogen. Ghazali (2013) menyebutkan variabel moderator menspesifikasikan bentuk dan atau besarnya hubungan antara variabel eksogen/predictor dan variabel dependen (criteria) sehingga disebut juga variabel spesifikasi. Jenis-jenis variabel moderator dapat dikelompokkan seperti tabel berikut:

Tabel 4.3: Jenis-jenis Variabel Moderasi

Keterangan	Berhubungan dengan kriterion dan/ atau predictor (signifikan)	Tidak berhubungan dengan kriterion dan/ atau predictor (tidak signifikan)
Tidak berinteraksi dengan Prediktor (tidak signifikan)	(1) Intervening, exogen, antesedent, prediktor	(2) Moderator (Homologizer)
Berinteraksi dengan Prediktor (signifikan)	(3) Moderator (Quasi Moderator)	(4) Moderator (Pure Moderator)

Sumber : Ghozali (2013)

Jika variabel moderator (Z) berhubungan dengan kriterion/endogen (Y) dan/ atau prediktor/eksogen (X) tetapi tidak berinteraksi dengan X maka variabel Z bukanlah moderator melainkan intervening, eksogen, antesenden dan/ atau prediktor. Secara konseptual variabel sebagaimana pada kuadran 2,3, dan 4 di indentifikasi sebagai moderator (Ghozali, 2013:224)

Keterangan:

1. Variabel Prediktor Moderasi : variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam model hubungan yang dibentuk
2. Variabel moderasi potensial (*Homologizer potensial*) : variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel prediktor dan variabel tergantung. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel prediktor dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel endogen.
3. *Quasi moderator* : variabel yang memoderasi hubungan antara prediktor dan variabel tergantung dimana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel prediktor sekaligus menjadi variabel prediktor.

4. *Pure moderator* : variabel yang memoderasi hubungan antara variabel prediktor dan variabel tergantung dimana variabel moderasi ini murni berinteraksi dengan variabel prediktor tanpa menjadi variabel prediktor.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang deskriptif karakteristik responden, deskriptif karakteristik variabel penelitian serta analisis *structural equation model (SEM)*. Deskriptif karakteristik responden meliputi: umur, latar belakang keilmuan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, masa kerja. Deskriptif karakteristik variabel akan menjelaskan bagaimana persepsi responden terhadap variabel penelitian seperti budaya sosial, budaya politik, budaya administratif, teknologi informasi dan kinerja pemerintah daerah. Sedangkan analisis SEM menjelaskan karakteristik data guna memenuhi syarat *goodness of fit* untuk dijadikan model analisis terhadap masalah penelitian.

#### 5.1 GAMBARAN UMUM RESPONDEN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data deskriptif yang diperoleh dari responden. Data deskriptif penelitian disajikan agar dapat dilihat profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian (Hair *et al.*, 2010). Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden perlu diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian.

Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 90 kuesioner setiap kelompok dengan total 270 penyebaran kuesioner, yang tidak

kembali sebanyak 58 kuesioner, yang kembali namun tidak dapat diolah dikarenakan pengisian kuesioner tidak selesai hingga pernyataan akhir sebanyak 16 orang, dan kuesioner yang kembali dapat diolah sebanyak 200 orang. Penyebaran kuesioner ini telah memenuhi jumlah sampel minimum yang disyaratkan yaitu sebanyak 160 orang.

**Tabel 5.1**  
**Distribusi Kuesioner**

Responden	Jumlah Kuesioner yang tersebar	Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	Jumlah Kuesioner yang Kembali namun tidak dapat diolah	Jumlah Kuesioner yang kembali dan dapat diolah
Masyarakat	90	39	9	42
DPRD	90	17	4	73
SKPD	90	2	3	85
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>58</b>	<b>16</b>	<b>200</b>

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Distribusi pada tabel 5.1 selanjutnya dirangkum pada tabel 5.2 yang terbagi menjadi masyarakat, anggota DPRD, dan SKPD. Distribusi pada tabel 5.2 memperlihatkan bahwa pengisian kuesioner oleh masyarakat sebanyak 42 orang, anggota DPRD sebanyak 73 orang, SKPD sebanyak 85 orang. Total kuesioner yang diolah sebanyak 200 kuesioner.

**Tabel 5.2Rangkuman Distribusi Persentase Responden**

Lokasi	Jumlah (Orang)
Masyarakat	42
DPRD	73
SKPD	85
<b>Total</b>	<b>200</b>

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

**a. Distribusi Persentase Responden Berdasarkan Tempat Penelitian**

Distribusi persentase responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.3. Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berasal dari Banggar DPRD sebanyak 73 orang, Dinas Pendidikan sebanyak 1 orang, Dinas Kesehatan sebanyak 2 orang, Dinas Perumahan, kawasan, pemukiman, pertanahan sebanyak 1 orang, Dinas Sosial sebanyak 1 orang, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi sebanyak 2 orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebanyak 2 orang, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebanyak 2 orang, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 1 orang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebanyak 2 orang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 2 orang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 2 orang, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan sebanyak 1 orang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 1 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 orang, Dinas Perkebunan sebanyak 1 orang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 2 orang, Dinas Kehutanan sebanyak 2 orang, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebanyak 2 orang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 29 orang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 26 orang, Sekertariat DPRD sebanyak 8 orang, Masyarakat sebanyak 42 orang.

**Tabel 5.3**  
**Distribusi Persentase Responden**

Lokasi	Jumlah (Orang)
Badan Anggaran DPRD	73
Dinas Pendidikan	1
Dinas Kesehatan	2
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.	1
Dinas Sosial.	1
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	2
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	2
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura.	2
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.	1
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.	2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	2
Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	2
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata.	1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	1
Dinas Kelautan dan Perikanan.	1
Dinas Perkebunan.	1
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.	2
Dinas Kehutanan.	2
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.	2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	29
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.	26
Sekretariat DPRD	2
Masyarakat	42
Jumlah	200

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

### b. Karakteristik Deskripsi Responden

Berdasarkan data yang disebar sebanyak 270 kuesioner, terdapat 200 data responden yang memenuhi syarat untuk dianalisis dan diperoleh informasi mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, latar belakang keilmuan, pendidikan terakhir, masa kerja, umur. Deskripsi responden disajikan pada tabel 5.4.

**Tabel 5.4**  
**Deskripsi Responden**

Kategori	Uraian	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Pria	133	66,5
	Wanita	67	33,5
	<b>Total</b>	200	100
Latar Belakang Keilmuan	Ekonomi/Akuntansi/Manajemen	62	31
	Hukum	46	23
	Sosial	41	20,5
	Lainnya	51	25,5
	<b>Total</b>	200	100
Pendidikan Terakhir	SLTA/D3	20	10
	S1	98	49
	S2	49	24,5
	S3	33	16,5
	<b>Total</b>	200	100
Masa Kerja	1-5 tahun	63	31,5
	6-10 tahun	99	49,5
	>10 tahun	38	19
	<b>Total</b>	200	100
Usia	20-30 tahun	55	27,5
	31-40 tahun	68	34
	40-50 tahun	47	23,5
	>50 tahun	30	15
	<b>Total</b>	200	100

Sumber: Pengolahan data primer (2019)



Data pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa responden:

#### 1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden didominasi oleh pria sebanyak 133 responden atau 66,5% dan wanita sebanyak 67 responden atau 33,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa pria lebih mendominasi proporsi sampel dari segi masyarakat, anggota DPRD, dan staff adm yang melaksanakan proses anggaran.

#### 2. Latar Belakang Keilmuan

Latar belakang keilmuan menunjukkan bahwa responden yang berlatar belakang ekonomi/akuntansi/manajemen sebanyak 62 orang atau 31%. Berlatar belakang keilmuan hukum sebanyak 46 orang atau 23%, berlatar belakang keilmuan sosial sebanyak 41 orang atau 20,5%, berlatar belakang keilmuan lainnya sebanyak 51 orang atau 25,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden di dominasi pada keilmuan ekonomi/akuntansi/manajemen yang mengindikasikan bahwa responden sudah relevan dengan fungsi dan tugas pokoknya sebagai pemerhati anggaran, pelaksana, dan pengawas pengelolaan keuangan.

#### 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan terakhir menunjukkan bahwa responden berlatar pendidikan S1 sebanyak 98 orang atau 49%, berlatar pendidikan S2 sebanyak 49 orang atau 24,5%, berlatar belakang pendidikan S3 sebanyak 33 orang atau 16,5%, dan berlatar pendidikan SLTA/D3 sebanyak 20 orang atau 10%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden di dominasi pada tingkat pendidikan S1. Hal ini dikarenakan untuk

menempati posisi staff adm SKPD, anggota DPRD, dan anggota LSM tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. Namun, sebaiknya tingkat pendidikan perlu ditingkatkan karena tingkat pendidikan yang tinggi dapat menjadi indikasi wawasan dan cara pandang dalam menilai dan memandang suatu permasalahan sehingga diharapkan dengan bekal pendidikan yang memadai mampu melakukan fungsinya dengan baik, sehingga dapat mengambil keputusan yang baik.

#### 4. Masa Kerja

Masa kerja menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja selama 6-10 tahun sebanyak 99 orang atau 49,5%, masa kerja selama 1-5 tahun sebanyak 63 orang atau 31,5%, masa kerja lebih dari 11 tahun sebanyak 38 orang atau 19%. Hal ini menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan masa kerja 6-10 tahun yang menandakan bahwa sudah cukup matang dan memiliki pengalaman dalam keterlibatannya pada proses anggaran sehingga diharapkan mampu memahami permasalahan pada proses anggaran.

#### 5. Usia

Usia menunjukkan bahwa responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 68 orang atau 34%, usia 20-30 tahun sebanyak 55 orang atau 27,5%, usia 40-50 tahun sebanyak 47 orang atau 23,5%, usia lebih dari 50 tahun sebanyak 30 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa responden berusia di atas usia produktif yang sudah cukup matang dan sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam hal proses anggaran.

## 5.2 ANALISIS DESKRIPTIF KARAKTERISTIK VARIABEL

Bagian ini akan menganalisis tabulasi jawaban responden secara deskriptif dengan alat analisis deskriptif menggunakan *structural equation model (SEM)*. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sebaran dari hasil penyebaran kuisioner mengenai variabel-variabel pada penelitian ini khususnya pada seluruh indikator. Variabel tersebut antara lain: budaya sosial, budaya politik, budaya administratif, system teknologi informasi, kinerja pemerintah daerah. Setiap variabel dianalisis kecenderungannya dengan melihat rata-rata *mean rank* masing-masing variabel yang sudah dikategorikan. Kemudian dilakukan perhitungan interval data dalam 5 (lima) kategori, yaitu: sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Untuk kategorisasi digunakan metode perhitungan interval kelas, dengan rumus:

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Nilai tertinggi adalah 5, sedangkan nilai terendah adalah 1, jumlah kelas = 5, maka nilai interval kelas sama dengan 0,8. Batas kategori kelas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Kategori Penilaian**

Interval	Kategori Penilaian	Nilai
$1,00 \leq X \leq 1,80$	Sangat Tidak Setuju	1
$1,81 \leq X \leq 2,60$	Tidak Setuju	2
$2,61 \leq X \leq 3,40$	Netral	3
$3,41 \leq X \leq 4,20$	Setuju	4
$4,21 \leq X \leq 5,00$	Sangat Setuju	5

Sumber: Hasil Olah Data (2019)

## 5.2 ANALISIS DESKRIPTIF KARAKTERISTIK VARIABEL

Bagian ini akan menganalisis tabulasi jawaban responden secara deskriptif dengan alat analisis deskriptif menggunakan *structural equation model (SEM)*. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sebaran dari hasil penyebaran kuisioner mengenai variabel-variabel pada penelitian ini khususnya pada seluruh indikator. Variabel tersebut antara lain: budaya sosial, budaya politik, budaya administratif, system teknologi informasi, kinerja pemerintah daerah. Setiap variabel dianalisis kecenderungannya dengan melihat rata-rata *mean rank* masing-masing variabel yang sudah dikategorikan. Kemudian dilakukan perhitungan interval data dalam 5 (lima) kategori, yaitu: sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Untuk kategorisasi digunakan metode perhitungan interval kelas, dengan rumus:

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Nilai tertinggi adalah 5, sedangkan nilai terendah adalah 1, jumlah kelas = 5, maka nilai interval kelas sama dengan 0,8. Batas kategori kelas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Kategori Penilaian**

Interval	Kategori Penilaian	Nilai
$1,00 \leq X \leq 1,80$	Sangat Tidak Setuju	1
$1,81 \leq X \leq 2,60$	Tidak Setuju	2
$2,61 \leq X \leq 3,40$	Netral	3
$3,41 \leq X \leq 4,20$	Setuju	4
$4,21 \leq X \leq 5,00$	Sangat Setuju	5

Sumber: Hasil Olah Data (2019)

Kategori jawaban sangat tidak setuju menggambarkan penolakan yang sangat terhadap pernyataan indikator bila dihubungkan dengan variabel penelitian. Kategori jawaban tidak setuju menggambarkan persepsi penolakan terhadap indikator variabel, namun dengan tekanan yang lebih rendah dari pernyataan sangat tidak setuju. Kategori jawaban kurang setuju menggambarkan persepsi penerimaan terhadap sejumlah indikator namun pada kondisi yang masih belum yakin disebabkan adanya indikasi keseimbangan preferensi informasi yang diterima atau dapat pula justru terjadi *mix*-informasi. Kategori jawaban setuju mengindikasikan adanya penerimaan terhadap pernyataan indikator. Kategori jawaban sangat setuju mengindikasikan bahwa responden dengan sangat yakin menganggap bahwa pernyataan indikator adalah sangat benar dan sesuai dengan apa yang dipersepsikan secara nyata.

Persepsi responden berdasarkan kategori penilaian pada tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa jika nilai tanggapan responden antara  $(1,00 \leq X \leq 1,80)$  berarti persepsi responden adalah sangat tidak setuju terhadap indikator-indikator dalam menjelaskan variabel tertentu. Demikian pula halnya jika rata-rata pilihan responden antara  $(4,21 \leq X \leq 5,00)$  berarti responden sangat setuju terhadap indikator-indikator yang menjelaskan variabel tertentu.

### **5.2.1 Deskripsi Variabel Budaya Sosial**

Budaya sosial merupakan suatu nilai-nilai yang terbentuk pada masyarakat dalam memandang pentingnya keterlibatan pada proses anggaran sehingga mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Nilai adalah ide kolektif tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, dan diinginkan atau tidak diinginkan dalam budaya

tertentu (Williams, 1970). Nilai yang ada pada masyarakat dalam proses anggaran sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara.

Keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran dapat melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang), dengar pendapat (*public hearing*), dan pengawasan anggaran. Proses ini menjadi indikator dalam melihat nilai yang benar atau salah. Nilai yang benar ketika proses ini dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada begitupun sebaliknya. Nilai inilah yang membentuk perilaku masyarakat sehingga menjadi suatu budaya sosial.

Secara umum, data pada tabel 5.6 menunjukkan total rata-rata jawaban responden untuk variabel budaya sosial adalah sebesar 3,95 yang mengindikasikan bahwa rata-rata responden menanggapi pernyataan terkait budaya sosial dengan persepsi setuju. Pernyataan yang diungkapkan dalam kuesioner merupakan pernyataan umum yang dapat diketahui oleh siapapun, yang ditandai dengan tidak terjadinya perbedaan hasil jawaban yang signifikan dari responden, walaupun responden tersebut berbeda kelompok. Interpretasi lebih lanjut terkait indikator variabel ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Indikator pertama yaitu keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (X1.1). Tiga pernyataan yang diajukan oleh peneliti terkait indikator ini, yaitu 1) masyarakat mengetahui tujuan Musrenbang, 2) Masyarakat memperoleh informasi terkait pelaksanaan Musrenbang, 3) Tokoh

Masyarakat, akademisi, organisasi non pemerintah ikut serta dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan, kecamatan, kota. Dari ketiga pernyataan ini ditanggapi oleh responden dengan rata-rata skor jawaban 3.89 atau berada pada kategori setuju yang berarti bahwa responden setuju bahwa pernyataan tersebut seharusnya benar terjadi pada proses anggaran.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan tahap awal dalam proses penganggaran. Musrenbang merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang menjadi suatu nilai yang ada dalam masyarakat pada proses anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada proses anggaran dan akan menjadi suatu budaya sosial.

2) Indikator *public hearing* (X1.2). Tiga pernyataan yang diajukan oleh peneliti terkait indikator ini yaitu 1) *Public hearing* dilaksanakan dalam proses perumusan kebijakan publik, 2) *Public hearing* dilaksanakan dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat, 3) *Public hearing* adalah salah satu komunikasi langsung antara masyarakat dan DPRD. Dari ketiga pernyataan ini ditanggapi oleh responden dengan skor jawaban 4,02 atau berada pada kategori setuju. Hal ini dapat dimaknakan bahwa

responden di beberapa daerah telah mengetahui adanya *public hearing* yang dilaksanakan dalam proses perumusan kebijakan publik. Pelaksanaan *public hearing* dapat mempertemukan masyarakat dengan DPRD untuk berkomunikasi langsung dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat yaitu *public hearing*. Dalam konteks tersebut, DPR/DPRD atau salah satu panitianya mengadakan *hearing* untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adanya pertemuan langsung antara pemerintah dan masyarakat akan membangun terjadinya hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat. *Public hearing* menjadi salah satu cara penelusuran fakta-fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya dilakukan dengan cara mengundang sejumlah orang yang dipandang bisa mewakili publik untuk didengar pendapatnya. Pada tataran partisipasi publik dalam proses kebijakan publik, UU No. 10 Tahun 2004 menjamin masyarakat untuk memberi masukan dalam setiap proses kebijakan publik, hanya saja mekanisme dan teknik memberikan masukan dan mengakomodasi masukan masyarakat masih belum diketahui secara luas, baik meliputi implementasi metode-metode partisipatif dalam merancang maupun dalam memutuskan sebuah kebijakan bersama eksekutif.

*Public hearing* merupakan diskusi publik atau dengar pendapat publik atau musyawarah antara warganegara dan pemerintah untuk mencari cara terbaik atau untuk memecahkan suatu persoalan publik, termasuk dalam memecahkan masalah/persoalan dalam proses perumusan kebijakan publik dengan melakukan komunikasi secara langsung antara pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan



tersebut. *Public hearing* merupakan salah satu sikap responsif legislatif (DPR/DPRD) dan eksekutif terhadap semangat perubahan dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam agenda reformasi dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang di dalamnya menempatkan partisipasi masyarakat (publik) menjadi ujung tombak dari perubahan itu. Melalui partisipasi diharapkan terjadinya perubahan hubungan antara rakyat dan negara yang lebih seimbang, yang dalam konteks ini lebih dibuka dan difasilitasinya ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan nasib dan kepentingan mereka, terutama dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam dengar pendapat atau *public hearing* menjadi suatu nilai yang ada dalam masyarakat pada proses anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada proses anggaran dan akan menjadi suatu budaya sosial.

3) Indikator Pengawasan anggaran (X1.3). Tiga pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait indikator ini yaitu : 1) Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan SKPD, 2) Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, 3) Masyarakat dapat mengakses laporan kinerja SKPD, 4) Masyarakat dapat mengakses laporan kinerja pemerintah daerah. Indikator ini ditanggapi oleh responden dengan skor jawaban 3,96 atau berada pada kategori setuju. Hal ini dapat dimaknakan bahwa responden setuju bahwa bunyi pernyataan tersebut harusnya benar terjadi dalam proses pengawasan anggaran oleh masyarakat.

Pengawasan anggaran menjadi perhatian yang penting dalam masyarakat. Saat ini telah banyak masyarakat yang tergabung dalam sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang concern dalam mengawasi kinerja pemerintah. Pada hakikatnya APBD dapat dikatakan sebagai anggaran untuk sektor publik yang merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, maka secara otomatis publik mempunyai hak dan wajib mengawasi pelaksanaan APBD. Dengan ikut dalam pengawasan publik terhadap pelaksanaan APBD, maka masyarakat dapat mengetahui konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dengan realisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Melalui pengawasan masyarakat juga dapat memastikan bahwa alokasi anggaran untuk kepentingan publik sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif, dalam hal ini pelaksanaan APBD tersebut tidak terjadi pemborosan, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang positif serta manfaat yang berarti bagi kepentingan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam dengan pengawasan APBD menjadi suatu nilai yang ada dalam masyarakat pada proses anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada proses anggaran dan akan menjadi suatu budaya sosial.

**Tabel 5.6**  
**Tanggapan Responden pada Variabel Budaya Sosial (X<sub>1</sub>)**

Indikator	Item	SS	S	KS	TS	STS	Total	Rata-Rata	
		5	4	3	2	1			
Keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan	1.1	108	77	7	5	3	200	4,41	
	1.2	28	93	51	25	3	200	3,59	
	1.3	39	91	42	26	2	200	3,69	
<b>Rata Rata X1.1</b>	<b>3,89 (Setuju)</b>								
Public Hearing	1.4	35	89	46	27	3	200	3,63	
	1.5	66	118	8	6	2	200	4,2	
	1.6	74	112	5	8	1	200	4,25	
<b>Rata Rata X1.2</b>	<b>4,02 (Setuju)</b>								
Pengawasan Anggaran	1.7	44	117	27	9	3	200	3,95	
	1.8	52	118	20	7	3	200	4,04	
	1.9	39	123	28	8	2	200	3,90	
<b>Rata Rata X1.3</b>	<b>3,96 (Setuju)</b>								
<b>Rata-Rata X1</b>	<b>3,95</b>								

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

### 5.2.2 Deskripsi Variabel Budaya Politik

Budaya Politik merupakan nilai-nilai yang terbentuk pada anggota legislatif (DPRD) sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan untuk menjalankan fungsinya dalam membuat kebijakan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Nilai adalah ide kolektif tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, dan diinginkan atau tidak diinginkan dalam budaya tertentu (Williams, 1970). Nilai yang ada pada anggota DPRD dalam proses anggaran sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara.

Keterlibatan DPPRD dalam proses anggaran melalui 1) Penjaringan Aspirasi, 2) Pembahasan APBD, 3) Persetujuan APBD, 4) Pengawasan. Proses ini menjadi indikator dalam melihat nilai yang benar atau salah. Nilai yang benar ketika proses ini dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada begitupun sebaliknya. Nilai inilah yang membentuk perilaku anggota DPRD sehingga menjadi suatu budaya politik.

Secara umum, data pada tabel 5.7 menunjukkan total rata-rata jawaban responden untuk variabel budaya politik adalah sebesar 4,09. Tabel 5.6 mengindikasikan bahwa rata-rata responden menanggapi pernyataan terkait budaya politik dengan persepsi setuju. Pernyataan yang diungkapkan dalam kuesioner merupakan pernyataan umum yang dapat diketahui oleh siapapun, yang ditandai dengan tidak terjadinya perbedaan hasil jawaban yang signifikan dari responden, walaupun responden tersebut berbeda kelompok. Interpretasi lebih lanjut terkait indikator variabel ini dijabarkan sebagai berikut:

1) Indikator Penjaringan Aspirasi (X2.1). Tiga pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait Indikator ini yaitu 1) Pelaksanaan Reses merupakan kewajiban bagi pemimpin maupun anggota DPRD yang dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. 2) Reses DPRD bertujuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. 3) DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil Reses/penjaringan aspirasi

masyarakat. Dari ketiga pernyataan ini ditanggapi oleh responden dengan skor jawaban 4,22 atau berada pada kategori setuju. Hal ini dapat dimaknakan responden setuju bahwa pernyataan yang diajukan seharusnya benar terjadi pada proses anggaran yang terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan pada anggota DPRD.

Anggota DPRD yang merupakan wadah di mana para wakil rakyat berbicara atas nama dan demi kebaikan rakyat, oleh karena itu masyarakat mengharapkan anggota Dewan mampu merasakan kepentingan rakyat. Komunikasi langsung antara masyarakat dan DPRD yang dilakukan pada masa reses dalam bentuk dialog-dialog, kunjungan lapangan atau mengumpulkan pendapat umum diharapkan dapat berjalan efektif. Kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan anggota DPRD sebagai bentuk pertanggung-jawaban moral dan politik terhadap konstituennya dalam rangka memperkuat komunikasi dengan masyarakat secara langsung.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada anggota DPRD pada proses anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yang telah diatur dalam UU dan akan membentuk budaya politik.

2) Indikator kedua pembahasan APBD (X2.2). Tiga pernyataan diajukan 1) Jangka waktu pembahasan anggaran terlalu singkat. 2) Pembahasan APBD oleh DPRD terkait dengan Prioritas Pemerintah Daerah. 3) Dalam pembahasan APBD, DPRD berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS. Dari ketiga pernyataan ini ditanggapi oleh responden dengan rata-rata skor jawaban 4.25 atau berada pada kategori setuju.

Hal ini dapat dimaknakan responden setuju bahwa pernyataan yang diajukan seharusnya benar terjadi pada proses anggaran yang terkait dengan fungsi anggaran pada anggota DPRD.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada anggota DPRD pada proses anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yang telah diatur dalam UU dan akan membentuk budaya politik.

3) Indikator ketiga yaitu persetujuan APBD (X2.3). Tiga pernyataan yang diajukan yaitu 1) Persetujuan APBD oleh DPRD dan kepala daerah sesuai dengan kalender anggaran. 2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif.3) APBD disahkan melalui peraturan kepala daerah, jika terjadi *deadlock*. Dari ketiga pernyataan ini ditanggapi oleh responden dengan rata-rata skor jawaban 4,00 atau berada pada kategori setuju. Hal ini dapat dimaknakan responden setuju bahwa pernyataan yang diajukan seharusnya benar terjadi pada proses anggaran yang terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan pada anggota DPRD.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada anggota DPRD pada proses anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yang telah diatur dalam UU dan akan membentuk budaya politik.

4) Indikator pengawasan (X1.4). Tiga pernyataan yang diajukan dalam indikator ini yaitu: 1) DPRD melaksanakan pengawasan aspek hasil reves dikaitkan dengan penetapan APBD. 2) DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh SKPD. 3) DPRD memberitahukan kepada satuan pengawas internal/instansi penyidik jika terjadi dugaan penyimpangan. Dari ketiga pernyataan ini ditanggapi oleh responden dengan rata-rata skor jawaban 3.96 atau berada pada kategori setuju. Hal ini dapat dimaknakan responden setuju bahwa pernyataan yang diajukan seharusnya benar terjadi pada proses anggaran yang terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan pada anggota DPRD.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada anggota DPRD pada proses anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Anggota DPRD seharusnya memahami fungsi pengawasan yang melekat pada anggota DPRD. DPRD memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan yaitu mengawasi peraturan daerah, APBD serta peratunran, keputusan, surat edaran kepala daerah. Hal inilah yang menjadi nilai dalam anggota DPRD. Nilai ini yang membentuk perilaku anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yang telah diatur dalam UU dan akan membentuk budaya politik.

**Tabel 5.7**  
**Tanggapan Responden pada Variabel Budaya Politik (X<sub>2</sub>)**

Indikator	Item	SS	S	KS	TS	STS	Total	Rata-Rata
		5	4	3	2	1		
Penjaringan Aspirasi Masyarakat	2.1	49	118	17	14	2	200	3,99
	2.2	80	109	8	1	2	200	4,32
	2.3	84	109	3	1	3	200	4,35
<b>Rata Rata X2.1</b>		4,22						
Pembahasan APBD	2.4	71	113	8	3	2	200	4,27
	2.5	70	114	11	4	1	200	4,22
	2.6	73	110	14	3	0	200	4,26
<b>Rata Rata X2.2</b>		4,25						
Persetujuan APBD	2.7	51	105	35	5	4	200	3,96
	2.8	46	129	19	5	1	200	4,07
	2.9	47	117	27	6	3	200	3,99
<b>Rata Rata X2.3</b>		4,00						
Pengawasan	2.10	33	105	47	10	5	200	3,75
	2.11	39	122	32	6	1	200	3,96
	2.12	55	133	9	2	1	200	4,19
<b>Rata Rata X2.4</b>		3,96						
<b>Rata-Rata X2</b>		4,10						

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

### 5.2.3 Deskripsi Variabel Budaya Administratif

Budaya administratif adalah nilai-nilai yang melekat pada aparatur negara dalam menjalankan proses anggaran untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Nilai adalah ide kolektif tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, dan diinginkan atau tidak diinginkan dalam budaya tertentu (Williams, 1970). Nilai yang ada pada masyarakat dalam proses anggaran sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri



terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara.

Perencanaan APBD, Penyusunan APBD, Penetapan APBD, Pertanggungjawaban menjadi indikator dalam melihat nilai yang benar atau salah dalam proses anggaran. Nilai yang benar ketika proses ini dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada begitupun sebaliknya. Nilai inilah yang membentuk perilaku staff administrasi sehingga menjadi suatu budaya administratif.

Secara umum, data pada tabel 5.8 menunjukkan total rata-rata jawaban responden untuk variabel budaya administratif adalah sebesar 4,21 yang mengindikasikan bahwa rata-rata responden menanggapi pernyataan terkait budaya administratif dengan persepsi setuju. Pernyataan yang diungkapkan dalam kuesioner merupakan pernyataan umum yang dapat diketahui oleh siapapun, yang ditandai dengan tidak terjadinya perbedaan hasil jawaban yang signifikan dari responden, walaupun responden tersebut berbeda kelompok. Interpretasi lebih lanjut terkait indikator variabel ini dijabarkan sebagai berikut:

1) Indikator Perencanaan (X3.1). Tiga pernyataan yang diajukan yaitu: 1) Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi dan program kepala daerah yang ingin dicapai. 2) RKPD memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya. 3) Dokumen KUA didasarkan pada dokumen RKPD dalam periode tersebut. Dari ketiga pernyataan tersebut ditanggapi oleh responden dengan skor jawaban 4,13 atau berada pada kategori setuju yang berarti bahwa responden setuju bahwa pernyataan tersebut seharusnya benar terjadi pada proses anggaran.

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara.

Perencanaan APBD, Penyusunan APBD, Penetapan APBD, Pertanggungjawaban menjadi indikator dalam melihat nilai yang benar atau salah dalam proses anggaran. Nilai yang benar ketika proses ini dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada begitupun sebaliknya. Nilai inilah yang membentuk perilaku staff administrasi sehingga menjadi suatu budaya administratif.

Secara umum, data pada tabel 5.8 menunjukkan total rata-rata jawaban responden untuk variabel budaya administratif adalah sebesar 4,21 yang mengindikasikan bahwa rata-rata responden menanggapi pernyataan terkait budaya administratif dengan persepsi setuju. Pernyataan yang diungkapkan dalam kuesioner merupakan pernyataan umum yang dapat diketahui oleh siapapun, yang ditandai dengan tidak terjadinya perbedaan hasil jawaban yang signifikan dari responden, walaupun responden tersebut berbeda kelompok. Interpretasi lebih lanjut terkait indikator variabel ini dijabarkan sebagai berikut:

1) Indikator Perencanaan (X3.1). Tiga pernyataan yang diajukan yaitu: 1) Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi dan program kepala daerah yang ingin dicapai. 2) RKPD memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya. 3) Dokumen KUA didasarkan pada dokumen RKPD dalam periode tersebut. Dari ketiga pernyataan tersebut ditanggapi oleh responden dengan skor jawaban 4,13 atau berada pada kategori setuju yang berarti bahwa responden setuju bahwa pernyataan tersebut seharusnya benar terjadi pada proses anggaran.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada staff SKPD pada proses anggaran. Proses perencanaan APBD dimana pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD dianggap telah dijalankan oleh pemerintah. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku staff SKPD dalam menjalankan tugasnya dan akan membentuk budaya administratif.

2) Indikator kedua yaitu penyusunan APBD (3.2). Dua pernyataan yang diajukan yaitu: 1) Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepkatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD, 2) Penyusunan RKA-SKPD, RAPBD mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati. Dari kedua pernyataan tersebut memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,28 atau pada kategori setuju yang berarti bahwa responden setuju bahwa pernyataan tersebut seharusnya benar terjadi pada proses anggaran.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada staff SKPD pada proses anggaran. Dalam proses penyusunan APBD oleh pemerintah yang didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan dan selanjutnya dokumen tersebut di serahkan kepada DPRD sesuai dengan kalender anggaran dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku staff SKPD dalam menjalankan tugasnya dan akan membentuk budaya administratif.

3) Indikator penetapan APBD (X3.3). Dua pernyataan yang diajukan yaitu 1) Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD, 2) Penetapan APBD dilaksanakan tepat waktu. Dari kedua pernyataan tersebut diperoleh rata-rata jawaban sebesar 4,32 atau pada kategori jawaban setuju yang berarti bahwa responden setuju bahwa pernyataan tersebut seharusnya benar terjadi pada proses anggaran.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada staff SKPD pada proses anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku staff SKPD dalam menjalankan tugasnya dan akan membentuk budaya administratif.

4) Indikator pertanggungjawaban (X3.4). Dua pernyataan yang diajukan yaitu 1) Setiap SKPD menyajikan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi anggaran, Catatan atas laporan keuangan. 2) Setiap SKPD menghasilkan laporan kinerja SKPD. Dari pernyataan tersebut ditanggapi responden dengan skor jawaban sebesar 4,13 atau pada kategori jawaban setuju yang berarti bahwa responden setuju bahwa pernyataan tersebut seharusnya benar terjadi pada proses anggaran.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada staff SKPD pada proses anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku staff SKPD dalam menjalankan tugasnya dan akan membentuk budaya administratif.

**Tabel 5.8**  
**Tanggapan Responden pada Variabel Budaya Administratif (X<sub>3</sub>)**

Indikator	Item	SS	S	KS	TS	STS	Total	Rata-Rata	
		5	4	3	2	1			
Perencanaan APBD	3.1	55	129	11	4	1	200	4,16	
	3.2	42	137	14	6	1	200	4,06	
	3.3	67	109	18	3	3	200	4,17	
<b>Rata Rata X3.1</b>	4,13								
Penyusunan APBD	3.4	101	92	6	0	2	200	4,45	
	3.5	67	102	21	8	2	200	4,12	
<b>Rata Rata X3.2</b>	4,28								
Penetapan APBD	3.6	91	102	5	0	2	200	4,4	
	3.7	71	112	14	1	2	200	4,24	
<b>Rata Rata X3.3</b>	4,32								
Pertanggungjawaban	3.8	59	117	17	7	0	200	4,14	
	3.9	56	119	19	6	0	200	4,12	
<b>Rata Rata X3.4</b>	4,13								
<b>Rata-Rata X3</b>	4,21								

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

#### 5.2.4 Deskripsi Variabel Teknologi Informasi

Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu teknologi yang merupakan aplikasi program komputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran. Teknologi informasi diukur oleh 1) Kualitas Teknologi 2) Kualitas Informasi. 3) Kualitas Layanan.

Secara umum, data pada tabel 5.9 menunjukkan total rata-rata jawaban responden untuk variabel teknologi informasi adalah sebesar 4,23 yang mengindikasikan bahwa rata-rata responden menanggapi pernyataan terkait system teknologi informasi dengan persepsi setuju yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut ini:

- 1) Kualitas Informasi (Z1.1). Empat pernyataan pada indikator ini yaitu: 1) Informasi yang didapatkan pada E-planning sesuai dengan data yang sebenarnya. 2) Informasi yang didapatkan pada E-Budgeting sesuai dengan data yang sebenarnya. 3) Data yang terdapat pada E-planning adalah informasi yang terkini. 4) Data yang terdapat pada E-Budgeting adalah informasi yang terkini. Dari empat pernyataan didapatkan rata-rata tanggapan responden yaitu dengan skor jawaban 4,26 atau berada pada kategori setuju. Hal ini dapat dimaknakan bahwa data dan informasi yang tersedia pada *e-planning* dan *e-budgeting* merupakan data yang lengkap dan terkini.
- 2) Kualitas Sistem (Z1.2). Empat pernyataan pada indikator ini yaitu: 1) Sistem E-Planning memberikan fasilitas perbaikan jika terjadi kegagalan sistem. 2) Sistem E-Budgeting memberikan fasilitas perbaikan jika terjadi kegagalan sistem. 3) Sistem E-planning mudah digunakan. 4) Sistem E-Budgeting mudah digunakan. Dari keempat pernyataan ini menunjukkan bahwa indikator ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,27 atau pada kategori setuju. Hal ini dapat dimaknakan bahwa sistem *e-planning* dan *e-budgeting* merupakan sistem yang mudah digunakan.

**Tabel 5.9**  
**Tanggapan Responden pada Variabel Teknologi Informasi (Z)**

Indikator	Item	SS	S	KS	TS	STS	Total	Rata-Rata	
		5	4	3	2	1			
Kualitas Informasi	Z1.1	67	127	6	0	0	200	4,30	
	Z1.2	71	117	11	0	1	200	4,28	
	Z1.3	63	112	22	2	1	200	4,17	
	Z1.4	72	116	9	3	0	200	4,28	
<b>Rata Rata Z1.1</b>	<b>4,26</b>								
Kualitas Sistem	Z1.5	79	114	5	2	0	200	4,35	
	Z1.6	65	120	12	3	0	200	4,23	
	Z1.7	66	120	10	3	1	200	4,23	
	Z1.8	65	121	10	4	0	200	4,23	
<b>Rata Rata Z1.2</b>	<b>4,27</b>								
Kualitas Layanan	Z1.9	62	125	11	2	0	200	4,23	
	Z1.10	53	123	17	7	0	200	4,11	
	Z1.11	66	121	10	3	0	200	4,25	
	Z1.12	73	119	7	1	0	200	4,32	
	Z1.13	46	142	9	3	0	200	4,15	
<b>Rata Rata Z1.3</b>	<b>4,21</b>								
<b>Rata-Rata X2</b>	<b>4,25</b>								

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

3) Kualitas Layanan (Z1.3). Lima pernyataan yang diajukan yaitu: 1) Penggunaan sistem merasa aman dalam mengakses data melalui sistem, 2) Pengguna sistem mempunyai pengetahuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. 3) Pemanfaatan teknologi mempermudah dalam menyebar informasi terkait laporan Keuangan, LRA, Neraca, dll dalam website yang resmi. 4) Sistem memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang dilakukan. 5) Sistem informasi didukung oleh teknisi yang professional jika memiliki masalah. Dari lima pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,21 atau pada kategori setuju.

### 5.2.5 Deskripsi Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan pencapaian hasil dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan bantuan penggunaan teknologi informasi berbasis online. Variabel ini diukur oleh 2 indikator: 1) *E-government completeness degree* yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dari segi internal pemerintah setelah penggunaan e-government. 2) yaitu *E-government participation degree* yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dari segi eksternal pemerintah terkait dengan interaksi publik setelah penggunaan e-government.

Secara umum, data pada tabel 5.10 menunjukkan total rata-rata jawaban responden untuk variabel kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 4,23 yang mengindikasikan bahwa rata-rata responden menanggapi pernyataan terkait kinerja pemerintah daerah dengan persepsi setuju yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut ini:

1) *E-Government completeness degree* (Y1.1). Lima pernyataan yang diajukan yaitu : 1) Keterlambatan penyusunan anggaran dapat dihindari sejak proses penganggaran berbasis elektronik. 2) Kebocoran anggaran APBD berkurang sejak proses penganggaran berbasis elektronik. 3) Terjadi penghematan anggaran sejak proses penganggaran berbasis elektronik. 4) Pencapaian kinerja anggaran yang efektif sejak proses penganggaran berbasis elektronik. 5) Pencapaian kinerja anggaran yang efisien sejak proses penganggaran berbasis elektronik. Dari lima pernyataan tersebut, diperoleh tanggapan responden yaitu dengan skor jawaban 4,27 atau berada pada kategori setuju.



**TABEL 5.10**  
**Tanggapan Responden pada Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

Indikator	Item	SS	S	KS	TS	STS	Total	Rata-Rata
		5	4	3	2	1		
<b>E-Government completeness degree</b>	Y1.1	67	127	6	0	0	200	4,30
	Y1.2	71	117	11	0	1	200	4,28
	Y1.3	63	112	22	2	1	200	4,17
	Y1.4	72	116	9	3	0	200	4,28
	Y1.5	79	114	5	2	0	200	4,35
<b>Rata Rata Y1.1</b>		4,27						
<b>E-Government participation degree</b>	Y1.6	66	120	10	3	1	200	4,23
	Y1.7	65	121	10	4	0	200	4,23
	Y1.8	62	125	11	2	0	200	4,23
	Y1.9	53	123	17	7	0	200	4,11
<b>Rata Rata Y1.2</b>		4,20						
<b>Rata-Rata Y</b>		4,23						

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

- 2) *E-Government participation degree*(Y1.2). Empat pernyataan yang diajukan yaitu: 1) Kemudahan masyarakat dalam mengawasi anggaran sejak proses penganggaran berbasis elektronik. 2) Peningkatan transparansi terhadap masyarakat sejak proses penganggaran berbasis elektronik. 3) Peningkatan akuntabilitas terhadap masyarakat sejak proses penganggaran berbasis elektronik. 4) Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sejak proses penganggaran berbasis elektronik. Dari empat pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden yaitu sebesar 4,20 atau pada kategori setuju.

### 5.3. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

#### 5.3.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Sosial (X1)

Pengujian validitas instrumen penelitian dengan menggunakan korelasi pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Pernyataan dikatan valid apabila *factor loading* di atas 0.5. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 5.11

Sementara itu, jika nilai Cronbach's Alpha > 0.60, menyimpulkan bahwa instrument penelitian reliabel. Cronbach's alpha pada variabel budaya sosial (X1) sebesar 0,856. Ini berarti  $0,856 > 0,60$  yang dapat diartikan bahwa instrument penelitian reliabel.

Tabel 5.11  
Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Sosial (X1.1)

Variabel	Item Pertanyaan	Factor loading	Keputusan Vaiditas	Keputusan Reliabilitas
Budaya Sosial (X1)	1.1	0,358	Tidak Valid	Reliabel
	1.2	0,600	Valid	
	1.3	0,599	Valid	
	1.4	0,538	Valid	
	1.5	0,676	Valid	
	1.6	0,600	Valid	
	1.7	0,630	Valid	
	1.8	0,615	Valid	
	1.9	0,650	Valid	

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan Tabel 5.10, terdapat 1 (satu) item tidak valid yaitu item X1.1 dengan nilai  $0.358 < \alpha = 0.5$ , sehingga item tersebut dikeluarkan dari model. Selanjutnya dilakukan pengujian ulang, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.12 selanjutnya:

Tabel 5.12  
Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Sosial (X1.1)

Variabel	Item Pertanyaan	Factor loading	Keputusan Vaiditas	Keputusan Reliabilitas
Budaya Sosial (X1)	1.2	0,600	Valid	Reliabilitas
	1.3	0,599	Valid	
	1.4	0,538	Valid	
	1.5	0,676	Valid	
	1.6	0,600	Valid	
	1.7	0,630	Valid	
	1.8	0,615	Valid	
	1.9	0,650	Valid	

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan Tabel 5.12, semua item dianggap valid karena *factor loading* di atas 0.5

### 5.3.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Politik (X2)

Pengujian validitas instrumen penelitian dengan menggunakan korelasi pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Pernyataan dikatan valid apabila *factor loading* di atas 0.5. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 5.12

Sementara itu, jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60, menyimpulkan bahwa instrument penelitian reliable. Cronbach's alpha pada variabel budaya politik (X2) sebesar 0,881. Ini berarti  $0,881 > 0,60$  yang dapat diartikan bahwa instrument penelitian reliabel.

Tabel 5.13  
Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Politik (X1.2)

Variabel	Item Pertanyaan	Factor loading	Keputusan Vaiditas	Keputusan Reliabilitas
Budaya Politik (X2)	2.1	0,418	Tidak Valid	Reliabel
	2.2	0,517	Valid	
	2.3	0,666	Valid	
	2.4	0,640	Valid	
	2.5	0,638	Valid	
	2.6	0,630	Valid	
	2.7	0,479	Tidak Valid	
	2.8	0,588	Valid	
	2.9	0,632	Valid	
	2.10	0,544	Valid	
	2.11	0,678	Valid	
	2.12	0,727	Valid	

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Tabel 5.14  
Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Politik (X1.2)

Variabel	Item Pertanyaan	Factor loading	Keputusan Vaiditas	Keputusan Reliabilitas
Budaya Politik (X2)	2.2	0,517	Valid	Reliabel
	2.3	0,666	Valid	
	2.4	0,640	Valid	
	2.5	0,638	Valid	
	2.6	0,630	Valid	
	2.8	0,588	Valid	
	2.9	0,632	Valid	
	2.10	0,544	Valid	
	2.11	0,678	Valid	
	2.12	0,727	Valid	

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan Tabel 5.13, terdapat 3 (tiga) item tidak valid yaitu item X2.1 dengan nilai  $0.418 < \alpha = 0.5$ , nilai X2.7 dengan nilai  $0.479 < \alpha = 0.5$ , dan nilai X2.8 dengan nilai  $0.488 < \alpha = 0.5$ , sehingga item tersebut dikeluarkan dari model.

Selanjutnya dilakukan pengujian ulang, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.14. Berdasarkan Tabel 5.14, semua item dianggap valid karena *factor loading* di atas 0.5

### 5.3.3 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Administratif (X3)

Pengujian validitas instrumen penelitian dengan menggunakan korelasi pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Pernyataan dikatan valid apabila *factor loading* di atas 0.5. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 5.14

Sementara itu, jika nilai Cronbach's Alpha  $> 0,60$ , menyimpulkan bahwa instrument penelitian reliable. Cronbach's alpha pada variabel budaya politik (X2) sebesar 0,881. Ini berarti  $0,815 > 0,60$  yang dapat diartikan bahwa instrument penelitian reliabel.

Tabel 5.15  
Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Administratif (X1.3)

Variabel	Item Pertanyaan	Factor loading	Keputusan Vaiditas	Keputusan Reliabilitas
Budaya Administratif (X3)	3.1	0.599	Valid	Reliabel
	3.2	0.453	Tidak Valid	
	3.3	0.577	Valid	
	3.4	0.596	Valid	
	3.5	0,518	Valid	
	3.6	0,468	Tidak Valid	
	3.7	0,575	Valid	
	3.8	0,505	Valid	
	3.9	0.439	Tidak Valid	

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan Tabel 5.15, terdapat 3 (tiga) item tidak valid yaitu item X3.1 dengan nilai  $0.499 < \alpha = 0.5$ , nilai X3.2 dengan nilai  $0.453 < \alpha = 0.5$ , dan nilai X3.6 dengan nilai  $0.468 < \alpha = 0.5$ , sehingga item tersebut dikeluarkan dari model. Selanjutnya dilakukan pengujian ulang, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.16. Berdasarkan Tabel 5.16, semua item dianggap valid karena *factor loading* di atas 0.5

Tabel 5.16  
Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Budaya Administratif (X1.3)

Variabel	Item Pertanyaan	Factor loading	Keputusan Vaiditas	Keputusan Reliabilitas
Budaya Administratif (X3)	3.1	0.599	Valid	Reliabel
	3.3	0.577	Valid	
	3.4	0.596	Valid	
	3.5	0.518	Valid	
	3.7	0.575	Valid	
	3.8	0.505	Valid	

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

#### 5.3.4 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Teknologi Informasi (Z)

Pengujian validitas instrumen penelitian dengan menggunakan korelasi pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Pernyataan dikatan valid apabila *factor loading* di atas 0.5. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 5.16

Jika nilai Cronbach's Alpha  $> 0.60$ , menyimpulkan bahwa instrument penelitian reliable. Cronbach's alpha pada variabel budaya politik (X2) sebesar 0.881. Ini berarti  $0.919 > 0.60$  yang dapat diartikan bahwa instrument penelitian reliabel.

Tabel 5.17  
Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Teknologi Informasi (Z)

Variabel	Item Pertanyaan	Factor loading	Keputusan Vaiditas	Keputusan Reliabilitas
Teknologi Informasi (Z)	Z.1	0.565	Valid	Reliabel
	Z.2	0.490	Tidak Valid	
	Z.3	0.599	Valid	
	Z.4	0.709	Valid	
	Z.5	0.750	Valid	
	Z.6	0.701	Valid	
	Z.7	0.713	Valid	
	Z.8	0.621	Valid	
	Z.9	0.778	Valid	
	Z.10	0.640	Valid	
	Z.11	0.756	Valid	
	Z.12	0.594	Valid	
	Z.13	0.581	Valid	

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Tabel 5.18  
Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Teknologi Informasi (Z)

Variabel	Item Pertanyaan	Factor loading	Keputusan Vaiditas	Keputusan Reliabilitas
Teknologi Informasi (Z)	Z.1	0.565	Valid	Reliabel
	Z.3	0.599	Valid	
	Z.4	0.709	Valid	
	Z.5	0.750	Valid	
	Z.6	0.701	Valid	
	Z.7	0.713	Valid	
	Z.8	0.621	Valid	
	Z.9	0.778	Valid	
	Z.10	0.640	Valid	
	Z.11	0.756	Valid	
	Z.12	0.594	Valid	
	Z.13	0.581	Valid	

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan Tabel 5.17, terdapat 1 (satu) item tidak valid yaitu item Z1.2 dengan nilai  $0.490 < \alpha = 0.5$ , sehingga item tersebut dikeluarkan dari model.

Selanjutnya dilakukan pengujian ulang, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.18. Berdasarkan Tabel 5.17, semua item dianggap valid karena *factor loading* di atas 0.5

### 5.3.5 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Pengujian validitas instrumen penelitian dengan menggunakan korelasi pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Pernyataan dikatan valid apabila *factor loading* di atas 0.5. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 5.18

Sementara itu, jika nilai Cronbach's Alpha  $> 0,60$ , menyimpulkan bahwa instrument penelitian reliable. Cronbach's alpha pada variabel kinerja pemerintah daerah (Y) sebesar 0,919. Ini berarti  $0,919 > 0,60$  yang dapat diartikan bahwa instrument penelitian reliable.

Tabel 5.19  
Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pernyataan Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Variabel	Item Pertanyaan	Factor loading	Keputusan Vaiditas	Keputusan Reliabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Y.1	0.768	Valid	Reliabel
	Y.2	0.668	Valid	
	Y.3	0.751	Valid	
	Y.4	0.696	Valid	
	Y.5	0.707	Valid	
	Y.6	0.632	Valid	
	Y.7	0.792	Valid	
	Y.8	0.728	Valid	
	Y.9	0.688	Valid	

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan Tabel 5.19, semua item dianggap valid karena *factor loading* di atas 0.5



#### 5.4 Analisis Fit-Model (*Full Model Analysis*)

Pada pengujian tahap awal ternyata tidak memenuhi kriteria *goodness-of-fit*. Dengan demikian model pengukuran tahap awal tersebut tidak cocok digunakan. Modifikasi dilakukan untuk memenuhi kriteria GOF dengan menghubungkan *error* variabel (Arbuckle & Worthe, 2009).

Model menghasilkan tingkat kesesuaian model yang cukup baik. Tabel 5.20 memperlihatkan tahapan revisi model ini beserta nilai masing-masing *goodness-of-fit* (GOF) index.

Tabel 5.20  
Evaluasi Kriteria *Goodness-of Fit*

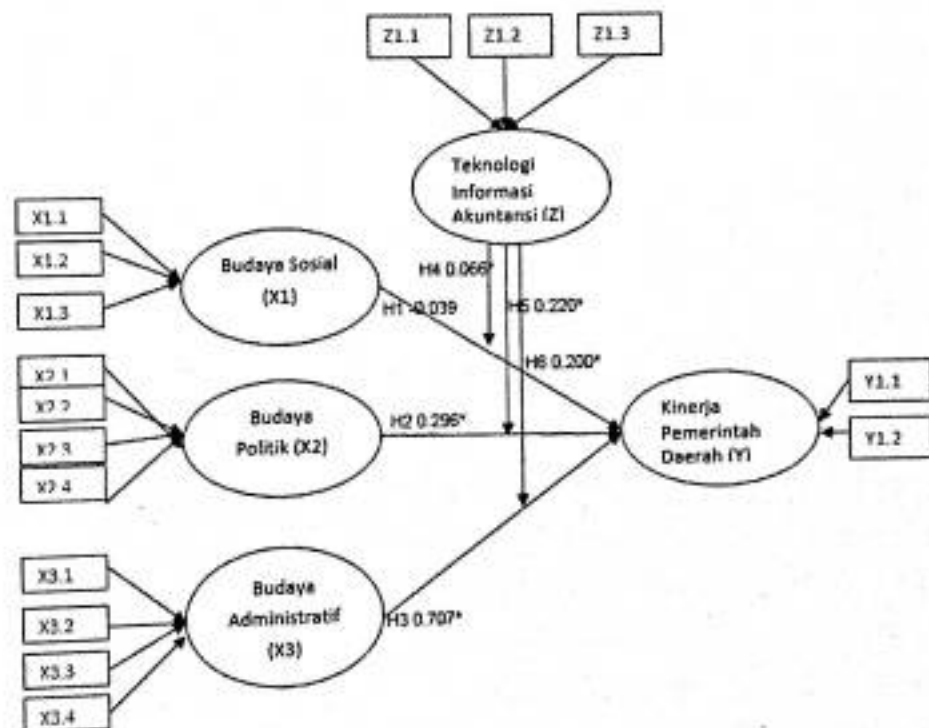
Goodness of Fit (GOF) Index	Cut-off Value	Nilai pada Model Penelitian	Keterangan
Chi-square ( $\chi^2$ )	Semakin kecil, Semakin baik	1764,777	Marginal
Probabilitas	> 0,05	0,000	Marginal
CMIN/DF	< 2,00	1,999	Fit
RMSEA	< 0,08	0,071	Fit
GFI	> 0,90	0,741	Marginal
TLI	> 0,90	0,980	Fit
CFI	> 0,90	0,988	Fit

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Dari tabel 5.20 dapat dilihat bahwa model secara keseluruhan memperlihatkan tingkat kesesuaian yang baik. Dengan demikian bahwa hasil pengujian *goodness of fit* pada model standar yang dipakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data yang diobservasi sudah sesuai atau konsisten dengan teori atau model yang akan diuji, sehingga model yang diajukan dinilai baik dan dapat diterima sebagai model yang sesuai dalam penelitian ini.

### 5.5 Analisis Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, semua model memenuhi persyaratan/dapat dikonfirmasi untuk dijadikan sebagai model pengukuran dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dijelaskan tentang hasil-hasil pengujian hipotesis. Dari 6 (enam) hipotesis yang diajukan, terdapat 4 hipotesis yang diterima dan 2 yang ditolak. Hasil estimasi model tersebut dapat dilihat pada gambar 5.1 halaman selanjutnya:



Gambar 5.1 Hasil Model Penelitian  
Keterangan \*\* = Signifikansi pada Taraf 0,05

Berdasarkan informasi angka-angka statistik yang dicantumkan dalam tabel 5.21 dan tabel 5.22 dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini:

**Tabel 5.21**  
**Hasil Pengujian Pengaruh Langsung**

Jenis Pengaruh		Estimate	S.E.	C.R.	P-Value	Ket
Variabel Independen	Variabel Ddependen					
Budaya Sosial	Kinerja Pemerintah Daerah	-0,039	0,043	-0,918	0,359	Tidak Signifikan
Budaya Politik	Kinerja Pemerintah Daerah	0.296	0,149	1,982	0,048	Signifikan
Budaya Administratif	Kinerja Pemerintah Daerah	0.707	0,124	5,713	0,000	Signifikan

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

**Tabel 5.22**  
**Hasil Pengujian Pengaruh Moderasi**

Varibel Independen	Variabel Moderasi	Variabel Dpenden	Estimate	S.E	C.R	P-Value	Keterangan
Budaya Sosial	Teknologi Informasi	Kinerja Pemerintah Daerah	0.066	0.021	3.181	0,001	Signifikan
Budaya Politik	Teknologi Informasi	Kinerja Pemerintah Daerah	0.220	0.060	3,648	0,000	Signifikan
Budaya Administratif	Teknologi Informasi	Kinerja Pemerintah Daerah	0.200	0.037	5,440	0,000	Signifikan

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

**Hipotesis 1 (Budaya Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah).** Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis ini diperoleh nilai *p-value* sebesar  $0,359 > 0,05$  (*cut of value*). Hasil ini menunjukkan terjadi hubungan yang tidak signifikan antara budaya sosial dengan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa naik atau turunnya budaya sosial tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

**Hipotesis 2 (Budaya Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah).** Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis ini diperoleh nilai *p-value* sebesar  $0,048 < 0,05$  (*cut of value*). Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika budaya politik meningkat maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat, begitupun sebaliknya.

**Hipotesis 3 (Budaya Administratif berpengaruh positif dan signifikan).** Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis ini diperoleh nilai *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  (*cut of value*). Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika budaya administratif meningkat maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat, begitupun sebaliknya.

**Hipotesis 4 (Teknologi Informasi mampu memoderasi Budaya Sosial terhadap Kinerja Pemerintah Daerah).** Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis ini diperoleh nilai *p-value* sebesar  $0,001 < 0,05$  (*cut of value*). Artinya, teknologi informasi

mampu memperkuat hubungan antara budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana saat hubungan langsung antara budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan.

**Hipotesis 5 (Teknologi Informasi mampu memoderasi Budaya Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah).** Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis ini diperoleh nilai *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  (*cut of value*). Artinya, teknologi informasi mampu memperkuat hubungan antara budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana saat hubungan langsung antara budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah ditemukan pengaruh positif signifikan.

**Hipotesis 6 (Teknologi Informasi mampu memoderasi Budaya Administratif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah).** Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis ini diperoleh nilai *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  (*cut of value*). Artinya, teknologi informasi mampu memperkuat hubungan antara budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana saat hubungan langsung antara budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah ditemukan pengaruh positif signifikan.

## BAB VI

### PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan menganalisis secara teoritik hasil dari analisis deskriptif, fakta pengamatan dan data sekunder, serta hubungan kausal antara variabel eksogen dengan variabel endogen, yang mengacu pada hasil pengujian *structural equation modeling*, baik hubungan secara langsung maupun hubungan tidak langsung.

#### 6.1 Pengaruh budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah

Merujuk pada data hasil penelitian ini, variabel budaya sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh yang tidak signifikan ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar  $0,359 > 0,05$  (*cut of value*). Artinya kontribusi variabel budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh, sehingga hipotesis 1 (Budaya sosial pada proses penganggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia) ditolak. Maknanya adalah, budaya sosial yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Budaya sosial merupakan suatu nilai-nilai yang terbentuk pada masyarakat terkait perencanaan dan penganggaran. Nilai adalah ide kolektif tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, dan diinginkan atau tidak diinginkan dalam budaya tertentu (Williams, 1970). Nilai yang ada pada masyarakat dalam proses anggaran,

sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, yang mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara.

Nilai tersebut termasuk pengertian bahwa perencanaan dan penganggaran, seyogyanya dilakukan melalui proses yang melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran dapat melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang), dengar pendapat (*public hearing*), dan pengawasan anggaran. Proses ini menjadi indikator dalam melihat nilai yang benar atau salah. Nilai yang benar ketika proses ini dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, begitupun sebaliknya. Nilai inilah yang membentuk perilaku masyarakat sehingga menjadi suatu budaya sosial.

Nilai yang pertama yaitu keterlibatan dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan tahap awal proses penganggaran. Musrenbang merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten/kota, sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

Nilai kedua yaitu *public hearing*, hal ini dapat dimaknakan bahwa responden di beberapa daerah, telah mengetahui adanya *public hearing* yang dilaksanakan dalam proses perumusan kebijakan publik. Pelaksanaan *public hearing* dapat

mempertemukan masyarakat dengan DPRD, untuk berkomunikasi langsung dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat. *Public hearing* merupakan diskusi publik atau dengar pendapat publik atau musyawarah antara warga negara dengan pemerintah, untuk mencari cara terbaik guna memecahkan suatu persoalan publik, termasuk memecahkan masalah/persoalan dalam proses perumusan kebijakan publik, dengan melakukan komunikasi secara langsung antara pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. *Public hearing* merupakan salah satu sikap responsif legislatif (DPR/DPRD) dan eksekutif terhadap semangat perubahan dan transparansi, sebagaimana diamanatkan dalam agenda reformasi dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang di dalamnya menempatkan partisipasi masyarakat (publik) menjadi ujung tombak dari perubahan itu.

Nilai yang ketiga dalam membentuk budaya sosial yaitu pengawasan anggaran. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengawasan anggaran menjadi perhatian yang penting dalam masyarakat. Saat ini telah banyak masyarakat yang tergabung dalam sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang *concern* dalam mengawasi kinerja pemerintah. Pada hakikatnya, APBD dapat dikatakan sebagai anggaran untuk sektor publik yang merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, secara otomatis publik mempunyai hak dan wajib mengawasi pelaksanaan APBD. Dengan partisipasi publik terhadap pelaksanaan APBD, maka masyarakat dapat mengetahui konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dengan realisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran.



Melalui pengawasan masyarakat juga dapat memastikan, bahwa alokasi anggaran untuk kepentingan publik sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini, tidak terjadi pemborosan pada pelaksanaan APBD tersebut. Selain itu, pelaksanaan APBD juga tepat sasaran, dan memberikan dampak yang positif serta manfaat yang berarti bagi kepentingan publik.

Semangat dari pelaksanaan Musrenbang, *Public Hearing* dan pengawasan anggaran, sejalan dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Secara sederhana, demokrasi ditandai dengan adanya ruang untuk mengeluarkan pendapat, usulan, atau kritik bagi seluruh elemen masyarakat agar segala sisi aspirasi masyarakat dapat diserap. Mekanisme yang diadakan oleh pemerintah dalam mengumpulkan informasi dan aspirasi masyarakat, membawa harapan bahwa apa yang telah diprogramkan pada pertemuan tersebut, dapat diakomodasi pada anggaran berikutnya.

Dari hasil deskriptif responden ditemukan rata-rata responden setuju bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang telah melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, organisasi non pemerintah, dan memperoleh informasi terkait pelaksanaan Musrenbang. Rata-rata responden juga setuju, bahwa *public hearing* dapat menjadi salah satu wadah bagi masyarakat dalam berkomunikasi dengan anggota DPRD dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, rata-rata responden juga menyetujui bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan anggaran dengan mengakses laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD maupun laporan keuangan Pemda.

Berdasarkan proses-proses di atas, maka akan terbangun nilai di dalam masyarakat bahwa proses anggaran yang baik dan benar adalah, ketika proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nilai inilah yang membentuk perilaku masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada proses anggaran dan akan menjadi suatu budaya sosial.

Budaya sosial yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat akan mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, saat nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut, dijalankan dengan baik dan benar. Namun keterlibatan masyarakat dalam proses ini, hanyalah sekedar memenuhi prasyarat dari aturan pemerintah. Usulan dari bawah (*bottom up*) melalui mekanisme Musrenbang selalu hanya menjadi formalitas saja. Akibatnya, proses perencanaan anggaran daerah di Indonesia, pada umumnya hanya bersifat sosialisasi. Dalam pelaksanaan *public hearing* yang terjadi di lapangan, juga ditemukan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam *public hearing*, juga tidak mampu mengakomodasi perubahan apapun. Pernyataan ini didukung oleh Asian development Bank yang mengungkapkan, bahwa pertemuan *public hearing* hanya sah sebagai cap karet.

Dari hasil pengamatan di lapangan, juga ditemukan masih adanya paradigma di beberapa kalangan aparat pemerintah atau pejabat publik, yang menyatakan bahwa dokumen yang berkaitan dengan anggaran tersebut merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak dapat secara bebas diakses oleh publik. Dari sini terlihat, bahwa transparansi dan akuntabilitas publik masih belum dirasakan oleh masyarakat.

Harryanto (2017) mengungkapkan, bahwa beberapa aspirasi yang dikumpulkan tidak sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga akan disingkirkan. Asian development Bank (2007) juga menemukan, bahwa proses pertemuan konsultatif tidak terkait dengan alokasi apapun. Proses dalam praktiknya, hanya menghasilkan daftar harapan. Meskipun peraturan harus melaksanakan peran masing-masing pihak terhadap proses penyusunan anggaran, masyarakat sebagai pemilih masih dalam posisi yang sangat lemah. Hanya legislatif dan eksekutif yang berperan penting dan langsung dalam proses penyusunan anggaran. Sementara masyarakat, hanya bertindak sebagai pengamat.

Beberapa penelitian sebelumnya sejalan dengan hasil penelitian ini, yang mengatakan, bahwa keterkaitan pengaruh budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh. Kim (2008), di mana pada penelitiannya menemukan, bahwa di beberapa negara terdapat tingkat kemiskinan yang tinggi dan status sosial ekonomi yang rendah, kurang semangat masyarakat terlibat langsung dalam proses pemerintahan. Masyarakat lebih sering pesimis pada keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan, sehingga sangat sulit untuk mempengaruhi kinerja pemerintah. Secara teori, pemerintah harusnya merangkul masyarakat. Pada kenyataannya, pemerintah merasa yang paling benar dalam mengambil keputusan. Masalah tingkat kepercayaan atau keyakinan yang rendah; partisipasi yang rendah; kurangnya pro-aktivitas; nilai/norma publik yang rendah atau buruk menjadi fenomena yang ditemukan pada sektor publik. Mengelola keragaman bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi keanekaragaman harus dipromosikan secara aktif bersamaan

dengan rasa memiliki komitmen, rasa memiliki yang setara. Hal ini kurang ditemui di Asia dan sedang diperlukan untuk membangun nilai sosial di sektor publik.

Peran masyarakat sipil perlu direvitalisasi; kemitraan sektor publik dengan masyarakat sipil adalah strategi penting bagi banyak negara, yang ingin memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Perlu lebih banyak pengawasan oleh masyarakat sipil. Perlu lebih banyak keterlibatan warga negara, partisipasi lebih aktif untuk membawa masalah sosial ke dalam agenda publik, melalui kesadaran publik.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Noordegraaf dan Vermeulen (2010) yang menyatakan bahwa, organisasi publik diharapkan mampu menyelesaikan atau mengurangi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, baik dari segi kemiskinan, infrastruktur maupun budaya yang terbentuk di masyarakat yang menyimpang dari aturan yang ada. Selama beberapa dekade terakhir, sebagian besar organisasi pemerintah telah ditata ulang untuk meningkatkan budaya social, yang mengarah pada keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Pemerintah seharusnya tidak mengabaikan budaya yang tercipta di masyarakat, sehingga budaya tersebut dapat mempengaruhi kinerja pemerintah. Budaya dapat (harus) diubah, namun pertanyaan yang muncul yaitu, apakah budaya dapat diubah dengan mudah dan cepat atau sulit dan lambat? Terutama fokus perubahan jangka pendek atau perubahan jangka panjang.

De Valle (2001) juga mengungkapkan, pada dasarnya, di negara demokrasi kepentingan masyarakat di atas segalanya. Namun, mereka tidak pernah memiliki akses untuk mengeluh dan bahkan menolak anggaran, sehingga masyarakat tidak dapat mempengaruhi kinerja pemerintah. Pratiwi (2015) dalam penelitiannya juga

menemukan, bahwa dalam proses penyusunan APBD, disediakan ruang publik untuk berpartisipasi dalam menyusun program dan proyek melalui penyaringan aspirasi masyarakat. Namun usulan masyarakat tersebut kalah bertarung dengan agenda institusi (Pemda dan DPRD) yang penuh muatan politik. Seharusnya, usulan masyarakat dirumuskan sebagai pijakan dalam menetapkan kebijakan umum anggaran, tetapi yang muncul dalam format APBD adalah belanja pengadaan mobil dinas pejabat dan anggota DPRD.

Penelitian ini menolak penelitian Salim, 2017; Berman, 2013; Rafie, 2012; Upping 2011; Gomes et al. 2010; Ralston et al. 2008 yang menemukan bahwa budaya sosial memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hal ini memungkinkan untuk terjadi, karena setiap negara memiliki budaya sosial yang terbentuk dari lingkungannya masing-masing.

Hasil penelitian ini mendukung teori kontingensi, yang mengklaim bahwa tidak ada jawaban terbaik yang berlaku terhadap semua masalah yang muncul. Teori kontingensi menyatakan, tidak ada rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang dapat diterapkan secara efektif untuk semua kondisi organisasi. Namun, sebuah sistem pengendalian tentunya hanya efektif untuk situasi atau organisasi/perusahaan/pemerintahan tentunya. Sistem akuntansi yang tepat tergantung pada keadaan khusus di mana organisasi tersebut berada.

Cara mengolah suatu organisasi setiap daerah atau negara memiliki perbedaan yang akan mengakibatkan hasil yang berbeda di setiap negara. Di Indonesia, budaya sosial yang terbentuk dari nilai masyarakat belum mampu mempengaruhi kinerja pemerintah, karena masyarakat belum mempunyai posisi yang

kuat dalam mekanisme anggaran. Mekanisme anggaran ditentukan oleh legislatif dan birokrasi, sehingga peran masyarakat hanya sebagian kecil walaupun telah diatur dalam aturan pemerintah bahwa masyarakat dapat terlibat pada proses anggaran melalui musrenbang, *public hearing* dan pengawasan. Secara konseptual situasi ini sudah benar bahwa aspirasi masyarakat akan terwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam perjalanannya wakil rakyat memiliki dua aspek kepentingan yaitu kepentingan partai dan kepentingan masyarakat. Tekanan kepentingan partai sering mengakibatkan kepentingan masyarakat terabaikan

Implikasi hasil penelitian ini terhadap kinerja pemerintah daerah, di mana ditemukan tidak signifikannya hubungan budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah, merupakan suatu hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Perlunya keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses anggaran, yang tidak hanya sebatas memenuhi aturan yang ada, namun aspirasi masyarakat dapat didengarkan dan dituangkan dalam perumusan anggaran. Dengan dibentuknya sistem keterlibatan masyarakat yang lebih luas, akan membentuk nilai-nilai pada masyarakat, yang akan menjadi suatu budaya sosial yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

## **6.2 Pengaruh budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah**

Merujuk pada data hasil penelitian ini, variabel budaya politik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh signifikan ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar  $0,048 < 0,05$  (*cut of value*), sehingga hipotesis 2 (Budaya politik pada proses penganggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia) diterima. Maknanya adalah, jika budaya

politik yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada anggota legislatif/DPRD dalam proses penyusunan anggaran meningkat, maka kinerja pemerintah daerah juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika budaya politik dalam proses penyusunan anggaran menurun, maka kinerja pemerintah daerah menurun.

Budaya politik merupakan suatu nilai-nilai yang terbentuk pada anggota DPRD tentang perencanaan dan penganggaran. Nilai adalah ide kolektif tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, dan diinginkan atau tidak diinginkan dalam budaya tertentu (Williams, 1970). Nilai yang ada pada anggota DPRD dalam proses anggaran sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara.

Nilai tersebut termasuk pengertian, bahwa perencanaan dan penganggaran seyogyanya sebuah proses yang menyebarkan langkah-langkah yang telah dilakukan politisi (DPRD) dalam menyusun dan menetapkan anggaran. Proses yang dilakukan yaitu 1) Indikator Penjaringan, hal ini dapat dimaknakan bahwa DPRD yang merupakan wadah, di mana para wakil rakyat berbicara atas nama dan demi kebaikan rakyat, oleh karena itu masyarakat mengharapkan anggota Dewan mampu merasakan kepentingan rakyat. Komunikasi langsung antara masyarakat dan DPRD yang dilakukan pada masa reses dalam bentuk dialog-dialog, kunjungan lapangan atau mengumpulkan pendapat umum, diharapkan dapat berjalan efektif. Kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan anggota DPRD, sebagai bentuk pertanggung-jawaban moral dan politik terhadap konstituennya dalam rangka

politik yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada anggota legislatif/DPRD dalam proses penyusunan anggaran meningkat, maka kinerja pemerintah daerah juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika budaya politik dalam proses penyusunan anggaran menurun, maka kinerja pemerintah daerah menurun.

Budaya politik merupakan suatu nilai-nilai yang terbentuk pada anggota DPRD tentang perencanaan dan penganggaran. Nilai adalah ide kolektif tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, dan diinginkan atau tidak diinginkan dalam budaya tertentu (Williams, 1970). Nilai yang ada pada anggota DPRD dalam proses anggaran sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara.

Nilai tersebut termasuk pengertian, bahwa perencanaan dan penganggaran seyogyanya sebuah proses yang menyebarluaskan langkah-langkah yang telah dilakukan politisi (DPRD) dalam menyusun dan menetapkan anggaran. Proses yang dilakukan yaitu 1) Indikator Penjaringan, hal ini dapat dimaknakan bahwa DPRD yang merupakan wadah, di mana para wakil rakyat berbicara atas nama dan demi kebaikan rakyat, oleh karena itu masyarakat mengharapkan anggota Dewan mampu merasakan kepentingan rakyat. Komunikasi langsung antara masyarakat dan DPRD yang dilakukan pada masa reses dalam bentuk dialog-dialog, kunjungan lapangan atau mengumpulkan pendapat umum, diharapkan dapat berjalan efektif. Kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan anggota DPRD, sebagai bentuk pertanggung-jawaban moral dan politik terhadap konstituennya dalam rangka





memperkuat komunikasi dengan masyarakat secara langsung. 2) pembahasan APBD, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembahasan APBD oleh anggota DPRD, telah sesuai dengan aturan dan sasaran. 3) Indikator persetujuan, hal ini menunjukkan, bahwa persetujuan APBD oleh DPRD dan pemerintah daerah telah sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana persetujuan APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan. Dan bila saat tahun anggaran berjalan telah berakhir dan belum menyetujui, maka akan dikenakan sanksi administratif. 4) Indikator pengawasan, hal ini menunjukkan responden setuju bahwa anggota DPRD memiliki pengetahuan anggaran sebagai dasar dalam pengawasan dan DPRD telah menjalankan fungsinya dalam pengawasan.

Proses ini menjadi indikator dalam melihat nilai yang benar atau salah. Nilai yang benar ketika proses ini dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, begitupun sebaliknya. Nilai inilah yang membentuk perilaku anggota DPRD, sehingga menjadi suatu budaya politik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki *political background* seperti individu yang ada di dalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu. Dengan kata lain, *political background* merupakan pedoman bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya.

Budaya politik yang terbentuk pada anggota DPRD, sesuai dengan tugasnya yang telah ditetapkan dalam aturan pemerintah. Pasal 292 dan pasal 343 UU No.27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan,

bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya, pasal 293 dan 344 menyatakan, tugas dan wewenang DPRD provinsi/kabupaten/kota, yang perlu dipahami lebih jauh dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Tugas dan wewenang DPRD menurut pasal 293 dan 344 UU No.27/2009 tersebut adalah: 1) membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur/bupati/walikota; 2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur/bupati/wali kota; 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda APBD, memiliki beberapa implikasi penting, yakni: 1) DPRD haruslah memiliki kecakapan atau kemampuan secara kelembagaan untuk "mengimbangi" Pemerintah Daerah. Kecakapan ini dapat diperoleh melalui pembekalan dan pendampingan oleh tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli. 2) Ketersediaan data/statistik yang lengkap pada setiap alat kelengkapan, terutama komisi-komisi. Artinya, setiap komisi memiliki database tentang data penting yang berhubungan dengan Tupoksi SKPD mitra kerjanya. Misalnya: database dan statistik untuk bidang pendidikan, harus menyediakan data tentang jumlah guru, masa pensiun, jumlah murid setiap tingkatan pendidikan, jenis kelamin guru dan murid, penyebaran sekolah, prestasi murid dan sekolah, kompetensi guru, kebutuhan guru (jumlah, bidang pelajaran, kompetensi,

dll.), dan kondisi sekolah dan perlengkapannya. 3) Kelengkapan peraturan kepala daerah (Gubernur/bupati/wali kota) yang merupakan pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis yang dipatuhi oleh semua SKPD. Dalam hal ini, seluruh peraturan kepala daerah semestinya disampaikan kepada DPRD, tanpa terkecuali, karena peraturan kepala daerah adalah dasar dilaksanakannya Perda oleh SKPD. DPRD diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam proses penganggaran, mulai dari pembahasan hingga mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

Hasil data deskriptif menemukan, bahwa anggota DPRD telah memahami fungsi yang harus mereka jalankan, khususnya terkait fungsi anggaran dan pengawasan. Namun fungsi belum berjalan secara optimal. Dari hasil pengamatan dan wawancara pada beberapa pihak, tergambar bahwa hubungan yang kurang harmonis terkadang tampak antara DPRD dan pemerintah daerah. Hubungan DPRD dan pemerintah daerah, pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan semata, akan tetapi juga mengacu pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat lokal, sehingga dapat dijalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparan tanpa harus mengorbankan sikap kritis dan sensitif dari DPRD. Namun beberapa kasus yang terjadi dalam hal penyusunan APBD, yang terkesan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, harus dihindarkan.

Hasil penelitian di lapangan juga terlihat, bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh lembaga perwakilan rakyat daerah masih berada pada posisi rendah. Tahap penganggaran seringkali tarik ulur karena lahirnya transaksi politik. Akibatnya,

pengelolaan anggaran yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat, cenderung dilaksanakan secara "asal-asalan" oleh pemerintah daerah. Selain itu, lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap sebagai penengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, malah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini didukung oleh data KPK, bahwa sepanjang tahun 2018, terdapat 88 anggota DPRD yang menjadi tersangka. Harryanto (2017) juga menyebutkan, bahwa legislatif bisa menimbulkan perilaku tidak terduga seperti *moral hazard* atau korupsi.

Banyaknya fakta yang menunjukkan apa yang terjadi di lingkungan DPRD saat ini, mengindikasikan bahwa budaya politik pada anggota DPRD masih rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah, banyak kelompok dalam DPRD sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif dan sekadar menjadi kepentingan alat politik. Masih banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Indonesia menunjukkan, jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan maraknya kasus korupsi di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat kepercayaan masyarakat berkurang.

Kepala daerah dalam kedudukannya sebagai kepala eksekutif, selain menguasai APBD juga dilengkapi perangkat yang cukup memadai, baik berupa biro (di provinsi), dinas-dinas daerah (di Kota/kabupaten) maupun lembaga teknis yang kesemuanya merupakan unsur pelaksana. Karena tugasnya yang bersifat administratif dan rutin, maka para unsur pelaksana ini pada umumnya memiliki skill

dan wawasan yang memadai di bidangnya masing-masing. Persoalan muncul ketika DPRD sebagai lembaga politik, menghadapi para birokrat daerah, karena masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Selain itu, seringkali kurang didukung data atau informasi yang akurat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian penelitian Katzman, 2015; Upping, 2011; Zakaria, 2011 yang mengungkapkan, bahwa budaya politik mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menolak penelitian Alba (2017), Djauhari (2015) La Porta Rafael, Silanes, Shleifer, Vishny (2009) menunjukkan kinerja pemerintah dipengaruhi oleh berapa hal, salah satunya politik. Pada Negara maju, politik akan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah, namun pada Negara miskin/berkembang, politik tidak mempengaruhi kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung teori kontingensi yang mengklaim, bahwa tidak ada cara yang sama dalam mengolah sebuah organisasi, semua tergantung pada faktor kontingensi. Luder mengungkapkan, dalam sektor publik, salah satu faktor kontingensi yaitu budaya politik. Peranan anggota DPRD dalam proses penyusunan anggaran menjadi suatu nilai yang terbentuk, sehingga melahirkan budaya politik.

Hasil penelitian ini berimplikasi perlunya hubungan anggota legislatif/DPRD dan pemerintah daerah berjalan lebih kondusif, tidak melibatkan kepentingan individu/golongan dalam penyusunan anggaran, namun lebih mengutamakan pada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD harus lebih memperkuat fungsinya, agar dapat mengimbangi gerak langkah kepala daerah dan unsur pelaksanaannya, terutama untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengembangkan pola kemitraan. Dari hal ini, diharapkan akan terjalin komunikasi politik yang bukan hanya tergantung

pada isu maupun insting politik, tetapi juga terbangun komunikasi yang mengedepankan pendekatan berbasis data. Budaya politik yang positif akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah

### **6.3 Pengaruh budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah**

Merujuk pada data hasil penelitian ini, variabel budaya administratsi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh signifikan ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  (*cut of value*) artinya kontribusi variabel budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis 3 (Budaya administratif pada proses penganggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia) diterima. Maknanya adalah, jika budaya administratif yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada pejabat publik dalam proses penyusunan anggaran meningkat, maka kinerja pemerintah daerah juga meningkat.

Budaya adminisitratif adalah nilai-nilai yang melekat pada aparatur negara tentang perencanaan dan penganggaran publik. Nilai adalah ide kolektif tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, dan diinginkan atau tidak diinginkan dalam budaya tertentu (Williams, 1970). Nilai yang ada pada birokrasi (pemerintah) dalam proses anggaran sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara.

Nilai tersebut termasuk pengertian, bahwa perencanaan dan penganggaran seyogyanya sebuah proses yang menyebarluaskan langkah-langkah yang telah dilakukan politisi (DPRD) dalam menyusun dan menetapkan anggaran. Proses yang dilakukan yaitu 1) Perencanaan, hal ini dapat dimaknai bahwa proses perencanaan APBD dimana pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD, dianggap telah dijalankan oleh pemerintah. 2) Penyusunan APBD, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan APBD oleh pemerintah yang didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kalender anggaran, dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada. 3) Penetapan APBD, hal ini menunjukkan, bahwa penetapan APBD telah dilakukan sesuai dengan aturan. 4) Indikator pertanggungjawaban, hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh setiap SKPD dilakukan dalam bentuk penyajian laporan keuangan dan laporan kinerja.

Berdasarkan proses-proses di atas, maka akan terbangun nilai di dalam aparatur Negara, bahwa proses anggaran yang baik dan benar adalah ketika proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nilai inilah yang membentuk perilaku aparatur negara dalam proses anggaran dan akan menjadi suatu budaya adminisratif.

Budaya merupakan salah satu dasar untuk memecahkan dan mempelajari suatu masalah dalam organisasi. Suatu organisasi seperti birokrasi pemerintahan, didirikan sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan untuk kepentingan rakyat.

Birokrasi pemerintah harus mampu mengelola rangkaian kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan oleh manusia atau aparatur negara yang bertindak sebagai aktor atau pelaku dalam birokrasi pemerintahan, maka kinerja organisasi tergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut. Budaya administratif merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman aparatur negara dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Kinerja merupakan konsep yang relatif dan memiliki hubungan yang kuat dengan budaya. Pegawai pemerintah dipandang memiliki kinerja yang baik, apabila mereka bekerja sesuai aturan yang ada, dalam suatu sistem yang menjadikan kepatuhan terhadap aturan sebagai tujuan utama.

Analisis terhadap kinerja administratif menjadi sangat penting. Informasi mengenai kinerja pemerintah daerah dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, hendaknya dapat dilihat sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi dan memberikan pelayanan administrasi, memerlukan informasi mengenai kinerja administratif dari aparatur yang ada, sehingga dapat dilakukan penilaian seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. Budaya administratif yang terbentuk akan berpengaruh terhadap perilaku aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.



Birokrasi pemerintah harus mampu mengelola rangkaian kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan oleh manusia atau aparatur negara yang bertindak sebagai aktor atau pelaku dalam birokrasi pemerintahan, maka kinerja organisasi tergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut. Budaya administratif merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman aparatur negara dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Kinerja merupakan konsep yang relatif dan memiliki hubungan yang kuat dengan budaya. Pegawai pemerintah dipandang memiliki kinerja yang baik, apabila mereka bekerja sesuai aturan yang ada, dalam suatu sistem yang menjadikan kepatuhan terhadap aturan sebagai tujuan utama.

Analisis terhadap kinerja administratif menjadi sangat penting. Informasi mengenai kinerja pemerintah daerah dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, hendaknya dapat dilihat sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi dan memberikan pelayanan administrasi, memerlukan informasi mengenai kinerja administratif dari aparatur yang ada, sehingga dapat dilakukan penilaian seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. Budaya administratif yang terbentuk akan berpengaruh terhadap perilaku aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan bagi daerah dalam mengelola keuangannya, yang dituangkan dalam APBD. Pengelolaan APBD yang baik, harus berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sebagai penjabaran atau pelaksanaan prinsip otonomi tersebut, maka dibentuklah UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan tonggak dan tolak ukur dalam setiap daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Ada beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam undang-undang ini, di antaranya adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, budaya administratif yang ditunjukkan dari perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugas mereka terkait penyusunan anggaran sesuai aturan yang ada, masih menemui banyak kendala. Salah satunya, APBD yang disusun masih sering mengalami keterlambatan. Kendala yang dihadapi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memaksimalkan perannya pada proses perencanaan, tidak lepas dari berbagai faktor yang menghambat penerapannya, yaitu :1) Penentuan jadwal pembahasan kurang baik, karena adanya kesibukan pihak eksekutif dan legislatif.2) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara TAPD dan Pihak legislatif DPRD sehingga berdampak pada

tahapan pembahasan yang terburu-buru, keterlambatan penyusunan RAPBD sehingga terlambat diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD. Keterlambatan ini bisa disebabkan karena masalah teknis manajerial, rendahnya kompetensi birokrasi, atau tidak sinkronnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai pedoman.

Laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa LAKIP dan Laporan keuangan, juga masih menghadapi kendala. Sebagian besar kelemahan proses penyusunan LAKIP, adalah minimnya informasi analisis capaian kinerja, baik pengungkapan mengenai hambatan dan kendala, serta analisis lainnya. Konsepsi akuntabilitas menuntut setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah tidak sekadar berorientasi output, melainkan berorientasi outcome. Hal ini menuntut manajemen instansi pemerintah berpikir tidak sekadar menyusun LAKIP, melainkan fokus pada pemikiran yang mengarah bagaimana LAKIP bisa memberikan masukan perbaikan untuk manajemen kinerja periode berikutnya. Kondisi inilah yang juga merupakan salah satu unsur yang menyebabkan skor hasil penilaian evaluasi LAKIP menjadi rendah, karena LAKIP tidak dimanfaatkan oleh manajemen untuk perbaikan manajemen kinerja.

Masih banyakya kendala-kendala yang dihadapi oleh aparatur negara dalam pengelolaan Negara, akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah seharusnya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Aparat yang bertugas sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya bisa bekerja dengan maksimal agar menghasilkan kinerja yang baik.

Dipandang dari teori kontingensi, bahwa tata kelola pemerintahan berperan penting dalam menciptakan hubungan yang sehat antara manajer, pemegang saham, dewan direksi dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap budaya di dunia memiliki perbedaan dalam menjalankan organisasi dan memecahkan masalah mereka, berinteraksi satu sama lain dan menjalankan bisnis mereka. Kualitas pemerintahan sangat bergantung pada efektivitas interaksi dan negosiasi di antara pihak terkait. Luder's contingency model mengatakan, dalam organisasi pemerintah dipengaruhi oleh 3 hal, di antaranya yaitu budaya administratif yang akan mempengaruhi kinerja. Dalam temuan penelitian ini, juga menemukan hal yang sama, bahwa budaya administratif akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Hasil ini mendukung penelitian Upping (2011) yang membahas pengembangan model teoretis untuk menyelidiki perubahan yang terjadi di sektor publik di negara berkembang dengan menggunakan *luder's contingency model*. Hasilnya menemukan, dukungan pada *luder's contingency model* diterapkan dalam melihat kinerja pemerintah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Ahn (2011) yang menyatakan, bahwa budaya administratif akan mempengaruhi kinerja pemerintah

Hasil penelitian ini berimplikasi, perlunya kepala daerah berupaya mendorong orientasi pada hasil dan mutu serta budaya administratif yang lebih kondusif lagi, terutama melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan dalam menyusun APBD demi kesejahteraan rakyat. Artinya, dengan terciptanya komunikasi yang efektif, baik dari atasan ke pada bawahan (komunikasi ke bawah) melalui (1) pemberian petunjuk, (2) pemberian keterangan umum; (3) pemberian perintah (4) pemberian teguran; (5)

pemberian pujian; maupun dari bawahan kepada atasan (komunikasi ke atas) melalui : (1) penyampaian laporan; (2) penyampaian pendapat; (3) penyampaian keluhan dan (4) penyampaian saran-saran yang dilakukan, baik secara formal maupun informal, maka diharapkan akan tercipta suasana yang lebih transparan, akuntabel dan responsif, sehingga melahirkan semangat kerja yang tinggi, yang dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah itu sendiri.

#### **6.4 Pengaruh moderasi teknologi informasi antara budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah**

Merujuk pada data hasil penelitian ini, variabel teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh signifikan ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar  $0,001 < 0,05$  (*cut of value*), artinya kontribusi variabel teknologi informasi dalam memoderasi budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis 4 (Teknologi informasi mampu memoderasi hubungan budaya sosial pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia) diterima. Maknanya adalah, jika teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan berjalan dengan baik, maka dapat menguatkan hubungan budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah.

Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang merupakan aplikasi program komputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran. Variabel ini diukur oleh 3 indikator: 1) Kualitas Sistem, hal ini dapat dimaknai bahwa data dan informasi yang tersedia pada *e-planning dan e-budgeting* merupakan data yang

lengkap dan terkini. 2) Kualitas Informasi, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan APBD oleh pemerintah yang didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan dan selanjutnya dokumen tersebut yang diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kalender anggaran dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada. 3) Kualitas Layanan, hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh *e-planning* dan *e-budgeting* mampu dirasakan oleh responden.

Perkembangan zaman saat ini menciptakan sebuah masyarakat yang modern dimana antara masyarakat dan teknologi menjadi satu kesatuan. Penyediaan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat menjadikan masyarakat lebih mampu melakukan pengawasan pada program-program yang dimunculkan pada anggaran. Inovasi teknologi yang diterapkan diharapkan mampu berdampak pada perubahan perilaku masyarakat dalam proses anggaran. Masyarakat akan melakukan penyesuaian dengan hadirnya teknologi tersebut. Penyesuaian yang dilakukan masyarakat akan membentuk suatu perilaku hingga menjadi budaya sosial yang mampu berinteraksi dengan teknologi dan akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

Dalam mengimplementasikan sistem *e-planning* dan *e-budgeting*, dimulai dari rembuk warga untuk mengumpulkan aspirasi yang direkam dan dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya hasil rembuk warga tersebut dibawa ke Musrenbang Kecamatan dan hasilnya kembali diinput. Keseluruhan aspirasi warga dipaparkan di Musrenbang, dipilih mana yang menjadi prioritas. Aspirasi tersebut dapat diakses melalui *e-musrenbang*.

Interaksi masyarakat dengan teknologi yang disediakan oleh pemerintah menjadi interaksi yang sangat baik dalam melakukan pengawasan terhadap usulan-usulan yang telah diajukan dalam musrenbang. Pemanfaatan *e-government* menjadi harapan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga meningkatkan kinerja pemerintah.

Penerapan *e-governemen* telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia dan mampu diakses oleh masyarakat. Namun, beberapa kendala juga masih ditemukan dikarenakan pemanfaatan teknologi yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Selain itu, *e-government* yang diterapkan masih dalam proses pengembangan sehingga masyarakat belum dapat secara utuh memperoleh informasi.

Terlepas dari manfaat teknologi, penerapannya di sektor publik dapat menjadi tantangan (Falk et al., 2017). Secara umum, sifat budaya dan struktur di sektor publik dapat menjadi hambatan untuk inovasi digital (Heeks & Stanforth, 2007; Irani et al., 2007; Weerakkody et al., 2011).

Masyarakat Indonesia memiliki budayanya sendiri dalam keterlibatannya pada proses anggaran publik. Keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan anggaran belum mampu mempengaruhi kinerja pemerintah. Dengan hadirnya teknologi ini, masyarakat diberi ruang untuk mampu mengikuti proses tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang telah disediakan.

Interaksi masyarakat dengan teknologi mendapat dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat berupa adanya sosialisasi dari pemerintah dalam pemanfaatan teknologi tersebut sehingga masyarakat mampu meningkatkan *skill* dalam pemanfaatan teknologi tersebut sehingga memberi kontribusi pada

pengawasan kinerja pemerintah daerah. Anggota LSM dan akademisi menjadi perwakilan masyarakat yang biasanya mengakses sistem ini.

Hasil ini mendukung teori *Technology Organization Environment Theory* (TOE) yang mengungkapkan, bahwa dalam mengadopsi sebuah teknologi dipengaruhi konteks teknologi, organisasi dan lingkungan. Konteks teknologi mencakup teknologi internal dan eksternal yang relevan dengan perusahaan. Penggunaan *e-government* terkhusus *e-planning dan e-budgeting* telah relevan digunakan dalam membantu perencanaan dan pengolahan sebuah anggaran di sektor publik. Konteks lingkungan mencakup isu-isu sosial budaya dan aturan pemerintah. Tekanan masyarakat dalam membentuk transparansi dan akuntabilitas publik, menjadi salah satu faktor penyebab pemerintah terdorong untuk mengadopsi suatu inovasi dengan mengembangkan *e-government*. Penggunaan *e-government* terkhusus *e-planning dan e-budgeting* dapat membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah, walaupun pemanfaatan teknologi saat ini belum secara utuh dapat dirasakan.

Kesuksesan penggunaan *e-government* juga mendukung Model Kesuksesan sistem informasi teknologi Delone & Mcleane, di mana model ini membahas mengenai kesuksesan penggunaan sistem baik yang diterapkan pada organisasi. Salah satu kajian model ini, di antaranya membahas tentang bagaimana suatu teknologi informasi mempengaruhi kinerja individu yang akan berdampak pada kinerja organisasi. Implikasi model kesuksesan sistem informasi teknologi Delone & Mcleane ini, yaitu indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kesuksesan sistem informasi, termasuk dapat digunakan dalam pengukuran penggunaan *e-government*.



pengawasan kinerja pemerintah daerah. Anggota LSM dan akademisi menjadi perwakilan masyarakat yang biasanya mengakses sistem ini.

Hasil ini mendukung teori *Technology Organization Environment Theory* (TOE) yang mengungkapkan, bahwa dalam mengadopsi sebuah teknologi dipengaruhi konteks teknologi, organisasi dan lingkungan. Konteks teknologi mencakup teknologi internal dan eksternal yang relevan dengan perusahaan. Penggunaan *e-government* terkhusus *e-planning* dan *e-budgeting* telah relevan digunakan dalam membantu perencanaan dan pengolahan sebuah anggaran di sektor publik. Konteks lingkungan mencakup isu-isu sosial budaya dan aturan pemerintah. Tekanan masyarakat dalam membentuk transparansi dan akuntabilitas publik, menjadi salah satu faktor penyebab pemerintah terdorong untuk mengadopsi suatu inovasi dengan mengembangkan *e-government*. Penggunaan *e-government* terkhusus *e-planning* dan *e-budgeting* dapat membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah, walaupun pemanfaatan teknologi saat ini belum secara utuh dapat dirasakan.

Kesuksesan penggunaan *e-government* juga mendukung Model Kesuksesan sistem informasi teknologi Delone & Mcleane, di mana model ini membahas mengenai kesuksesan penggunaan sistem baik yang diterapkan pada organisasi. Salah satu kajian model ini, di antaranya membahas tentang bagaimana suatu teknologi informasi mempengaruhi kinerja individu yang akan berdampak pada kinerja organisasi. Implikasi model kesuksesan sistem informasi teknologi Delone & Mcleane ini, yaitu indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kesuksesan sistem informasi, termasuk dapat digunakan dalam pengukuran penggunaan *e-government*.

Indikator-indikator ini digunakan untuk melihat bagaimana kualitas sistem, kualitas teknologi dan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat dari pemanfaatan *e-government*.

Penelitian ini juga mendukung konsep dari Luder's contingency model dimana Luder et al menekankan hubungan diantara faktor-faktor yang ada dalam pemerintahan yaitu masyarakat, politik dan birokrasi mempengaruhi inovasi-inovasi pemerintah. Dengan menggunakan model yang dilakukan ini yaitu teknologi informasi yang diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah akan mendukung konsep yang sama dengan Luder kontingency model yaitu pemerintah akan melakukan inovasi-inovasi dengan adanya peran teknologi informasi dengan hubungan antara variabel yang diteliti akan menyebabkan selalu terjadi perubahan yang dinamis. Inovasi inilah sehingga berkembang konsep e-budgeting, eplanning.

Hasil ini mendukung penelitian Kardan (2011) menekankan bahwa *e-government* dan demokrasi menyatu bersama. *E-government* sebagai sarana untuk meningkatkan proses demokrasi. *E-government* dapat membuat masyarakat menjadi lebih terlibat dalam proses pemerintahan, sehingga lebih banyak mendapatkan informasi tentang hukum, peraturan, kebijakan, dan jasa. Inisiatif *E-government* dapat meningkatkan derajat dan kualitas partisipasi publik dalam pemerintahan. Dari evolusi tambahan perspektif, *e-government* mempengaruhi partisipatif demokrasi dalam area berikut: 1) Di mana ada dasar sejarah, politik atau budaya untuk memungkinkan masyarakat sipil lebih aktif dan partisipatif yang difasilitasi pemerintah dan kegiatan konsultatif; 2) Teknologi memungkinkan minat yang muncul dalam partisipatif demokrasi untuk membuahkan hasil dengan biaya lebih rendah.

Hasil penelitian ini menolak penelitian Ou, 2016; Livari 2005; Marble, 2003, yang mengungkapkan, bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Kegagalan penggunaan teknologi dapat terjadi dikarenakan faktor teknologi di negara tersebut dan faktor sumber daya manusia.

Hasil penelitian ini berimplikasi perlunya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga budaya sosial yang terbentuk dalam masyarakat menjadi budaya yang positif yang dapat meningkatkan keterlibatan dalam proses penganggaran, sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

#### **6.5 Moderasi teknologi informasi antara budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah**

Merujuk pada data hasil penelitian ini, variabel teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh signifikan ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  (*cut of value*). Artinya, kontribusi variabel teknologi informasi dalam memoderasi budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah, memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis 5 (Teknologi informasi mampu memoderasi hubungan budaya politik pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia) diterima. Maknanya adalah, jika teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan berjalan dengan baik, maka dapat menguatkan hubungan budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang merupakan aplikasi program komputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran. Variabel ini diukur oleh 3 indikator: 1) Kualitas Sistem, hal ini dapat dimaknai bahwa data dan informasi yang tersedia pada *e-planning* dan *e-budgeting* merupakan data yang lengkap dan terkini. 2) Kualitas Informasi, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan APBD oleh pemerintah, didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kalender anggaran dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada. 3) Kualitas Layanan, Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh *e-planning* dan *e-budgeting* mampu dirasakan oleh responden.

*E-Planning* dan *e-Budgeting* yang diterapkan oleh pemerintah merupakan hal yang baik untuk sebuah proses transparansi. *E-Planning* dan *E-Budgeting* merupakan sebuah sistem dengan menggunakan teknologi. Di mana yang tadinya penyusunan sebuah program dan anggaran dilakukan secara konvensional, sekarang dilakukan melalui sebuah teknologi informasi. Pemanfaatan *E-Government* dalam bidang penganggaran memudahkan pemerintah dan DPRD membahas APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD telah memanfaatkan teknologi informasi atau *e-government* dalam proses penganggaran. Anggota DPRD mendapat akun masing-masing untuk mengakses sistem ini, walaupun beberapa daerah masih belum bisa mengakses secara full, dikarenakan kondisi pada daerah tersebut. DPRD dapat mengakses *e-planning* untuk memasukkan usulan-usulan pembangunan atau program yang akan dilakukan. Dalam penerapannya, tidak lepas dari kendala-

Hasil penelitian ini menolak penelitian Ou, 2016; Livari 2005; Marble, 2003, yang mengungkapkan, bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Kegagalan penggunaan teknologi dapat terjadi dikarenakan faktor teknologi di negara tersebut dan faktor sumber daya manusia.

Hasil penelitian ini berimplikasi perlunya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga budaya sosial yang terbentuk dalam masyarakat menjadi budaya yang positif yang dapat meningkatkan keterlibatan dalam proses penganggaran, sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

#### **6.5 Moderasi teknologi informasi antara budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah**

Merujuk pada data hasil penelitian ini, variabel teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh signifikan ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  (*cut of value*). Artinya, kontribusi variabel teknologi informasi dalam memoderasi budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah, memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis 5 (Teknologi informasi mampu memoderasi hubungan budaya politik pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia) diterima. Maknanya adalah, jika teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan berjalan dengan baik, maka dapat menguatkan hubungan budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang merupakan aplikasi program komputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran. Variabel ini diukur oleh 3 indikator: 1) Kualitas Sistem, hal ini dapat dimaknai bahwa data dan informasi yang teredia pada *e-planning* dan *e-budgeting* merupakan data yang lengkap dan terkini. 2) Kualitas Informasi, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan APBD oleh pemerintah, didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kalender anggaran dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada. 3) Kualitas Layanan, Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh *e-planning* dan *e-budgeting* mampu dirasakan oleh responden.

*E-Planning* dan *e-Budgeting* yang diterapkan oleh pemerintah merupakan hal yang baik untuk sebuah proses transparansi. *E-Planning* dan *E-Budgeting* merupakan sebuah sistem dengan menggunakan teknologi. Di mana yang tadinya penyusunan sebuah program dan anggaran dilakukan secara konvensional, sekarang dilakukan melalui sebuah teknologi informasi. Pemanfaatan *E-Government* dalam bidang penganggaran memudahkan pemerintah dan DPRD membahas APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD telah memanfaatkan teknologi informasi atau *e-government* dalam proses penganggaran. Anggota DPRD mendapat akun masing-masing untuk mengakses sistem ini, walaupun beberapa daerah masih belum bisa mengakses secara full, dikarenakan kondisi pada daerah tersebut. DPRD dapat mengakses *e-planning* untuk memasukkan usulan-usulan pembangunan atau program yang akan dilakukan. Dalam penerapannya, tidak lepas dari kendala-

kendala, dikarenakan selama ini menggunakan sistem manual sehingga ada perbedaan. Di tahap awal penggunaan teknologi ini, komunikasi intens antara legislatif dan eksekutif dilakukan secara intens, penentuan prioritas pokok pikiran DPRD sebagai wujud merealisasikan aspirasi masyarakat, sehingga nantinya ada kelancaran dalam pembahasan yang lainnya.

Dari proses tersebut akan menambah nilai pada anggota DPRD dalam keterlibatannya pada proses anggaran. Nilai tersebut akan menjadi perilaku yang diharapkan mampu ditingkatkan oleh DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan dari masyarakat. Perilaku tersebut nantinya akan menjadi budaya politik yang melekat pada anggota DPRD. Oleh karena itu, interaksi anggota DPRD dengan teknologi menjadi suatu budaya yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini mendukung *Technology Organization Environment Theory* (TOE) yang menyatakan, bahwa ada tiga konteks yang mempengaruhi pengadopsian teknologi, yaitu konteks teknologi, konteks organisasi, dan konteks lingkungan. Konteks teknologi, bagaimana teknologi itu mampu memberikan manfaat dalam penerapannya. Dalam penerapan e-planning dan e-budgeting membantu anggota DPRD melihat usulan dan perencanaan dari satuan kerja dan dapat melakukan perubahan melalui tahapan pembahasan anggaran DPRD. Anggota DPRD diharapkan mampu memanfaatkan e-government yang telah dibuat.

Hasil penelitian ini didukung oleh Burrell 2011 yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan akan membentuk harapan politisi tentang efek dari pemberian layanan yang lebih transparan dalam membentuk

variasi dalam karakter reformasi. Berkenaan dengan faktor-faktor penentu politik e-government, lingkungan politik yang menyeluruh dan kapasitas pemerintah sebagai konteks birokrasi, telah diidentifikasi sebagai faktor-faktor penting yang menentukan kinerja e-government (Stier, 2015; Ahn, 2011)

Hasil penelitian ini berimplikasi perlunya anggota DPRD meningkatkan kemampuan dalam pengimplementasian e-planning dan e-budgeting, agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Anggota DPRD seharusnya mampu memahami penggunaan sistem ini. Pemanfaatan sistem ini diharapkan mampu mengeliminasi program yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan hanya mementingkan kepentingan politik saja.

#### **6.6 Moderasi teknologi informasi antara budaya administatif terhadap kinerja pemerintah daerah**

Merujuk pada data hasil penelitian ini, variabel teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh signifikan ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  (*cut of value*), artinya kontribusi variabel teknologi informasi dalam memoderasi budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah, memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis 6 (Teknologi Informasi mampu memoderasi hubungan budaya administratif pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia) diterima. Maknanya adalah, jika teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan berjalan dengan baik, maka dapat menguatkan hubungan budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah.



variasi dalam karakter reformasi. Berkenaan dengan faktor-faktor penentu politik e-government, lingkungan politik yang menyeluruh dan kapasitas pemerintah sebagai konteks birokrasi, telah diidentifikasi sebagai faktor-faktor penting yang menentukan kinerja e-government (Stier, 2015; Ahn, 2011)

Hasil penelitian ini berimplikasi perlunya anggota DPRD meningkatkan kemampuan dalam pengimplementasian e-planning dan e-budgeting, agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Anggota DPRD seharusnya mampu memahami penggunaan sistem ini. Pemanfaatan sistem ini diharapkan mampu mengeliminasi program yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan hanya mementingkan kepentingan politik saja.

#### **6.6 Moderasi teknologi informasi antara budaya administatif terhadap kinerja pemerintah daerah**

Merujuk pada data hasil penelitian ini, variabel teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh signifikan ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  (*cut of value*), artinya kontribusi variabel teknologi informasi dalam memoderasi budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah, memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis 6 (Teknologi Informasi mampu memoderasi hubungan budaya administratif pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia) diterima. Maknanya adalah, jika teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan berjalan dengan baik, maka dapat menguatkan hubungan budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang merupakan aplikasi program komputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran. Variabel ini diukur oleh 3 indikator: 1) Kualitas sistem, hal ini dapat dimaknai bahwa data dan informasi yang tersedia pada *e-planning* dan *e-budgeting*, merupakan data yang lengkap dan terkini. 2) Kualitas Informasi, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan APBD oleh pemerintah, didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu juga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kalender anggaran dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada. 3) Kualitas Layanan, Hal ini menunjukkan, bahwa layanan yang diberikan oleh *e-planning* dan *e-budgeting* mampu dirasakan oleh responden.

Sehubungan dengan *e-government*, digitalisasi melibatkan konversi proses tradisional, birokrasi dan berbasis kertas ke platform digital (Janssen & Estevez, 2013). Dalam konteks ini, digitalisasi dianggap sebagai bentuk lanjutan dari inovasi *e-government* yang merekayasa ulang proses fisik untuk mempromosikan efisiensi dan efektivitas (Irani et al., 2008; Weerakkody et al., 2011). Digitalisasi dicatat untuk membantu mempromosikan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan (Falk et al., 2017). Ini juga menawarkan peluang bagi pemerintah untuk memodernisasi administrasi publik dan keterlibatan dengan warga dan bisnis (Falk et al., 2017). Salah satu bentuk modernisasi sektor publik adalah penyederhanaan proses melalui standarisasi kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu respons (Calvo & Campos, 2017). Pada saat yang sama, digitalisasi mengarah pada penghematan biaya dalam administrasi publik (Falk et al., 2017). Mengingat

manfaatnya, digitalisasi menghadirkan peluang bagi pemerintah untuk mengatasi masalah birokrasi dan inefisiensi dalam proses sektor publik tradisional (Davison et al., 2005; Grönlund & Horan, 2004; Venkatesh et al., 2010; Barat, 2004). Secara umum, digitalisasi membantu merampingkan proses vertikal dan horizontal yang mahal dan tidak efisien (Janowski, 2015; Janssen & Estevez, 2013; Sun et al., 2015).

Penganggaran pemerintah melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pendapatan dan pengeluaran sektor publik. Penganggaran pemerintah adalah kegiatan lintas-lembaga yang melampaui hierarki vertikal dan horizontal pemerintah. Namun, penganggaran pemerintah biasanya ditandai sebagai birokratis dan tidak efisien, terutama di negara berkembang, di mana proses berbasis kertas tradisional mendominasi dan oleh karena itu digitalisasi administrasi publik masih baru lahir (Schuppan, 2009). Digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk memigrasikan aktivitas fisik dan dokumen dari offline ke online untuk memungkinkan interaksi elektronik (Bharadwaj et al., 2013; Fichman et al., 2014).

Digitalisasi melibatkan penggunaan infrastruktur jaringan berbasis komputer, terutama Internet (Bharadwaj et al., 2013), untuk melakukan migrasi aktivitas fisik dan konten ke platform digital untuk interaksi online (Fichman et al., 2014). Sejumlah manfaat organisasi untuk digitalisasi telah dibahas dalam literatur sistem informasi (Bharadwaj et al., 2013; Wenzel et al., 2015). Perlu dicatat bahwa digitalisasi dapat membuat proses lebih dapat disesuaikan dan ditempa untuk konteks penggunaan, sehingga membuatnya lebih fleksibel dan responsif (Fichman et al., 2014). Juga, digitalisasi mempromosikan kolaborasi intra dan antar organisasi bahkan di mana para pelaku berada dari jarak jauh (Islam et al., 2016). Sehubungan dengan dokumen,

digitalisasi menawarkan peluang untuk penyimpanan besar, penyalinan berganda, dan pengiriman cepat dokumen elektronik dengan biaya lebih rendah dan kecepatan lebih cepat (Fichman et al., 2014) dibandingkan dengan rekam fisik. Selain itu, digitalisasi mempromosikan modernisasi dan partisipasi dalam layanan online (Schuppan, 2009). Selain itu, ini meningkatkan kemampuan manusia untuk mencari, menganalisis, memperbaiki dan meningkatkan e-dokumen dengan mudah (Fichman et al., 2014). Manfaat lain termasuk kesempatan untuk berbagi dan melacak informasi online (Fichman et al., 2014; Fountain, 2005; Schuppan, 2009).

Dari hasil penelitian pada penggunaan teknologi informasi, aparaturnegara telah menggunakan sistem ini dalam menunjang perencanaan dan penyusunan anggaran. Kepala daerah yang berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan publik, keterbukaan anggaran dapat mengoptimalkan penggunaan sistem *e-planning dan e-budgeting*. Penerapan sistem ini sangat efektif untuk mengolah anggaran dan memonitor masalah. Dengan adanya sistem ini, mampu mencegah modus korupsi. Penggunaan sistem ini juga mampu menghemat anggaran. Data mengungkapkan bahwa penerapan *e-budgeting* untuk belanja barang yang dilakukan di Pemprov DKI Jakarta, mampu menghemat APBD seperti alat tulis kantor hingga Rp1 miliar. Pengontrolan menjadi lebih mudah dengan pemanfaatan sistem ini.

Penerapan sistem ini dapat mempersingkat proses penyusunan rancangan anggaran, karena dilakukan secara elektronik, sehingga mengatasi masalah-masalah yang terjadi di penganggaran manual yang masih dilakukan dengan pertemuan *face-to-face*. *E-Budgeting* juga dianggap sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

Dari proses tersebut akan menjadi suatu nilai pada staff administrasi dalam proses anggaran. Nilai tersebut akan menjadi suatu perilaku sehingga menjadi suatu budaya administrasi. Interaksi yang terjadi pada staff administrasi dan teknologi diharapkan dapat menjadi budaya baru yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Banyak manfaat yang dirasakan dari penggunaan sistem ini, seperti keuntungan dalam penggunaan e-government yaitu: a). Meningkatnya kepercayaan warga terhadap pemerintah; b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah; c) Kemampuan untuk mengakomodasi keinginan publik di era informasi; d) Keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk LSM, bisnis, dan warga negara yang tertarik, dengan cara baru dalam menghadapi tantangan publik (Clift, 2003).

Penelitian ini juga mendukung *Technology Organization Environment Theory* (TOE) yang menyatakan, bahwa ada tiga konteks dalam pengadopsian teknologi di antaranya konteks teknologi, konteks organisasi, konteks lingkungan. Konteks organisasi terkait dengan sumber daya manusia. SKPD di sini sebagai pengguna e-planning dan e-budgeting, Bappeda dan BPKD sebagai pengguna dan pengelola. Dalam menggunakan dan mengelola sistem ini, diperlukan pemahaman terhadap sistem ini. Oleh karena itu, setiap aparatur negara yang bertugas pada penginputan anggaran dalam sistem ini diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuannya di bidang anggaran maupun teknologi tersebut. Adanya adopsi teknologi yang relevan dan menciptakan infrastruktur serta memobilisasi sumber daya manusia yang kompeten. Kesuksesan pengadopsian teknologi tidak lepas dari sumber daya manusia. Tenaga kerja memerlukan pelatihan dalam penggunaan teknologi tersebut. Kemampuan manusia ditujukan untuk memperbaiki kekurangan keterampilan

pegawai, sehingga diharapkan mampu mendorong keunggulan kinerja. Kinerja dapat meningkat apabila keterampilan tenaga kerja juga meningkat, seperti merekrut tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang sesuai.

Proses komunikasi dalam konteks organisasi dapat mempromosikan atau menghambat inovasi. Manajemen puncak dapat menumbuhkan inovasi dengan menciptakan konteks organisasi yang menyambut perubahan dan mendukung inovasi yang memajukan misi dan visi inti organisasi (Tushman dan Nadler 1986). Kepemimpinan manajemen puncak perilaku dan proses komunikasi termasuk menggambarkan peran inovasi dalam strategi keseluruhan organisasi, yang menunjukkan pentingnya inovasi kepada bawahan, menghargai inovasi baik secara formal maupun informal, menekankan sejarah inovasi dalam perusahaan, dan membangun eksekutif yang terampil, juga tim yang mampu memberikan visi yang meyakinkan tentang masa depan perusahaan.

Hasil ini mendukung penelitian Al tholaya Abdullah Mohamed Hamoud. 2013. Governmental accounting innovation in Yemen Institutional mempengaruhi kinerja pada pemerintah. E-Government dapat menjadi variabel moderasi antara institusi dengan kinerja pemerintah. Penelitian ini juga mendukung penelitian Mamary, et al (2014); Ghanem & Sulaiman (2016), Lyengar et al (2015), Cuo et al 2014; Daoud; 2013.

Hasil penelitian ini, berimplikasi perlunya kepala daerah berupaya mendorong orientasi pada hasil dan mutu serta budaya administratif yang lebih kondusif lagi, terutama melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan dalam menyusun APBD demi kesejahteraan rakyat.

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1. Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Budaya sosial yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat dalam keterlibatannya pada perencanaan dan penganggaran publik diharapkan akan mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Nilai tersebut akan menjadi baik ketika dalam proses anggaran dijalankan sesuai dengan aturan. Secara konsep proses anggaran telah dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun hasil penelitian menemukan bahwa budaya sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini bisa terjadi karena posisi masyarakat dalam proses anggaran belum kuat, walaupun partisipasi masyarakat telah diatur dalam Musrenbang, *public hearing* dan pengawasan. Masyarakat tidak dapat terlibat terlalu jauh dalam penetapan anggaran dikarenakan posisi masyarakat telah terwakili oleh anggota legislatif. Namun demikian diperjalanan anggota legislatif sebagai wakil rakyat lebih berat pada aspek kepentingan politik sehingga terkadang ada keadaan terabaikan yaitu kepentingan aspirasi masyarakat. Model demokrasi dimana masyarakat diwakili oleh anggota legislatif menjadikan budaya sosial pasif sehingga tidak mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

- 2) Budaya politik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Budaya politik yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada anggota DPRD dalam keterlibatannya pada perencanaan dan penganggaran publik diharapkan akan mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil data deskriptif menemukan bahwa anggota DPRD telah memahami fungsi yang harus mereka jalankan khususnya terkait fungsi anggaran dan pengawasan, namun fungsi belum berjalan secara optimal. Hubungan DPRD dan pemerintah daerah pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan semata akan tetapi juga mengacu pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat lokal, sehingga dapat dijalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparan tanpa harus mengorbankan sikap kritis dan sensitif dari DPRD. Namun beberapa kasus yang terjadi dalam hal penyusunan APBD yang terkesan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok harus dihindarkan. Hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh lembaga perwakilan rakyat daerah masih berada pada posisi rendah. Tahap penganggaran seringkali tarik ulur karena lahirnya transaksi politik. Selain itu, lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap sebagai penengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan malah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari temuan-temuan yang ada terlihat bahwa jika budaya politik yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada anggota legislatif/DPRD dalam proses penyusunan anggaran meningkat maka kinerja pemerintah daerah meningkat begitupun



sebaliknya jika budaya politik dalam proses penyusunan anggaran menurun maka kinerja pemerintah daerah menurun.

- 3) Budaya administratif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Budaya administratif yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada aparatur negara dalam keterlibatannya pada perencanaan dan penganggaran publik diharapkan akan mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh aparatur negara dalam pengelolaan negara yang berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Kendala tersebut diantaranya APBD yang disusun masih sering terjadi keterlambatan. Pemerintah daerah seharusnya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Aparat yang bertugas sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seharusnya bisa bekerja dengan maksimal agar menghasilkan kinerja yang baik. Hasil ini menggambarkan bahwa jika budaya administratif yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada pejabat publik dalam proses penyusunan anggaran meningkat maka kinerja pemerintah daerah juga meningkat.
- 4) Teknologi Informasi mampu meningkatkan hubungan budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah. Hadirnya teknologi informasi telah menggeser paradigma masyarakat dalam proses anggaran. Pemanfaatan *e-government* menjadi harapan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga meningkatkan kinerja pemerintah. Realita yang terjadi pada penggunaan teknologi informasi yaitu masyarakat merasakan bahwa ada keinginan dari pemerintah dalam

memperbaiki kinerjanya melalui pemanfaatan *e-government*, walaupun pemanfaatan *e-government* di Indonesia, khususnya di bidang penganggaran masih dilakukan secara bertahap. Di beberapa daerah pemanfaatan *e-budgeting* dan *e-planning* telah dapat diakses oleh masyarakat sehingga dapat melakukan pengawasan terkait anggaran. Hasil ini menggambarkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan dapat menguatkan hubungan budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah.

- 5) Teknologi Informasi mampu meningkatkan hubungan budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menggambarkan bahwa anggota DPRD telah memanfaatkan teknologi informasi atau *e-government* dalam proses penganggaran. Anggota DPRD mendapat akun masing-masing untuk mengakses sistem ini, walaupun beberapa daerah masih belum bisa mengakses secara full dikarenakan kondisi pada daerah tersebut. DPRD dapat mengakses *e-planning* untuk memasukkan usulan-usulan pembangunan atau program yang akan dilakukan. Dalam penerapannya tidak lepas dari kendala-kendala dikarenakan selama ini menggunakan sistem manual sehingga ada perbedaan. Ditahap awal penggunaan teknologi ini, komunikasi intens antara legislatif dan eksekutif dilakukan secara intens, penentuan prioritas pokok pikiran DPRD sebagai wujud merealisasikan aspirasi masyarakat, sehingga nanti ada kelancaran dalam pembahasan yang lainnya. Hasil ini menggambarkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan dapat menguatkan hubungan budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah.

6) Teknologi Informasi mampu meningkatkan hubungan budaya administrative terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menggambarkan bahwa aparatur negara telah menggunakan sistem ini dalam menunjang perencanaan dan penyusunan anggaran. Penerapan sistem ini sangat efektif untuk mengolah anggaran dan memonitor masalah. Dengan adanya sistem ini mampu mencegah modus korupsi. Penggunaan sistem ini juga mampu menghemat anggaran. Penerapan sistem ini dapat mempersingkat proses penyusunan rancangan anggaran karena dilakukan secara elektronik. Hasil ini menggambarkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan dapat menguatkan hubungan budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah.

## 7.2. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi penelitian ini dapat mengembangkan Luder's contingency model dalam melihat proses kinerja pemerintah. Model luder menekankan pengembangan proses pemerintahan melalui inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Salah satu invasi yang dapat dilakukan yaitu inovasi dengan menggunakan teknologi informasi yang merupakan perangkat pelengkap dalam menunjang kinerja pemerintah. Hadirnya teknologi mampu berinteraksi dengan budaya yang dikembangkan dalam model Luder dalam proses pemerintahan.
2. Hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi pemerintah bahwa dengan adanya teknologi informasi mendorong pemerintah menjadi

lebih dinamis sehingga pemerintah daerah yang belum memanfaatkan teknologi informasi mampu mengikuti perkembangan dari pemerintah daerah yang telah menerapkan teknologi informasi.

3. Hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi pemerintah dalam melihat aspek manusia dibalik proses anggaran yang membentuk suatu budaya sosial, politik, administratif dalam proses penganggaran yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

### **7.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian yaitu penggunaan teknologi yang bersifat dinamis, dimana penggunaan teknologi akan terus berkembang mengikuti zaman. Teknologi yang dijadikan penelitian saat ini sebaiknya dikembangkan pada penelitian berikutnya.

### **7.4 Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi pimpinan perusahaan, bagi peneliti, maupun bagi pihak lain yang terkait sebagai berikut:

- 1) Sebagai negara demokrasi dimana pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, peran masyarakat perlu ditingkatkan dalam proses anggaran dikarenakan tujuan anggaran adalah untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat sebaiknya memiliki akses yang lebih luas dalam

lebih dinamis sehingga pemerintah daerah yang belum memanfaatkan teknologi informasi mampu mengikuti perkembangan dari pemerintah daerah yang telah menerapkan teknologi informasi.

3. Hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi pemerintah dalam melihat aspek manusia dibalik proses anggaran yang membentuk suatu budaya sosial, politik, administratif dalam proses penganggaran yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

### 7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian yaitu penggunaan teknologi yang bersifat dinamis, dimana penggunaan teknologi akan terus berkembang mengikuti zaman. Teknologi yang dijadikan penelitian saat ini sebaiknya dikembangkan pada penelitian berikutnya.

### 7.4 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi pimpinan perusahaan, bagi peneliti, maupun bagi pihak lain yang terkait sebagai berikut:

- 1) Sebagai negara demokrasi dimana pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, peran masyarakat perlu ditingkatkan dalam proses anggaran dikarenakan tujuan anggaran adalah untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat sebaiknya memiliki akses yang lebih luas dalam

keterlibatannya menjaga proses anggaran. Masyarakat juga diharapkan bisa menjadi penyeimbang antara kepentingan politik partai dan birokrasi.

- 2) Pemerintah daerah yang belum memanfaatkan teknologi informasi perlu mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi, seperti yang telah diterapkan pada beberapa daerah yang telah memanfaatkan teknologi informasi agar tercipta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui teknologi, pemerintah daerah mampu menciptakan inovasi yang dinamis yang saat ini tergambarkan dengan terciptanya *e-budgeting*, *e-planning*, dan yang lainnya.

keterlibatannya menjaga proses anggaran. Masyarakat juga diharapkan bisa menjadi penyeimbang antara kepentingan politik partai dan birokrasi.

- 2) Pemerintah daerah yang belum memanfaatkan teknologi informasi perlu mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi, seperti yang telah diterapkan pada beberapa daerah yang telah memanfaatkan teknologi informasi agar tercipta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui teknologi, pemerintah daerah mampu menciptakan inovasi yang dinamis yang saat ini tergambarkan dengan terciptanya *e-budgeting*, *e-planning*, dan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy (2008). Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. SSRN Electronic Journal
- Aini, U., Ritonga, K., & Paulus, S. (2018). Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 1-12.
- Al-Khour, A. M. (2011). *An innovative approach for e-government transformation*. arXiv preprint arXiv:1105.6358.
- Ahn, M. J., & Bretschneider, S. (2011). *Politics of e-government: e-government and the political control of bureaucracy*. *Public Administration Review*, 71(3), 414-424.
- Alba, C. and Navarro, C. (2011) Administrative Tradition and Reforms in Spain: Adaptation Versus Innovation. *Public Administration*, 89:3 pp783–800.
- Alhyari, S., Alazab, M., Venkatraman, S., Alazab, M. & Alazab, A. (2013). Performance evaluation of e-government services using balanced scorecard. *Benchmarking: An International Journal*, Vol. 20, No. 4, pp. 512 – 536
- Al-Badri, N. M. A. (2012). *The influence of societal and organizational culture on employment equity: the case of the public sector in the Sultanate of Oman* (Doctoral dissertation, The University of Manchester (United Kingdom)).
- Al-Tholaya, A. M. H. (2013). *Governmental accounting innovation in Yemen: the introduction of accruals accounting & the moderating role of e-government* (Doctoral dissertation, University of Malaya).
- Alba carlos r. And carmen navarro. (2011). *administrative tradition and reforms in spain: adaptation versus innovation*. *Public administration* vol. 89, no. 3, 2011 (783–800)
- Al-Mamary, Y. H., Shamsuddin, A., & Abdul Hamid, N. A. (2014). *Factors affecting successful adoption of management information systems in organizations towards enhancing organizational performance*. *American Journal of Systems and Software*, 2(5), 121-126.
- Andersen, T.B. (2009) . *E-government as an anti-corruption strategy*. *Information Economics and Policy*, 21(3), 201–210



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy (2008). Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. SSRN Electronic Journal
- Aini, U., Ritonga, K., & Paulus, S. (2018). Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 1-12.
- Al-Khourî, A. M. (2011). *An innovative approach for e-government transformation*. arXiv preprint arXiv:1105.6358.
- Ahn, M. J., & Bretschneider, S. (2011). *Politics of e-government: e-government and the political control of bureaucracy*. *Public Administration Review*, 71(3), 414-424.
- Alba, C. and Navarro, C. (2011) Administrative Tradition and Reforms in Spain: Adaptation Versus Innovation. *Public Administration*, 89:3 pp783–800.
- Alhyari, S., Alazab, M., Venkatraman, S., Alazab, M. & Alazab, A. (2013). Performance evaluation of e-government services using balanced scorecard. *Benchmarking: An International Journal*, Vol. 20, No. 4, pp. 512 – 536
- Al-Badri, N. M. A. (2012). *The influence of societal and organizational culture on employment equity: the case of the public sector in the Sultanate of Oman* (Doctoral dissertation, The University of Manchester (United Kingdom)).
- Al-Tholaya, A. M. H. (2013). *Governmental accounting innovation in Yemen: the introduction of accruals accounting & the moderating role of e-government* (Doctoral dissertation, University of Malaya).
- Alba carlos r. And carmen navarro. (2011). *administrative tradition and reforms in spain: adaptation versus innovation*. *Public administration* vol. 89, no. 3, 2011 (783–800)
- Al-Mamary, Y. H., Shamsuddin, A., & Abdul Hamid, N. A. (2014). *Factors affecting successful adoption of management information systems in organizations towards enhancing organizational performance*. *American Journal of Systems and Software*, 2(5), 121-126.
- Andersen, T.B. (2009) . *E-government as an anti-corruption strategy*. *Information Economics and Policy*, 21(3), 201–210

- Amitai Etzioni (1985). *Organisasi-Organisasi Modern*, terj. Suryatim. Jakarta : UI Press
- Arnold, Matthew. (1869). *Culture and Anarchy*. New York: Macmillan. Third edition, 1882, available online. Retrieved: 2006-06-28.
- Awa, H. O., Ojiabo, O. U., & Emecheta, B. C. (2015). Integrating TAM, TPB and TOE frameworks and expanding their characteristic constructs for e-commerce adoption by SMEs. *Journal of Science & Technology Policy Management*, 6(1), 76-94.
- Bastian, I. (2010). *An Introduction of Public Sector Accounting*. Jakarta: Erlangga.
- Ball, Ian. (2005). *Achieving greater accountability in government through improved public sector financial reporting*, Paper presented at the 54th Annual Professional Development Conference and Exposition of the US Association of Government Accountants (AGA), Orlando FL, 10–13 July.
- Baydoun, N., and Willett, R., (2000) 'Islamic Corporate Reports' *Abacus*, 36(1), 71-90.
- Ben-David , Perez, Y. V.. (2012). *Internet as freedom – does the internet enhance the freedoms people enjoy?* *Information Technology for Development*, 18(4), 293–310.
- Berman, E., Sabharwal, M., Wang, C. Y., West, J., Jing, Y., Jan, C. Y., & Gomes, R. (2013). *The impact of societal culture on the use of performance strategies in East Asia: Evidence from a comparative survey*. *Public Management Review*, 15(8), 1065-1089.
- Bertsch, A., & Warner-Søderholm, G. (2013). *Exploring societal cultural values and human rights and development*. *SAGE Open*, 3(3), 2158244013502988.
- Bhattarai, Badri Prasad. "Foreign aid and growth in Nepal: An empirical analysis." *The Journal of Developing Areas* 42.2 (2009): 283-302.
- Bisma, I., Gde, D., & Susanto, H. (2010). Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007. *Jurnal Akuntansi*, (3).
- Borins, S. F. (2014). *The persistence of innovation in government* (Vol. 8). Brookings Institution Press with Ash Center for Democratic Governance and Innovation
- Bovaird, Tony dan Löffler, Elke. (2013). *Understanding Public Management and Governance*. New York: Taylor and Francis Group.
- Bussell, J. (2011). Explaining cross-national variation in government adoption of new technologies. *International Studies Quarterly*, 55(1), 267-280.

- Budliardjo, M. (2008). *Basic Political Science*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Caperchione Eugenio & Mussari Ricardo. (2000). *Issues in Local Government Accounting*. Kluwec Academic Publisher
- Cookins, Gary. (2001). *A Management Accounting Framework*. Journal of Corporate Accounting and Finance, volume 13, Issue 1, 2 November 2001.
- Chalu Henry, Seyerine S.A Kessy. (2015). *Accounting Information Systems and Governance Issues in Local Government Authorities in Tanzania*. Business Management Review 15 pp; 36-63
- Chan, J. L., Jones, R. H., & Lüder, K. G. (1996). *Modeling governmental accounting innovations*. *Research in governmental and nonprofit accounting*, 9, 1-19.
- Choi, J. W. (2014). *E-government and corruption: A cross-country survey*. *World Political Science*, 10(2), 217-236.
- Daoud Hazar, Trikl Mohamed i, (2013). *Accounting Information Systems in an ERP Environment and Tunisian Firm Performance*. The International Journal of Digital Accounting Research Vol. 13, 2013, pp. 1 – 35 ISSN: 1577-8517
- Dener, C., Watkins, J.A., Dorotinsky, W.L. (2011), *A World Bank Study: Financial Management Information System*. Washington, DC: World Bank
- Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). *The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update*. *Journal of management information systems*, 19(4), 9-30.
- Faizin, A. (2008). Hubungan Tingkat Pendidikan dan Lama Kerja Perawat dengan Kinerja Perawat di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.
- Fiedler, F. E. (1964). *A theory of leadership effectiveness*. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology*. New York: Academic Press.
- Fontanella, A. (2010). Analisis pengaruh latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi pengguna terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5(2), 22-30.
- Gong, T., & Scott, I. (Eds.). (2016). *Routledge handbook of corruption in Asia*. Taylor & Francis.
- Gordon, L. A., dan Miller, D. (1976). *A Contingency Framework for The Design of Accounting Information System, Accounting Organization and Society*, *The Accounting Review*.
- Gareth Morgan. (2007). *Images of organization*, Thousand Oaks: Sage

- Garcia-Murillo, M. (2010). *The effect of internet access on government corruption*. Available at SSRN 2008249.
- Gray, S., (1988) Towards a Theory of cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally', *Abacus*, 24 (1),1-15.
- Gray, S J (2003). *Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting System Internationally*. *ABACUS* vol 24.
- Gedeona, A. B. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 1(3).
- Ghanem, N. B., & Sulaiman, S. (2016). *Management Accounting System, Information Quality And Organizational Performance: Evidence From Libya*. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2).
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis multivariat dan ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan EVIEWS 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gomes, R., Liddle, J. and Gomes, L. (2010) *Cross-Cultural Analysis of Stakeholder Identification in Municipal Districts*. *Public Management Review*, 12:1 pp53–75.
- Haidar, J. I. (2012). *The impact of business regulatory reforms on economic growth*. *Journal of the Japanese and international economies*, 26(3), 285-307.
- Harryanto. (2017). *Penganggaran Pemerintah Daerah dalam Perspektif Politik, Manajerial dan kepentingan Publik*. Lembaga Kajian Pembangunan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (LKP2SDM)
- Haron Rosmawati, Paino Halil, Mohamed Bafisah. (2014). *Luder's contingency model as an antidote for fraud in public sector*. Researchgate
- Heeks, R., & Stanforth, C. (2007). *Understanding e-Government project trajectories from an actor-network perspective*. *European Journal of Information Systems*, 16(2), 165-177.
- Hofstede, G., (1984). *Culture's consequences, International Differences in Work-Related Values*. Sage, Newbury Park, California.
- Holmes, B. (2011). *Citizens' engagement in policymaking and the design of public services*. Canberra: Parliamentary Library.

- Harrison, G., and McKinnon, J. (1999) 'Cross-Cultural Research in Management Control Systems Design: A Review of the Current State', *Accounting Organisations and Society*, 24, 483-506.
- Harrison, J., Rouse, P. & de Villiers, C. (2012). *Accountability and performance measurement: a stakeholder perspective. The Business and Economics Research Journal*, Vol. 5, No. 2, pp. 243-258.
- Healy, A. J., Malhotra, N., & Mo, C. H. (2010). *Irrelevant events affect voters' evaluations of government performance. Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(29), 12804-12809.
- Henver, A. R., March, S. T., Park, J. and Ram, S. (2004). "Design science in information system research." *MIS Quarterly*, 28 (1), 75-105
- Jakopin, N. M., & Klein, A. (2011). *Determinants of broadband internet access take-up: Country level drivers. Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and Media*, 13(5), 29-47
- Jia Yan, Tae Hoon Oum. (2014). *The effect of government corruption on the efficiency of US commercial Airports. Journal of Urban Economics* 80: 119-132. Elsevier.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (1995). *Organizational behavior* (3rd ed.). Chicago, IL: Irwin.
- Jogiyanto. (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Janson, M. A., and Subramanian, A. (2006). *Packaged software: Selection and Implementation Policies*. *INFOR* 34(2), 133-151.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari bentuk otonomi daerah: suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*. Rineka Cipta.
- Kardan, A. A., & Sadeghiani, A. (2011). *Is e-government a way to e-democracy?: A longitudinal study of the Iranian situation. Government Information Quarterly*, 28(4), 466-473
- Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1996). *Using balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review*, Vol. 74, No. 1, pp. 75-86.
- Katzman, K. (2015). *Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance. Current Politics and Economics of the Middle East*, 6(1), 9.
- Kickert, Walter J.M. Ed. (1997). *Public Management and Administrative Reform in Western Europe*. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar. Kingdon

- Kim, P.-S. (2008) *A Daunting Task in Asia*. *Public Management Review*, 10:4 pp527-37.
- Kock Ned & Gaskins Lebrian. (2014). *The Mediating Role of Voice and Accountability in the Relationship Between Internet Diffusion and Government Corruption in Latin America and Sub-Saharan Africa*, *Information Technology for Development*, 20:1, 23-43
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). *The quality of government*. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, 15(1), 222-279.
- Lee, C. P., Chang, K., & Berry, F. S. (2011). *Testing the development and diffusion of e-government and e-democracy: A global perspective*. *Public Administration Review*, 71(3), 444-454.
- livari, J. (2005). *An empirical test of the DeLone-McLean model of information system success*. *ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems*, 36(2), 8-27.
- Lüder, K.G. (1992) , *A Contingency Model of Governmental Accounting Innovations in the Political-Administrative Environment*. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*, Vol. 7, pp. 99-127.
- Lüder (1994), „The "Contingency Model" Reconsidered: Experiences from Italy, Japan and Spain". In: Buscher, E. and Schedler, K. (eds.) *Perspectives on Performance Measurement and Public Sector Auditing*. Berne: Paul Haupt Publishers, pp. 1-15.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN., Yogyakarta.
- Mamary Yaser H, Sahmsuddin Alina, Aziati nor, (2014) , *The relationship between system quality , information quality, and organizational performance*. *International journal of knowledge and research in management & e commerce*, vol.4 issue 3 july 2014
- Marble, R. P. (2003). *A System Implementation Study: Management Commitment to Project Management*. *Information & Management*, 41(1), 111-123.
- Napitupulu, H. M., & Mashur, D. (2015). *Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2013*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 1-15.
- Nazeer M. A., P. Bimal. (2014). *Participatory E-Budgeting Using GIS-Based Spatial Decision Support System: Kozhikode Municipal Corporation*. *E-Governance for Smart Cities* pp 307-350

- Nurbaningsih enny (2011). Berbagai Bentuk Penguasaan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas
- Nistor cristina silvia, Stefanescu cristina alexandrina, Sintejudeanu mara andrea (2016). *Performance management and Balance Scorecad-a link for public sector*. Journal of Accounting and Management.
- Noordegraaf, M. and Vermeulen, J. (2010) *Culture in Action: The 'Rotterdam Approach' as Modernization Through Tradition*. Public Administration, 88:2 pp513-27.
- Organisation for Economic CO-operation and Development (2014)
- Organisation for Economic CO-operation and Development (2016)
- Otley, DT. (1980). *The contingency theory of management accounting. Achievement and prognosis*. Accounting organization and society
- Ou, C. X., Davison, R. M., & Huang, V. Q. (2016). *The Social Networking Application Success Model*. International Journal of Knowledge Content Development & Technology, 6(1), 5-39.
- Palvia, S. C. J., & Sharma, S. S. (2016). *E-government and e-governance: definitions/domain framework and status around the world*.
- Pangalila, C., Elim, I., & Walandouw, S. K. (2017). Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Keuangan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2).
- Paradenti Ekasary , Evelin J. R Kawung, Jhon D. Zakarias. (2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengawasan Anggaran Dana Desa (Add) (Studi Kasus Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud). *HOLISTIK*, Tahun X No. 20 / Juli - Desember 2017
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). *Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc*. Journal of retailing, 64(1), 12.
- Parrado, S. (2008). *Failed policies but institutional innovation through "layering" and "diffusion" in Spanish central administration*. International Journal of Public Sector Management, 21(2), 230-252.
- Pavlou, P. A., & El Sawy, O. A. (2006). *From IT leveraging competence to competitive advantage in turbulent environments: The case of new product development*. Information Systems Research, 17(3), 198-227.

- Pérez, C. C., Hernández, A. M. L., & Bolívar, M. P. R. (2005). *Citizens' access to on-line governmental financial information: Practices in the European Union countries*. *Government Information Quarterly*, 22(2), 258-276.
- Pratiwi, M. N., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2016). *Influencing Factors of Successful Employment of e-Audit in The Audit Board of Republic Indonesia*. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*, 2(12).
- Perera, M., (1989) 'Towards a Framework to Analyse the Impact of Culture on Accounting', *International Journal of Accounting*, 24, 42-56.
- Ralston, D., Holt, D., Terpstra, R. and Kai-Cheng, Y., (1997) 'The Impact of National Culture and Economic Ideology on Managerial Work Values: A Study of the United States, Russia, Japan, and China' *Journal of International Business Studies*, First Quarter, 177-207.
- Rafiee, V., & Sarabdeen, J. (2012). *The cultural influence in the practice of corporate governance in emerging markets*.
- Ralston, D., Holt, D., Terpstra, R. and Cheng, Y.-K. (2008) *The Impact of Societal Culture and Economic Ideology on Managerial Work Values: A Study of the United States, Russia, Japan, and China*. *Journal of International Business Studies*, 39:1 pp8-26.
- Ramseook-Munhurrun, P., Lukea-Bhiwajee, S. D., & Naidoo, P. (2010). *Service quality in the public service*.
- Roller edeltraud. (2015). *Welfare state and political culture in unified Germany*. ISSN: 0964-4008 (Print) 1743-8993 (Online) [Journal homepage](#)
- Rotberg, Robert (July 2014). "Good Governance Means Performance and Results". *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 27 (3): 511-518
- Saleh Zakiah. (2007). *Malaysian Governmental Accounting: National Context and User Orientation*. *International Review of Business Research Papers* Vol.3 No.2 June 2007, Pp.376 - 384
- Salim, M., Peng, X., Almaktary, S., & Karmoshi, S. (2017). *The impact of citizen satisfaction with government performance on public trust in the government: empirical evidence from urban Yemen*. *Open Journal of Business and Management*, 5(02), 348.
- Sari intan paramita & Arifin Johan . (2016). *Analysis of Factors Influencing the Successful E-Procurement Implementation*. *Analysis of Factors Influencing the Successful E-Procurement Implementation*.
- Schuppan, T. (2009). *E-Government in developing countries: Experiences from sub-Saharan Africa*. *Government Information Quarterly*, 26(1), 118-127.



- Schiavo-Campo, S. and Tommasi, D. (1999) *Managing government expenditure*. Manila: ADB.
- Seddon, P. B. (1997). *A respecification and extension of the DeLone and McLean model of IS success*. *Information systems research*, 8(3), 240-253.
- Seyal, A. H., & Rahman, N. A. (2015). *A Preliminary Investigation of Measuring Users Satisfaction & Success on Financial & Accounting Information System: Bruneian Perspective*. *International Journal of Business and Management Review*, 3(2), 1-22.)
- Sirsat, S. S., & Sirsat, M. S. (2016). *A Validation of The Delone And Mclean Model On The Educational Information System Of The Maharashtra State (India)*. *International Journal of Education and Learning Systems*, 1
- Solihah Ratnia . (2017). *Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. *Jurnal TAPIS*. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/tapis.v13i2.2039>
- Song, M., & Guan, Y. (2015). *The electronic government performance of environmental protection administrations in Anhui province, China*. *Technological Forecasting and Social Change*, 96, 79-88.
- Spencer-Oatey, H. (Ed.). (2008). *Culturally Speaking Second Edition: Culture, Communication and Politeness Theory*. Bloomsbury Publishing.
- Stanbury, W.T. (2003). *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*, Fraser Institute Digital Publication, Canada.
- Stanig, P. (2015). *Regulation of speech and media coverage of corruption: an empirical analysis of the Mexican press*. *American Journal of Political Science*, 59(1), 175-193..
- Sterrenberg, G. (2016). *Measuring IS success of e-government: A Case Study on the Disability Sector in Australia*.
- Stewart & Ranson. (1988). *Management in the Public Domain, Public Money and Management*, Vol.89, No.1/2
- Stier, S. (2015). *Political determinants of e-government performance revisited: Comparing democracies and autocracies*. *Government Information Quarterly*, 32(3), 270-278.
- Suwondo (2013). *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi Di Dprd Kota Malang)* Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai,. *urnal Administrasi Publik (JAP)*

- Schiavo-Campo, S. and Tommasi, D. (1999) *Managing government expenditure*. Manila: ADB.
- Seddon, P. B. (1997). *A respecification and extension of the DeLone and McLean model of IS success*. *Information systems research*, 8(3), 240-253.
- Seyal, A. H., & Rahman, N. A. (2015). *A Preliminary Investigation of Measuring Users Satisfaction & Success on Financial & Accounting Information System: Bruneian Perspective*. *International Journal of Business and Management Review*, 3(2), 1-22.)
- Sirsat, S. S., & Sirsat, M. S. (2016). *A Validation of The Delone And Mclean Model On The Educational Information System Of The Maharashtra State (India)*. *International Journal of Education and Learning Systems*, 1
- Solihah Ratnia . (2017). *Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. *Jurnal TAPIS*. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/tapis.v13i2.2039>
- Song, M., & Guan, Y. (2015). *The electronic government performance of environmental protection administrations in Anhui province, China*. *Technological Forecasting and Social Change*, 96, 79-88.
- Spencer-Oatey, H. (Ed.). (2008). *Culturally Speaking Second Edition: Culture, Communication and Politeness Theory*. Bloomsbury Publishing.
- Stanbury, W.T. (2003). *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*, Fraser Institute Digital Publication, Canada.
- Stanig, P. (2015). *Regulation of speech and media coverage of corruption: an empirical analysis of the Mexican press*. *American Journal of Political Science*, 59(1), 175-193..
- Sterrenberg, G. (2016). *Measuring IS success of e-government: A Case Study on the Disability Sector in Australia*.
- Stewart & Ranson. (1988). *Management in the Public Domain, Public Money and Management*, Vol.89, No.1/2
- Stier, S. (2015). *Political determinants of e-government performance revisited: Comparing democracies and autocracies*. *Government Information Quarterly*, 32(3), 270-278.
- Suwondo (2013). *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi Di Dprd Kota Malang) Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, . urnal Administrasi Publik (JAP)*

- Supriyono, R. A. (2006). Pengaruh Usia, Keinginan Sosial, Kecukupan Anggaran, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Manajer Di Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 21(1), 59-74.
- Suhariyanto Eko Sri. (2016). *Transparansi Anggaran melalui e-budgeting*. Jakarta
- Spiller Pablo T, Tommasi Mariano. (2003). *The Institutional Foundations of Public Policy: A Transactions Approach with Application to Argentina*. The Journal of Law, Economics & Organization Vol. 19, No.2. Oxford University Press 2003.
- Suwarno, Yogi. (2013). *Inovasi di Sektor Publik. Laporan Penelitian*. STIA-LAN
- Treisman, D.,(2000). *The causes of corruption: a cross-national study*. Journal of Public Economics 76, 399-457.
- Upping, P., & Oliver, J. (2011). *Accounting change model for the public sector: adapting luder's model for developing countries*. *International Review of Business Research Papers*, 7(1), 364-380.
- Wangi, Chitra Ariesta P., dan Ritonga, Irwan T. 2010. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jom FEKON Vol.4 No.1 (April) 2017 2508 . Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Warner-Soderholm, G. (2010). *Understanding perceptions of cultural and intracultural societal practices and values of Norwegian managers (DBA thesis)*. Reading University, UK
- Waweru, N. Haque, Z. Uliana. (2004). *Management Accounting Change In South Africa: Case Studies From Retail Services*. *Journal Accounting Auditing An Accountability*.
- Widjaja, H. A. W. (2005). *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. RajaGrafindo Persada.
- Wijayanto, H. (2015). *Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance)*. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72-88.
- Williams, R. M. Jr. (1970). *American Society*. New York: Knopf.
- Williams, R. (1965). *The Long Revolution*, Harmondsworth: Penguin.
- Yuslianti. (2017). *Urgensi anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) terhadap perencanaan pembangunan daerah*. *Jurnal katalogis, volume 5 nomor 4, april 2017 him 160-171*

Zakaria Zaherawati . (2011). *Measuring Local Government Performance in Malaysia: Political Indicators Versus Organisational Theory*. *Voice of Academia* Vol. 6(1), 2011

Zhang, N., Guo, X., & Chen, G. (2011). *Why adoption and use behavior of IT/IS cannot last?—two studies in China*. *Information Systems Frontiers*, 13(3), 381-395

## KUESIONER

Bapak/Ibu yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda mengisi kuesioner ini.

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan penyelesaian tugas akhir Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Pengaruh Teknologi Informasi Pada Penganggaran Publik Dalam Menguatkan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia".

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai dengan benar atau salah dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Bapak/Ibu/Saudara/I ditempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, peneliti mengucapkan terima kasih

## Daftar Singkatan

RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
KUA : Kebijakan Umum Anggaran  
PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Bagian I

### Data Responden

Nama Instansi	:	
Nama Responden	:	
Jenis Kelamin	:	Pria / Wanita
Latar Belakang Pendidikan	:	a. Ekonomi/Akuntansi/Manajemen b. Hukum c. Sosial d. Lainnya
Pendidikan Terakhir	:	a. SLTA/Diploma (D3) b. Strata 1 (Sarjana) c. Strata 2 (Magister) d. Strata 3(Doktor)
Lama Bekerja	:	a. 1- 5 tahun b. 6-10 tahun c. >10 tahun
Usia	:	a. 20-30 tahun b. 31 – 40 tahun c. 40 – 50 tahun d. >50 tahun

## Bagian II

Berilah tanda (√) pada pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan terkait pernyataan-pernyataan berikut. Adapun kriteria dari pernyataan dibawah ini adalah sebagai berikut:

Pernyataan	Nilai/Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

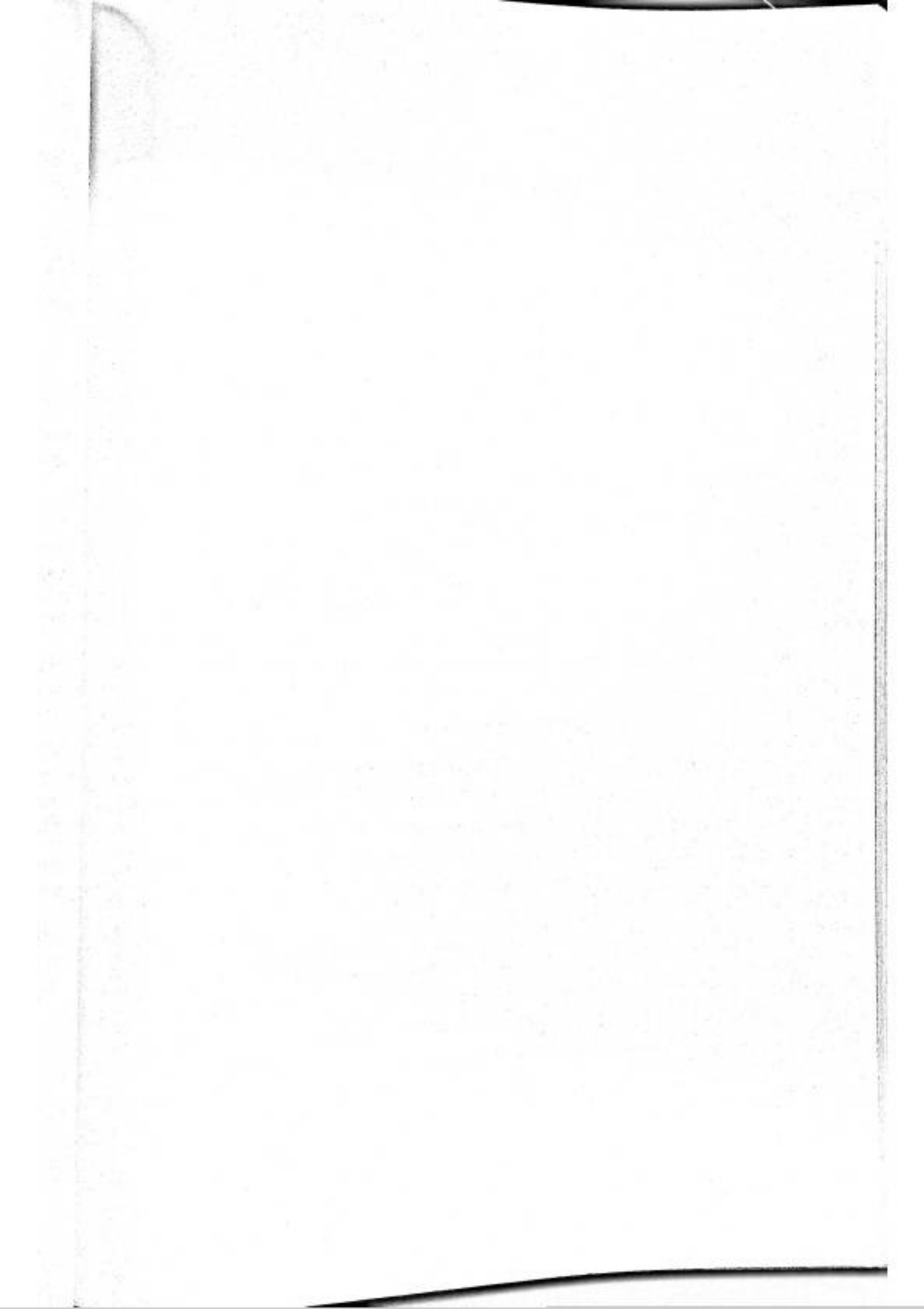
Budaya Sosial (X1)						
No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
Keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (X1.1)						
1	Masyarakat mengetahui tujuan Musrenbang					
2	Masyarakat memperoleh informasi terkait pelaksanaan musrenbang.					
3	Tokoh Masyarakat, akademisi, organisasi non pemerintah ikut serta dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan, kecamatan, kota					
Dengar Pendapat (Public Hearing) (X1.2)						
1	Public hearing dilaksanakan dalam proses perumusan kebijakan publik.					
2	Public hearing dilaksanakan dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat.					

3	Public hearing adalah salah satu komunikasi langsung antara masyarakat dan DPRD					
<b>Pengawasan Anggaran (X1.3)</b>						
1	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan SKPD.					
2	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah.					
3	Masyarakat dapat mengakses laporan kinerja SKPD.					
4	Masyarakat dapat mengakses laporan kinerja pemerintah daerah.					

<b>Budaya Politik (X2)</b>						
No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
<b>Penjaringan Aspirasi Masyarakat (X2.1)</b>						
1	Pelaksanaan Reses merupakan kewajiban bagi pemimpin maupun anggota DPRD yang dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat.					
2	Reses DPRD bertujuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan					
3	DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil Reses/penjaringan aspirasi masyarakat.					
<b>Pembahasan APBD (X2.2)</b>						
1	Jangka waktu pembahasan anggaran terlalu singkat					



2	Pembahasan APBD oleh DPRD terkait dengan Prioritas Pemerintah Daerah					
3	Dalam pembahasan APBD, DPRD berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS					
Persetujuan APBD (X2.3)						
1	Persetujuan APBD oleh DPRD dan kepala daerah sesuai dengan kalender anggaran					
2	DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif.					
3	APBD disahkan melalui peraturan kepala daerah, jika terjadi <i>deadlock</i> ,					
Pengawasan (X2.4)						
1	DPRD melaksanakan pengawasan aspek hasil reses dikaitkan dengan penetapan APBD					
2	DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh SKPD					
3	DPRD memberitahukan kepada satuan pengawas internal/instansi penyidik jika terjadi dugaan penyimpangan					



<b>Budaya administratif (X3)</b>						
No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
<b>Perencanaan APBD(X3.1)</b>						
1	Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi dan program kepala daerah yang ingin dicapai					
2	RKPD memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya					
3	Dokumen KUA didasarkan pada dokumen RKPD dalam periode tersebut					
<b>Penyusunan APBD(X3.2)</b>						
1	Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepkatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD					
2	Penyusunan RKA-SKPD, RAPBD mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati					
<b>Penetapan APBD(X3.3)</b>						
1	Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD					
2	Penetapan APBD dilaksanakan tepat waktu					
<b>Pertanggungjawaban (X3.4)</b>						
1	Setiap SKPD menyajikan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi anggaran, Catatan atas laporan keuangan.					
2	Setiap SKPD menghasilkan laporan kinerja SKPD					

Teknologi Informasi (Z1)						
No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
Kualitas Informasi (Z1.1)						
1	Informasi yang didapatkan pada E-planning sesuai dengan data yang sebenarnya.					
2	Informasi yang didapatkan pada E-Budgeting sesuai dengan data yang sebenarnya.					
3	Data yang terdapat pada E-planning adalah informasi yang terkini					
4	Data yang terdapat pada E-Budgeting adalah informasi yang terkini					
Kualitas Sistem (Z1.2)						
1	Sistem E-Planning memberikan fasilitas perbaikan jika terjadi kegagalan sistem					
2	Sistem E-Budgeting memberikan fasilitas perbaikan jika terjadi kegagalan sistem					
3	Sistem E-planning mudah digunakan					
4	Sistem E-Budgeting mudah digunakan.					
Kualitas Layanan (Z1.3)						
1	Penggunaan sistem merasa aman dalam mengakses data melalui sistem					
2	Pengguna sistem mempunyai pengetahuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik					
3	Pemanfaatan teknologi mempermudah dalam menyebarkan informasi terkait laporan Keuangan, LRA, Neraca, dll dalam website yang resmi.					
4	Sistem memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang dilakukan					
5	Sistem informasi didukung oleh teknisi yang profesional jika memiliki masalah					

Kinerja Pemerintah (Y)						
No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		E-government completeness degree (Y1.1)				
1	Keterlambatan penyusunan anggaran dapat dihindari sejak proses penganggaran berbasis elektronik					
2	Kebocoran anggaran APBD berkurang sejak proses penganggaran berbasis elektronik					
3	Terjadi penghematan anggaran sejak proses penganggaran berbasis elektronik					
4	Pencapaian kinerja anggaran yang efektif sejak proses penganggaran berbasis elektronik					
5	Pencapaian kinerja anggaran yang efisien sejak proses penganggaran berbasis elektronik					
E-government participation degree (Y1.2)						
1	Kemudahan masyarakat dalam mengawasi anggaran sejak proses penganggaran berbasis elektronik					
2	Peningkatan transparansi terhadap masyarakat sejak proses penganggaran berbasis elektronik					
3	Peningkatan akuntabilitas terhadap masyarakat sejak proses penganggaran berbasis elektronik					
4	Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sejak proses penganggaran berbasis elektronik					

— Terima Kasih —

# DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN

## Variabel X1

### X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1,5	1,5	1,5
	TS	5	2,5	2,5	4,0
	KS	7	3,5	3,5	7,5
	S	77	38,5	38,5	46,0
	SS	108	54,0	54,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

### X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1,5	1,5	1,5
	TS	25	12,5	12,5	14,0
	KS	51	25,5	25,5	39,5
	S	93	46,5	46,5	86,0
	SS	28	14,0	14,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

### X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,0	1,0	1,0
	TS	26	13,0	13,0	14,0
	KS	42	21,0	21,0	35,0
	S	91	45,5	45,5	80,5
	SS	39	19,5	19,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

### X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1,5	1,5	1,5
	TS	27	13,5	13,5	15,0
	KS	46	23,0	23,0	38,0
	S	89	44,5	44,5	82,5
	SS	35	17,5	17,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,0	1,0	1,0
	TS	6	3,0	3,0	4,0
	KS	8	4,0	4,0	8,0
	S	118	59,0	59,0	67,0
	SS	66	33,0	33,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	TS	8	4,0	4,0	4,5
	KS	5	2,5	2,5	7,0
	S	112	56,0	56,0	63,0
	SS	74	37,0	37,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1,5	1,5	1,5
	TS	9	4,5	4,5	6,0
	KS	27	13,5	13,5	19,5
	S	117	58,5	58,5	78,0
	SS	44	22,0	22,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1,5	1,5	1,5
	TS	7	3,5	3,5	5,0
	KS	20	10,0	10,0	15,0
	S	118	59,0	59,0	74,0
	SS	52	26,0	26,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	2,0	2,0	2,0
	TS	8	4,0	4,0	6,0
	KS	28	14,0	14,0	20,0
	S	123	61,5	61,5	81,5
	SS	37	18,5	18,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

## Variabel X2

### X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,0	1,0	1,0
	TS	14	7,0	7,0	8,0
	KS	17	8,5	8,5	16,5
	S	118	59,0	59,0	75,5
	SS	49	24,5	24,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

### X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,0	1,0	1,0
	TS	1	,5	,5	1,5
	KS	8	4,0	4,0	5,5
	S	109	54,5	54,5	60,0
	SS	80	40,0	40,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

### X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1,5	1,5	1,5
	TS	1	,5	,5	2,0
	KS	3	1,5	1,5	3,5
	S	109	54,5	54,5	58,0
	SS	84	42,0	42,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

### X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,0	1,0	1,0
	TS	3	1,5	1,5	2,5
	KS	8	4,0	4,0	6,5
	S	113	56,5	56,5	63,0
	SS	74	37,0	37,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	



X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5		
	TS	4	2,0	,5	,5
	KS	11	5,5	2,0	2,5
	S	114	57,0	5,5	8,0
	SS	70	35,0	57,0	65,0
	Total	200	100,0	35,0	100,0
				100,0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1,5	1,5	1,5
	KS	14	7,0	7,0	8,5
	S	110	55,0	55,0	63,5
	SS	73	36,5	36,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	2,0	2,0	2,0
	TS	5	2,5	2,5	4,5
	KS	35	17,5	17,5	22,0
	S	105	52,5	52,5	74,5
	SS	51	25,5	25,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	TS	5	2,5	2,5	3,0
	KS	19	9,5	9,5	12,5
	S	129	64,5	64,5	77,0
	SS	46	23,0	23,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X2.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1,5	1,5	1,5
	TS	6	3,0	3,0	4,5
	KS	27	13,5	13,5	18,0
	S	117	58,5	58,5	76,5
	SS	47	23,5	23,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X2.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	2,5		
	TS	10	5,0	2,5	2,5
	KS	47	23,5	5,0	7,5
	S	105	52,5	23,5	31,0
	SS	33	16,5	52,5	83,5
	Total	200	100,0	16,5	100,0

X2.11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	TS	6	3,0	3,0	3,5
	KS	32	16,0	16,0	19,5
	S	122	61,0	61,0	80,5
	SS	39	19,5	19,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X2.12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	TS	2	1,0	1,0	1,5
	KS	9	4,5	4,5	6,0
	S	133	66,5	66,5	72,5
	SS	55	27,5	27,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

## Variabel X3

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	TS	4	2,0	2,0	2,5
	KS	11	5,5	5,5	8,0
	S	129	64,5	64,5	72,5
	SS	55	27,5	27,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	TS	6	3,0	3,0	3,5
	KS	14	7,0	7,0	10,5
	S	137	68,5	68,5	79,0
	SS	42	21,0	21,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1,5	1,5	1,5
	TS	3	1,5	1,5	3,0
	KS	18	9,0	9,0	12,0
	S	109	54,5	54,5	66,5
	SS	67	33,5	33,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,0	1,0	1,0
	KS	5	2,5	2,5	3,5
	S	92	46,0	46,0	49,5
	SS	101	50,5	50,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,0	1,0	1,0
	TS	8	4,0	4,0	5,0
	KS	21	10,5	10,5	15,5
	S	102	51,0	51,0	66,5
	SS	67	33,5	33,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,0	1,0	1,0
	KS	5	2,5	2,5	3,5
	S	102	51,0	51,0	54,5
	SS	91	45,5	45,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X3.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,0		
	TS	1	,5	1,0	1,0
	KS	14	7,0	,5	1,5
	S	112	56,0	7,0	8,5
	SS	71	35,5	56,0	64,5
	Total	200	100,0	35,5	100,0
				100,0	

X3.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	3,5	3,5	3,5
	KS	17	8,5	8,5	12,0
	S	117	58,5	58,5	70,5
	SS	59	29,5	29,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

X3.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	3,0	3,0	3,0
	KS	19	9,5	9,5	12,5
	S	119	59,5	59,5	72,0
	SS	56	28,0	28,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

## Variabel Z

Z1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	6	3,0	3,0	3,0
	S	127	63,5	63,5	66,5
	SS	67	33,5	33,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	KS	11	5,5	5,5	6,0
	S	117	58,5	58,5	64,5
	SS	71	35,5	35,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	TS	2	1,0	1,0	1,5
	KS	22	11,0	11,0	12,5
	S	112	56,0	56,0	68,5
	SS	63	31,5	31,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1,5	1,5	1,5
	KS	9	4,5	4,5	6,0
	S	116	58,0	58,0	64,0
	SS	72	36,0	36,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	1,0	1,0	1,0
	KS	5	2,5	2,5	3,5
	S	114	57,0	57,0	60,5
	SS	79	39,5	39,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1,5	1,5	1,5
	KS	12	6,0	6,0	7,5
	S	120	60,0	60,0	67,5
	SS	65	32,5	32,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	TS	3	1,5	1,5	2,0
	KS	10	5,0	5,0	7,0
	S	120	60,0	60,0	67,0
	SS	66	33,0	33,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	2,0		
	KS	10	5,0	2,0	2,0
	S	121	60,5	5,0	7,0
	SS	65	32,5	60,5	67,5
	Total	200	100,0	32,5	100,0
				100,0	

Z1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	1,0	1,0	1,0
	KS	11	5,5	5,5	6,5
	S	125	62,5	62,5	69,0
	SS	62	31,0	31,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	3,5	3,5	3,5
	KS	17	8,5	8,5	12,0
	S	123	61,5	61,5	73,5
	SS	53	26,5	26,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1,5	1,5	1,5
	KS	10	5,0	5,0	6,5
	S	121	60,5	60,5	67,0
	SS	66	33,0	33,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	,5	,5	,5
	KS	7	3,5	3,5	4,0
	S	119	59,5	59,5	63,5
	SS	73	36,5	36,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Z1.13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1,5		
	KS	9	4,5	1,5	1,5
	S	142	71,0	4,5	6,0
	SS	46	23,0	71,0	77,0
	Total	200	100,0	23,0	100,0
				100,0	

## Variabel Y

Y1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	1,0	1,0	1,0
	S	91	45,5	45,5	46,5
	SS	107	53,5	53,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Y1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	1,0	1,0	1,0
	KS	8	4,0	4,0	5,0
	S	108	54,0	54,0	59,0
	SS	82	41,0	41,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Y1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	KS	4	2,0	2,0	2,5
	S	107	53,5	53,5	56,0
	SS	88	44,0	44,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Y1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	KS	10	5,0	5,0	5,5
	S	98	49,0	49,0	54,5
	SS	91	45,5	45,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Y1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,5	,5	,5
	TS	3	1,5	1,5	2,0
	KS	8	4,0	4,0	6,0
	S	110	55,0	55,0	61,0
	SS	78	39,0	39,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Y1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	,5	,5	,5
	KS	9	4,5	4,5	5,0
	S	127	63,5	63,5	68,5
	SS	63	31,5	31,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Y1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1,5	1,5	1,5
	KS	8	4,0	4,0	5,5
	S	94	47,0	47,0	52,5
	SS	95	47,5	47,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Y1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	1,0	1,0	1,0
	KS	5	2,5	2,5	3,5
	S	94	47,0	47,0	50,5
	SS	99	49,5	49,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Y1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	1,0	1,0	1,0
	KS	15	7,5	7,5	8,5
	S	93	46,5	46,5	55,0
	SS	90	45,0	45,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	



# PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS

## Variabel X1

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	200	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	200	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,856	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	31,2650	23,512	,358	,861
X1.2	32,0850	20,963	,600	,839
X1.3	31,9800	20,763	,599	,840
X1.4	32,0450	21,179	,538	,847
X1.5	31,4750	21,758	,676	,833
X1.6	31,4250	22,246	,600	,840
X1.7	31,7250	21,487	,630	,836
X1.8	31,6300	21,732	,615	,838
X1.9	31,7700	21,404	,650	,834

## Variabel X2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	199	99,5
	Excluded <sup>a</sup>	1	,5
	Total	200	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,881	12

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	45,3869	29,299		
X2.2	45,0553	29,568	,418	,883
X2.3	45,0251	28,449	,517	,875
X2.4	45,1005	28,505	,666	,867
X2.5	45,1357	28,613	,640	,869
X2.6	45,1055	28,923	,638	,869
X2.7	45,4020	28,726	,630	,870
X2.8	45,3015	29,676	,479	,879
X2.9	45,3819	27,884	,588	,877
X2.10	45,6131	27,976	,632	,869
X2.11	45,4070	28,091	,544	,875
X2.12	45,1759	28,681	,678	,866
			,727	,865

### Variabel X3

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	200	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	200	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,815	9

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	33,7150	13,320	,599	,799
X3.2	33,8150	13,478	,453	,804
X3.3	33,7100	12,408	,577	,789
X3.4	33,4300	12,940	,596	,788
X3.5	33,7600	12,445	,518	,797
X3.6	33,4800	13,517	,468	,802
X3.7	33,6350	12,816	,575	,790
X3.8	33,7400	13,048	,505	,798
X3.9	33,7550	13,422	,439	,806

## Variabel Z

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	200	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	200	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,919	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Z1.1	50,8650	28,941	,565	,916
Z1.2	50,8850	28,796	,490	,919
Z1.3	51,0000	27,538	,599	,915
Z1.4	50,8850	27,399	,709	,910
Z1.5	50,8200	27,475	,750	,909
Z1.6	50,9350	27,408	,701	,910
Z1.7	50,9350	27,086	,713	,914
Z1.8	50,9350	27,840	,621	,908
Z1.9	50,9350	27,227	,778	,913
Z1.10	51,0600	27,283	,640	,913
Z1.11	50,9200	27,159	,756	,908
Z1.12	50,8500	28,490	,594	,915
Z1.13	51,0150	28,608	,581	,915

## Variabel Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	200	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	200	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,919	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	34,9200	14,918	,768	,907
Y1.2	35,0850	15,023	,668	,913
Y1.3	35,0300	14,813	,751	,907
Y1.4	35,0450	14,757	,696	,911
Y1.5	35,1300	14,506	,707	,910
Y1.6	35,1750	15,442	,632	,915
Y1.7	35,0300	14,281	,792	,904
Y1.8	34,9850	14,819	,728	,909
Y1.9	35,0800	14,607	,688	,912

## STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	200	1.00	5.00	4.4100	.80320
X1.2	200	1.00	5.00	3.5900	.93072
X1.3	200	1.00	5.00	3.6950	.96260
X1.4	200	1.00	5.00	3.6300	.97357
X1.5	200	1.00	5.00	4.2000	.73669
X1.6	200	1.00	5.00	4.2500	.73498
X1.7	200	1.00	5.00	3.9500	.81906
X1.8	200	1.00	5.00	4.0450	.79759
X1.9	200	1.00	5.00	3.9050	.81196
X1	200	1.13	5.00	3.9081	.60612
Valid N (listwise)	200				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	199	3.00	5.00	4.2362	.59416
X2.2	200	3.00	5.00	4.3750	.56210
X2.3	200	3.00	5.00	4.4250	.52512
X2.4	200	3.00	5.00	4.3550	.55725
X2.5	200	3.00	5.00	4.3200	.57380
X2.6	200	3.00	5.00	4.3100	.59639
X2.7	200	3.00	5.00	4.1250	.67947
X2.8	200	3.00	5.00	4.1650	.57395
X2.9	200	3.00	5.00	4.1450	.62925
X2.10	200	3.00	5.00	4.0050	.69091
X2.11	200	3.00	5.00	4.0700	.62212
X2.12	200	3.00	5.00	4.2450	.52570
X2	200	1.44	5.00	4.1500	.50776
Valid N (listwise)	199				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	200	1.00	5.00	4.1650	.65569
X3.2	200	1.00	5.00	4.0650	.66557
X3.3	200	1.00	5.00	4.1700	.77076
X3.4	200	1.00	5.00	4.4500	.64776
X3.5	200	1.00	5.00	4.1200	.82401
X3.6	200	1.00	5.00	4.4000	.64192
X3.7	200	1.00	5.00	4.2450	.69091
X3.8	200	1.00	5.00	4.2450	.70916
X3.9	200	2.00	5.00	4.1400	.69411
X3	200	2.00	5.00	4.1250	.52090
Valid N (listwise)	200	1.20	5.00	4.2250	

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Z1.1	200	3.00	5.00	4.3050	.52282
Z1.2	200	1.00	5.00	4.2850	.61291
Z1.3	200	1.00	5.00	4.1700	.69535
Z1.4	200	2.00	5.00	4.2850	.62105
Z1.5	200	2.00	5.00	4.3500	.58241
Z1.6	200	2.00	5.00	4.2350	.62589
Z1.7	200	1.00	5.00	4.2350	.65722
Z1.8	200	2.00	5.00	4.2350	.63366
Z1.9	200	2.00	5.00	4.2350	.59290
Z1.10	200	2.00	5.00	4.1100	.69304
Z1.11	200	2.00	5.00	4.2500	.61595
Z1.12	200	2.00	5.00	4.3200	.56497
Z1.13	200	2.00	5.00	4.1550	.55905
Z	200	2.00	5.00	4.2438	.43781
Valid N (listwise)	200				

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1.1	200	2.00	5.00	4.5150	.55797
Y1.2	200	2.00	5.00	4.3500	.60774
Y1.3	200	1.00	5.00	4.4050	.58540
Y1.4	200	1.00	5.00	4.3900	.63238
Y1.5	200	1.00	5.00	4.3050	.66648
Y1.6	200	2.00	5.00	4.2600	.58033
Y1.8	200	2.00	5.00	4.4050	.64268
Y1.7	200	2.00	5.00	4.4500	.59941
Y1.8	200	2.00	5.00	4.3550	.66421
Y1.9	200	1.67	5.00	4.3817	.47840
Y					
Valid N (listwise)	200				

**Deskripsi Profil Responden**

		Statistics				
		Jenis Kelamin	Latar Belakang Keilmuan	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Usia
N	Valid	200	200	200	200	200
	Missing	0	0	0	0	0

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	133	66,5	66,5	66,5
	Perempuan	67	33,5	33,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

**Latar Belakang Keilmuan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ekonomi	62	31,0	31,0	31,0
	Hukum	46	23,0	23,0	54,0
	Lainnya	41	20,5	20,5	74,5
	4	51	25,5	25,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

**Pendidikan Terakhir**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA/D3	20	10,0	10,0	10,0
	S1	98	49,0	49,0	59,0
	S2	49	24,5	24,5	83,5
	S3	33	16,5	16,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

**Masa Kerja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5 Tahun	63	31,5	31,5	31,5
	6-10 Tahun	99	49,5	49,5	81,0
	> 10 Tahun	38	19,0	19,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

**Usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 Tahun	55	27,5	27,5	27,5
	31-40 Tahun	68	34,0	34,0	61,5
	40-50 Tahun	47	23,5	23,5	85,0
	> 50 Tahun	30	15,0	15,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

**Uji Homogenitas**

**Jenis Kelamin**

**Test of Homogeneity of Variances**

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
X1	,060	1	198	,806
X2	3,201	1	198	,075
X3	,433	1	198	,511
Z	,097	1	198	,755
Y	,419	1	198	,518

**Latar Belakang Keilmuan**

**Test of Homogeneity of Variances**

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
X1	6,133	3	196	,001
X2	1,373	3	196	,252
X3	,459	3	196	,711
Z	1,372	3	196	,253
Y	,619	3	196	,604

### *Pendidikan Terakhir*

#### Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
X1	2,474	3	196	,063
X2	4,159	3	196	,007
X3	,149	3	196	,930
Z	,684	3	196	,563
Y	2,588	3	196	,054

### *Masa Kerja*

#### Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
X1	,894	2	197	,411
X2	2,453	2	197	,089
X3	,466	2	197	,628
Z	,154	2	197	,858
Y	1,019	2	197	,363

### *Usia*

#### Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
X1	2,393	3	196	,070
X2	1,005	3	196	,392
X3	,304	3	196	,822
Z	1,083	3	196	,357
Y	,908	3	196	,438

### *Kelompok Birokrasi, DPRD, Masyarakat*

#### Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
X1	,861	2	197	,424
X2	1,934	2	197	,147
X3	,974	2	197	,379
Z	1,459	2	197	,235
Y	1,822	2	197	,164



## Pengaruh Langsung Variabel Penelitian

### Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kinerja_Pemerintah	<--- Budaya_Sosial	-,039	,043	-,918	,359	par_28
Kinerja_Pemerintah	<--- Budaya_Politik	,296	,149	1,982	,048	par_29
Kinerja_Pemerintah	<--- Budaya_Administrasi	,707	,124	5,713	***	par_30
X1.2	<--- Budaya_Sosial	1,000				
X1.3	<--- Budaya_Sosial	,813	,061	13,353	***	par_1
X1.4	<--- Budaya_Sosial	,832	,060	13,804	***	par_2
X1.5	<--- Budaya_Sosial	,683	,047	14,389	***	par_3
X1.6	<--- Budaya_Sosial	,686	,047	14,512	***	par_4
X1.7	<--- Budaya_Sosial	,544	,056	9,738	***	par_5
X1.9	<--- Budaya_Sosial	,600	,055	10,994	***	par_6
X2.2	<--- Budaya_Politik	1,000				
X2.3	<--- Budaya_Politik	1,800	,375	4,799	***	par_7
X2.4	<--- Budaya_Politik	1,640	,374	4,378	***	par_8
X2.5	<--- Budaya_Politik	1,952	,471	4,143	***	par_9
X2.6	<--- Budaya_Politik	1,875	,468	4,006	***	par_10
X2.9	<--- Budaya_Politik	2,217	,531	4,174	***	par_11
X2.10	<--- Budaya_Politik	1,804	,472	3,826	***	par_12
X2.11	<--- Budaya_Politik	2,176	,522	4,171	***	par_13
X2.12	<--- Budaya_Politik	2,043	,479	4,265	***	par_14
X3.3	<--- Budaya_Administrasi	1,000				
X3.4	<--- Budaya_Administrasi	,881	,122	7,229	***	par_15
X3.5	<--- Budaya_Administrasi	,995	,150	6,627	***	par_16
X3.7	<--- Budaya_Administrasi	1,043	,139	7,506	***	par_17
X3.8	<--- Budaya_Administrasi	,990	,134	7,378	***	par_18
X1.8	<--- Budaya_Sosial	,520	,055	9,536	***	par_19
Y1.1	<--- Kinerja_Pemerintah	1,000				
Y1.2	<--- Kinerja_Pemerintah	1,034	,085	12,166	***	par_20
Y1.3	<--- Kinerja_Pemerintah	1,113	,091	12,216	***	par_21
Y1.4	<--- Kinerja_Pemerintah	1,097	,097	11,281	***	par_22
Y1.5	<--- Kinerja_Pemerintah	1,198	,104	11,570	***	par_23
Y1.6	<--- Kinerja_Pemerintah	,856	,088	9,729	***	par_24
Y1.7	<--- Kinerja_Pemerintah	1,264	,098	12,910	***	par_25
Y1.8	<--- Kinerja_Pemerintah	1,026	,085	12,027	***	par_26
Y1.9	<--- Kinerja_Pemerintah	1,065	,104	10,277	***	par_27

### Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate
Kinerja_Pemerintah	<--- Budaya_Sosial	-,091
Kinerja_Pemerintah	<--- Budaya_Politik	,130
Kinerja_Pemerintah	<--- Budaya_Administrasi	,813
X1.2	<--- Budaya_Sosial	,799

		Estimate
X1.3	<--- Budaya_Sosial	,727
X1.4	<--- Budaya_Sosial	,724
X1.5	<--- Budaya_Sosial	,817
X1.6	<--- Budaya_Sosial	,850
X1.7	<--- Budaya_Sosial	,625
X1.9	<--- Budaya_Sosial	,671
X2.2	<--- Budaya_Politik	,335
X2.3	<--- Budaya_Politik	,646
X2.4	<--- Budaya_Politik	,554
X2.5	<--- Budaya_Politik	,648
X2.6	<--- Budaya_Politik	,589
X2.9	<--- Budaya_Politik	,667
X2.10	<--- Budaya_Politik	,492
X2.11	<--- Budaya_Politik	,659
X2.12	<--- Budaya_Politik	,732
X3.3	<--- Budaya_Administrasi	,621
X3.4	<--- Budaya_Administrasi	,650
X3.5	<--- Budaya_Administrasi	,580
X3.7	<--- Budaya_Administrasi	,715
X3.8	<--- Budaya_Administrasi	,665
X1.8	<--- Budaya_Sosial	,613
Y1.1	<--- Kinerja_Pemerintah	,773
Y1.2	<--- Kinerja_Pemerintah	,719
Y1.3	<--- Kinerja_Pemerintah	,819
Y1.4	<--- Kinerja_Pemerintah	,748
Y1.5	<--- Kinerja_Pemerintah	,776
Y1.6	<--- Kinerja_Pemerintah	,659
Y1.7	<--- Kinerja_Pemerintah	,849
Y1.8	<--- Kinerja_Pemerintah	,739
Y1.9	<--- Kinerja_Pemerintah	,691

Covariances: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Budaya_Sosial	<--> Budaya_Administrasi	,339	,047	7,151	***	par_65
e1	<--> e3	,245	,067	3,659	***	par_31
e1	<--> e2	,184	,062	2,976	,003	par_32
e2	<--> e3	,240	,065	3,707	***	par_33
e6	<--> e7	,270	,040	6,765	***	par_34
e7	<--> e8	,281	,040	7,022	***	par_35
e6	<--> e8	,218	,038	5,737	***	par_36
e9	<--> e10	,072	,018	4,111	***	par_37
e10	<--> e11	,065	,016	4,160	***	par_38
e11	<--> e12	,039	,013	2,954	,003	par_39
e12	<--> e13	,076	,019	4,011	***	par_40
e13	<--> e14	-,059	,017	-3,462	***	par_41
e9	<--> e11	,050	,018	2,743	,006	par_42

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
e23	<--> e24	,033	,012	2,707	,007	par_43
e23	<--> e30	,023	,010	2,234	,026	par_44
e29	<--> e30	-,020	,011	-1,850	,064	par_45
e30	<--> e31	,054	,015	3,540	***	par_46
e24	<--> e26	-,040	,014	-2,981	,003	par_47
e25	<--> e27	-,045	,013	-3,448	***	par_48
e25	<--> e29	-,032	,011	-2,829	,005	par_49
e7	<--> e32	,025	,012	2,006	,045	par_50
e6	<--> e32	,035	,014	2,439	,015	par_51
e3	<--> e5	-,147	,038	-3,832	***	par_52
e19	<--> e20	,082	,030	2,765	,006	par_53
e18	<--> e21	-,035	,028	-1,259	,208	par_54
e24	<--> e27	-,025	,014	-1,775	,076	par_55
e1	<--> e8	,047	,026	1,795	,073	par_56
e2	<--> e6	,036	,029	1,239	,215	par_57
e3	<--> e6	-,030	,029	-1,054	,292	par_58
e2	<--> e5	-,115	,036	-3,152	,002	par_59
e1	<--> e5	-,098	,038	-2,578	,010	par_60
e1	<--> e5	,056	,021	2,631	,009	par_61
e1	<--> e24	-,034	,019	-1,803	,071	par_62
e2	<--> e25	,051	,025	2,079	,038	par_63
e2	<--> e14	,028	,017	1,672	,094	par_64
e2	<--> e32					

Correlations: (Group number 1 - Default model)

		Estimate
Budaya_Sosial	<--> Budaya_Administrasi	,687
e1	<--> e3	,411
e1	<--> e2	,319
e2	<--> e3	,394
e6	<--> e7	,595
e7	<--> e8	,632
e6	<--> e8	,484
e9	<--> e10	,341
e10	<--> e11	,352
e11	<--> e12	,196
e12	<--> e13	,367
e13	<--> e14	-,264
e9	<--> e11	,206
e23	<--> e24	,219
e23	<--> e30	,163
e29	<--> e30	-,150
e30	<--> e31	,283
e24	<--> e26	-,225
e25	<--> e27	-,319
e25	<--> e29	-,279
e7	<--> e32	,134

		Estimate
e6	<--> e32	,188
e3	<--> e5	-,436
e19	<--> e20	,234
e18	<--> e21	-,111
e24	<--> e27	-,141
e1	<--> e8	,095
e2	<--> e6	,070
e3	<--> e6	-,056
e2	<--> e5	-,352
e1	<--> e5	-,308
e1	<--> e24	,174
e2	<--> e25	-,133
e2	<--> e14	,143
e2	<--> e32	,134

Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Budaya_Sosial	1,000				
Budaya_Politik	,035	,016	2,203	,028	par_66
Budaya_Administrasi	,243	,055	4,453	***	par_67
e32	,077	,015	5,028	***	par_68
e1	,566	,082	6,869	***	par_69
e2	,588	,078	7,579	***	par_70
e3	,628	,084	7,510	***	par_71
e4	,232	,031	7,401	***	par_72
e5	,181	,033	5,435	***	par_73
e6	,460	,049	9,380	***	par_74
e7	,449	,048	9,454	***	par_75
e8	,441	,048	9,220	***	par_76
e9	,279	,029	9,693	***	par_77
e10	,160	,019	8,534	***	par_78
e11	,215	,024	9,119	***	par_79
e12	,186	,022	8,499	***	par_80
e13	,234	,028	8,497	***	par_81
e14	,216	,026	8,194	***	par_82
e15	,360	,038	9,352	***	par_83
e16	,218	,026	8,455	***	par_84
e17	,128	,017	7,657	***	par_85
e18	,387	,045	8,535	***	par_86
e19	,259	,030	8,612	***	par_87
e20	,473	,053	8,996	***	par_88
e21	,253	,033	7,738	***	par_89
e22	,300	,035	8,569	***	par_90
e23	,124	,014	9,012	***	par_91

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
e24	,184	,020	9,004	***	par_92
e25	,112	,015	7,651	***	par_93
e26	,174	,019	9,160	***	par_94
e27	,174	,021	8,468	***	par_95
e28	,176	,018	9,564	***	par_96
e29	,114	,015	7,539	***	par_97
e30	,162	,018	9,010	***	par_98
e31	,228	,024	9,444	***	par_99

Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	Budaya_Administrasi	Budaya_Politik	Budaya_Sosial	Kinerja_Pemerintah
Kinerja_Pemerintah	,707	,296	-,039	,000
Y1.9	,000	,000	,000	1,065
Y1.8	,000	,000	,000	1,026
Y1.7	,000	,000	,000	1,264
Y1.6	,000	,000	,000	,856
Y1.5	,000	,000	,000	1,198
Y1.4	,000	,000	,000	1,097
Y1.3	,000	,000	,000	1,113
Y1.2	,000	,000	,000	1,034
Y1.1	,000	,000	,000	1,000
X3.8	,990	,000	,000	,000
X3.7	1,043	,000	,000	,000
X3.5	,995	,000	,000	,000
X3.4	,881	,000	,000	,000
X3.3	1,000	,000	,000	,000
X2.12	,000	2,043	,000	,000
X2.11	,000	2,176	,000	,000
X2.10	,000	1,804	,000	,000
X2.9	,000	2,217	,000	,000
X2.6	,000	1,875	,000	,000
X2.5	,000	1,952	,000	,000
X2.4	,000	1,640	,000	,000
X2.3	,000	1,800	,000	,000
X2.2	,000	1,000	,600	,000
X1.9	,000	,000	,520	,000
X1.8	,000	,000	,544	,000
X1.7	,000	,000	,686	,000
X1.6	,000	,000	,683	,000
X1.5	,000	,000	,832	,000
X1.4	,000	,000	,813	,000
X1.3	,000	,000	1,000	,000
X1.2	,000	,000		,000

# Pengaruh Moderasi Variabel Penelitian

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kinerja_Pemerintah	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,784	,168	4,661	***	par_42
Kinerja_Pemerintah	<--- Interaksi_X1Z	,066	,021	3,181	,001	par_43
Kinerja_Pemerintah	<--- Interaksi_X2Z	,220	,060	3,648	***	par_44
Kinerja_Pemerintah	<--- Interaksi_X3Z	,200	,037	5,440	***	par_45
X1.2	<--- Budaya_Sosial	1,000				
X1.3	<--- Budaya_Sosial	,874	,048	18,134	***	par_1
X1.4	<--- Budaya_Sosial	,893	,048	18,574	***	par_2
X1.5	<--- Budaya_Sosialp	,574	,042	13,780	***	par_3
X1.6	<--- Budaya_Sosial	,511	,041	12,469	***	par_4
X1.7	<--- Budaya_Sosial	,636	,046	13,864	***	par_5
X1.9	<--- Budaya_Sosial	,659	,045	14,627	***	par_6
X2.2	<--- Budaya_Politik	1,000				
X2.3	<--- Budaya_Politik	1,399	,216	6,471	***	par_7
X2.4	<--- Budaya_Politik	1,359	,243	5,596	***	par_8
X2.5	<--- Budaya_Politik	1,527	,265	5,753	***	par_9
X2.6	<--- Budaya_Politik	1,597	,279	5,730	***	par_10
X2.9	<--- Budaya_Politik	1,624	,284	5,724	***	par_11
X2.10	<--- Budaya_Politik	1,291	,277	4,652	***	par_12
X2.11	<--- Budaya_Politik	1,650	,286	5,779	***	par_13
X2.12	<--- Budaya_Politik	1,589	,261	6,063	***	par_14
X3.3	<--- Budaya_Administrasi	1,000				
X3.4	<--- Budaya_Administrasi	,806	,076	10,657	***	par_15
X3.5	<--- Budaya_Administrasi	1,080	,098	11,038	***	par_16
X3.7	<--- Budaya_Administrasi	,876	,081	10,823	***	par_17
X3.8	<--- Budaya_Administrasi	,908	,084	10,854	***	par_18
X1.8	<--- Budaya_Sosial	,639	,045	14,172	***	par_19
Z1.1	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,000				
Z1.3	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,471	,148	9,938	***	par_20
Z1.4	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,474	,148	9,931	***	par_21
Z1.5	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,428	,141	10,154	***	par_22
Z1.6	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,453	,148	9,785	***	par_23
Z1.7	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,491	,163	9,166	***	par_24
Z1.8	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,395	,148	9,423	***	par_25
Z1.9	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,472	,144	10,253	***	par_26
Z1.10	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,488	,144	10,308	***	par_27
Z1.11	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,422	,154	9,230	***	par_28
Z1.12	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,144	,130	8,824	***	par_29
Z1.13	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,961	,122	8,063	***	par_30
Y1.1	<--- Kinerja_Pemerintah	1,000				
Y1.2	<--- Kinerja_Pemerintah	,978	,080	12,251	***	par_31
Y1.3	<--- Kinerja_Pemerintah	1,107	,083	13,261	***	par_32
Y1.4	<--- Kinerja_Pemerintah	1,091	,091	12,043	***	par_33
Y1.5	<--- Kinerja_Pemerintah	1,197	,095	12,616	***	par_34
Y1.6	<--- Kinerja_Pemerintah	,863	,083	10,456	***	par_35
Y1.7	<--- Kinerja_Pemerintah	1,265	,091	13,959	***	par_36
Y1.8	<--- Kinerja_Pemerintah	,969	,080	12,440	***	par_37
Y1.9	<--- Kinerja_Pemerintah	1,046	,097	10,766	***	par_38

## Pengaruh Moderasi Variabel Penelitian

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kinerja_Pemerintah	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,784	,168	4,661	***	par_42
Kinerja_Pemerintah	<--- Interaksi_X1Z	,066	,021	3,181	,001	par_43
Kinerja_Pemerintah	<--- Interaksi_X2Z	,220	,060	3,648	***	par_44
Kinerja_Pemerintah	<--- Interaksi_X3Z	,200	,037	5,440	***	par_45
X1.2	<--- Budaya_Sosial	1,000				
X1.3	<--- Budaya_Sosial	,874	,048	18,134	***	par_1
X1.4	<--- Budaya_Sosial	,893	,048	18,574	***	par_2
X1.5	<--- Budaya_Sosialp	,574	,042	13,780	***	par_3
X1.6	<--- Budaya_Sosial	,511	,041	12,469	***	par_4
X1.7	<--- Budaya_Sosial	,636	,046	13,864	***	par_5
X1.9	<--- Budaya_Sosial	,659	,045	14,627	***	par_6
X2.2	<--- Budaya_Politik	1,000				
X2.3	<--- Budaya_Politik	1,399	,216	6,471	***	par_7
X2.4	<--- Budaya_Politik	1,359	,243	5,596	***	par_8
X2.5	<--- Budaya_Politik	1,527	,265	5,753	***	par_9
X2.6	<--- Budaya_Politik	1,597	,279	5,730	***	par_10
X2.9	<--- Budaya_Politik	1,624	,284	5,724	***	par_11
X2.10	<--- Budaya_Politik	1,291	,277	4,652	***	par_12
X2.11	<--- Budaya_Politik	1,650	,286	5,779	***	par_13
X2.12	<--- Budaya_Politik	1,589	,261	6,083	***	par_14
X3.3	<--- Budaya_Administrasi	1,000				
X3.4	<--- Budaya_Administrasi	,806	,076	10,657	***	par_15
X3.5	<--- Budaya_Administrasi	1,080	,098	11,038	***	par_16
X3.7	<--- Budaya_Administrasi	,876	,081	10,823	***	par_17
X3.8	<--- Budaya_Administrasi	,908	,084	10,854	***	par_18
X1.8	<--- Budaya_Sosial	,639	,045	14,172	***	par_19
Z1.1	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,000				
Z1.3	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,471	,148	9,938	***	par_20
Z1.4	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,474	,148	9,931	***	par_21
Z1.5	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,428	,141	10,154	***	par_22
Z1.6	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,453	,148	9,785	***	par_23
Z1.7	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,491	,163	9,166	***	par_24
Z1.8	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,395	,148	9,423	***	par_25
Z1.9	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,472	,144	10,253	***	par_26
Z1.10	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,488	,144	10,308	***	par_27
Z1.11	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,422	,154	9,230	***	par_28
Z1.12	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	1,144	,130	8,824	***	par_29
Z1.13	<--- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,981	,122	8,063	***	par_30
Y1.1	<--- Kinerja_Pemerintah	1,000				
Y1.2	<--- Kinerja_Pemerintah	,978	,080	12,251	***	par_31
Y1.3	<--- Kinerja_Pemerintah	1,107	,083	13,261	***	par_32
Y1.4	<--- Kinerja_Pemerintah	1,091	,091	12,043	***	par_33
Y1.5	<--- Kinerja_Pemerintah	1,197	,095	12,616	***	par_34
Y1.6	<--- Kinerja_Pemerintah	,863	,083	10,456	***	par_35
Y1.7	<--- Kinerja_Pemerintah	1,265	,091	13,959	***	par_36
Y1.8	<--- Kinerja_Pemerintah	,989	,080	12,440	***	par_37
Y1.9	<--- Kinerja_Pemerintah	1,046	,097	10,766	***	par_38

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X1Z	<-- Interaksi_X1Z					
X2Z	<-- Interaksi_X2Z	40,646				
X3Z	<-- Interaksi_X3Z	48,242				
		25,970				

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

		Estimate
Kinerja_Pemerintah	<-- Budaya_Sosial	-,003
Kinerja_Pemerintah	<-- Budaya_Administrasi	,174
Kinerja_Pemerintah	<-- Budaya_Politik	,007
Kinerja_Pemerintah	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,574
X1.2	<-- Budaya_Sosial	,790
X1.3	<-- Budaya_Sosial	,771
X1.4	<-- Budaya_Sosial	,768
X1.5	<-- Budaya_Sosial	,707
X1.6	<-- Budaya_Sosial	,644
X1.7	<-- Budaya_Sosial	,719
X1.9	<-- Budaya_Sosial	,740
X2.2	<-- Budaya_Politik	,443
X2.3	<-- Budaya_Politik	,660
X2.4	<-- Budaya_Politik	,605
X2.5	<-- Budaya_Politik	,664
X2.6	<-- Budaya_Politik	,653
X2.9	<-- Budaya_Politik	,638
X2.10	<-- Budaya_Politik	,465
X2.11	<-- Budaya_Politik	,652
X2.12	<-- Budaya_Politik	,758
X3.3	<-- Budaya_Administrasi	,663
X3.4	<-- Budaya_Administrasi	,634
X3.5	<-- Budaya_Administrasi	,670
X3.7	<-- Budaya_Administrasi	,649
X3.8	<-- Budaya_Administrasi	,652
X1.8	<-- Budaya_Sosial	,736
Z1.1	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,625
Z1.3	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,682
Z1.4	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,761
Z1.5	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,783
Z1.6	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,746
Z1.7	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,731
Z1.8	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,709
Z1.9	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,793
Z1.10	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,694
Z1.11	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,749
Z1.12	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,654
Z1.13	<-- Teknologi_Informasi_Akuntansi	,571
Y1.1	<-- Kinerja_Pemerintah	,721
Y1.2	<-- Kinerja_Pemerintah	,830
Y1.3	<-- Kinerja_Pemerintah	



		Estimate
Y1.4	<--- Kinerja_Pemerintah	
Y1.5	<--- Kinerja_Pemerintah	,764
Y1.6	<--- Kinerja_Pemerintah	,794
Y1.7	<--- Kinerja_Pemerintah	,688
Y1.8	<--- Kinerja_Pemerintah	,860
Y1.9	<--- Kinerja_Pemerintah	,737
		,697

**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Budaya_Sosial	<--> Budaya_Politik	,105	,025	4,250	***	par_46
Budaya_Sosial	<--> Budaya_Administrasi	,337	,044	7,697	***	par_47
Budaya_Sosial	<--> Teknologi_Informasi_Akuntansi	,187	,028	6,712	***	par_48
Budaya_Sosial	<--> Interaksi_X1Z	,112	,004	27,115	***	par_49
Budaya_Sosial	<--> Interaksi_X2Z	,054	,005	11,390	***	par_50
Budaya_Sosial	<--> Interaksi_X3Z	,090	,010	9,032	***	par_51
Budaya_Politik	<--> Budaya_Administrasi	,070	,016	4,299	***	par_52
Budaya_Politik	<--> Teknologi_Informasi_Akuntansi	,046	,011	4,344	***	par_53
Budaya_Politik	<--> Interaksi_X1Z	,015	,003	4,786	***	par_54
Budaya_Politik	<--> Interaksi_X2Z	,015	,003	5,249	***	par_55
Budaya_Politik	<--> Interaksi_X3Z	,022	,005	4,866	***	par_56
Budaya_Administrasi	<--> Teknologi_Informasi_Akuntansi	,143	,022	6,463	***	par_57
Budaya_Administrasi	<--> Interaksi_X1Z	,044	,006	7,958	***	par_58
Budaya_Administrasi	<--> Interaksi_X2Z	,037	,005	8,187	***	par_59
Budaya_Administrasi	<--> Interaksi_X3Z	,083	,010	8,606	***	par_60
Teknologi_Informasi_Akuntansi	<--> Interaksi_X1Z	,029	,004	7,545	***	par_61
Teknologi_Informasi_Akuntansi	<--> Interaksi_X2Z	,023	,003	7,578	***	par_62
Teknologi_Informasi_Akuntansi	<--> Interaksi_X3Z	,047	,006	7,679	***	par_63
Interaksi_X1Z	<--> Interaksi_X2Z	,007	,001	10,824	***	par_97
Interaksi_X2Z	<--> Interaksi_X3Z	,011	,001	9,877	***	par_98
Interaksi_X1Z	<--> Interaksi_X3Z	,013	,001	9,770	***	par_99
e1	<--> e2	,164	,035	4,683	***	par_64
e2	<--> e3	,175	,033	5,388	***	par_65
e1	<--> e3	,207	,034	6,078	***	par_66
e6	<--> e7	,171	,023	7,467	***	par_67
e7	<--> e8	,183	,023	8,043	***	par_68
e6	<--> e8	,143	,024	6,063	***	par_69
e6	<--> e10	,045	,014	3,175	,001	par_70
e9	<--> e11	,053	,013	3,988	***	par_71
e10	<--> e12	,033	,013	2,624	,009	par_72
e11	<--> e14	-,068	,017	-4,067	***	par_73
e13	<--> e13	,067	,017	3,853	***	par_74
e12	<--> e16	,016	,013	1,184	,236	par_75
e10	<--> e15	,005	,017	,318	,750	par_76
e10	<--> e36	,027	,012	2,337	,019	par_77
e35	<--> e42	-,017	,011	-1,574	,116	par_78
e41	<--> e43	,059	,016	3,749	***	par_79
e42	<--> e39	-,020	,013	-1,573	,116	par_80
e36	<--> e38	-,040	,013	-3,008	,003	par_81
e36	<--> e39	-,040	,012	-3,434	***	par_82
e37	<--> e41	-,031	,011	-2,907	,004	par_83
e37	<--> e42	,023	,010	2,255	,024	par_84
e35	<--> e24	,033	,014	2,397	,017	par_85
e23	<--> e26	,041	,009	4,424	***	par_86
e25	<--> e27	,064	,011	6,093	***	par_87
e26	<--> e28	,026	,012	2,251	,024	par_88
e27	<--> e28	,021	,010	2,063	,039	par_89
e27	<--> e30	,038	,013	3,042	,002	par_90
e29	<--> e31	,048	,016	2,960	,003	par_91
e23	<--> e31	,019	,012	1,532	,126	par_92
e24	<--> e31					
e25	<--> e31					

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
e23	↔	e28	-.023	.012	-1,862	.063	par_93
e23	↔	e32	-.024	.010	-2,368	.018	par_94
e24	↔	e32	-.035	.013	-2,566	.010	par_95
e26	↔	e33	.032	.009	3,488	***	par_96
e1	↔	e6	-.020	.026	-.750	.453	par_100
e1	↔	e7	-.051	.024	-2,148	.032	par_101
e22	↔	e24	.018	.011	1,592	.111	par_102
e12	↔	e16	-.025	.014	-1,725	.084	par_103
e24	↔	e34	-.023	.015	-1,550	.121	par_104
e19	↔	e33	.012	.011	1,109	.267	par_105
e16	↔	e44	-.014	.010	-1,387	.165	par_106
e33	↔	e35	-.027	.010	-2,857	.004	par_107
e32	↔	e36	-.019	.011	-1,760	.078	par_108
e31	↔	e39	.063	.015	4,121	***	par_109
e1	↔	e33	-.024	.014	-1,769	.077	par_110
e17	↔	e44	-.002	.008	-.298	.767	par_111
e32	↔	e35	-.012	.009	-1,358	.174	par_112
e34	↔	e40	.062	.013	4,766	***	par_113
e20	↔	e27	-.005	.011	-.505	.614	par_114
e15	↔	e34	.028	.017	1,635	.102	par_115
e10	↔	e31	-.004	.012	-.320	.749	par_116
e32	↔	e34	.041	.011	3,639	***	par_117
e29	↔	e31	-.030	.015	-2,066	.039	par_118
e30	↔	e32	.055	.010	5,681	***	par_119
e28	↔	e32	.029	.011	2,570	.010	par_120
e26	↔	e32	-.013	.008	-1,681	.093	par_121
e17	↔	e23	.035	.010	3,411	***	par_122
e40	↔	e41	-.018	.011	-1,593	.111	par_123
e3	↔	e4	.048	.022	2,217	.027	par_124
e4	↔	e5	.150	.023	6,436	***	par_125
e34	↔	e39	.032	.013	2,540	.011	par_126
e34	↔	e35	.036	.011	3,299	***	par_127
e34	↔	e36	.033	.013	2,550	.011	par_128
e33	↔	e37	.010	.011	.964	.335	par_129
e33	↔	e40	-.034	.012	-2,993	.003	par_130
e17	↔	e18	.010	.010	1,089	.276	par_131
e34	↔	e42	.028	.012	2,412	.016	par_132
e34	↔	e38	.018	.013	1,474	.141	par_133
e13	↔	e17	-.048	.014	-3,501	***	par_134
e12	↔	e17	-.005	.013	-.401	.689	par_135
e16	↔	e20	.037	.017	2,251	.024	par_136
e9	↔	e15	-.031	.022	-1,393	.164	par_137
e21	↔	e25	.007	.009	.710	.478	par_138
e16	↔	e21	-.008	.015	-.533	.594	par_139
e11	↔	e21	.012	.009	1,332	.183	par_140
e12	↔	e22	.003	.009	.324	.746	par_141
e21	↔	e26	.013	.011	1,248	.212	par_142
e22	↔	e26	.010	.011	.879	.379	par_143
e20	↔	e26	-.025	.013	-1,983	.047	par_144
e19	↔	e26	.018	.010	1,693	.091	par_145
e18	↔	e26	-.008	.012	-.718	.473	par_146
e3	↔	e8	-.047	.023	-1,992	.046	par_147
e3	↔	e6	-.062	.025	-2,431	.015	par_148

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

		Estimate
Budaya_Sosial	↔ Budaya_Politik	.420
Budaya_Sosial	↔ Budaya_Administrasi	.643
Budaya_Sosial	↔ Teknologi_Informasi_Akuntansi	.565

		Estimate
Budaya_Politik	<--> Budaya_Administrasi	,538
Budaya_Politik	<--> Teknologi_Informasi_Akuntansi	,561
Budaya_Administrasi	<--> Teknologi_Informasi_Akuntansi	,827
e1	<--> e2	,293
e2	<--> e3	,326
e1	<--> e3	,358
e6	<--> e7	,473
e7	<--> e8	,519
e6	<--> e8	,388
e9	<--> e10	,226
e10	<--> e11	,300
e11	<--> e12	,174
e13	<--> e14	-,299
e12	<--> e13	,339
e10	<--> e16	,083
e10	<--> e15	,022
e35	<--> e36	,184
e41	<--> e42	-,125
e42	<--> e43	,295
e36	<--> e39	-,117
e36	<--> e38	-,229
e37	<--> e39	-,286
e37	<--> e41	-,275
e35	<--> e42	,162
e23	<--> e24	,154
e25	<--> e26	,264
e26	<--> e27	,400
e27	<--> e28	,132
e29	<--> e30	,124
e23	<--> e31	,181
e24	<--> e31	,179
e25	<--> e31	,089
e23	<--> e28	-,119
e23	<--> e32	-,141
e24	<--> e32	-,160
e26	<--> e33	,192
e1	<--> e6	-,041
e1	<--> e7	-,112
e22	<--> e24	,063
e12	<--> e16	-,120
e24	<--> e34	-,095
e19	<--> e33	,052
e16	<--> e44	-,118
e33	<--> e35	-,180
e32	<--> e36	-,109
e31	<--> e39	,301
e1	<--> e33	-,071
e17	<--> e44	-,028
e32	<--> e35	-,082

		Estimate
e34	<--> e40	
e20	<--> e27	,325
e15	<--> e34	-,020
e10	<--> e31	,099
e32	<--> e34	-,018
e29	<--> e31	,209
e30	<--> e32	-,129
e28	<--> e32	,353
e26	<--> e32	,150
e17	<--> e23	-,086
e40	<--> e41	,251
e3	<--> e4	-,130
e4	<--> e5	,112
e34	<--> e39	,430
e34	<--> e35	,169
e34	<--> e36	,221
e33	<--> e37	,170
e33	<--> e40	,069
e17	<--> e18	-,192
e34	<--> e42	,051
e34	<--> e38	,149
e13	<--> e17	,095
e12	<--> e17	-,302
e16	<--> e20	-,034
e9	<--> e15	,124
e21	<--> e25	-,101
e16	<--> e21	,029
e11	<--> e21	-,030
e12	<--> e22	,051
e21	<--> e26	,012
e22	<--> e26	,067
e20	<--> e26	,046
e19	<--> e26	-,108
e18	<--> e26	,091
e3	<--> e8	-,038
e3	<--> e6	-,105
e3	<--> e6	-,135

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Budaya_Sosial	1,000				
Budaya_Politik	,062	,020	3,170	,002	par_149
Budaya_Administrasi	,275	,046	5,918	***	par_150
Teknologi_Informasi_Akuntansi	,109	,021	5,188	***	par_151
Interaksi_X1Z	-,009	,001	-10,799	***	par_152
Interaksi_X2Z	-,003	,001	-5,452	***	par_153
Interaksi_X3Z	-,002	,002	-,976	,329	par_154